

**STUDI PENGEMBANGAN DESA DIKAITKAN DENGAN EFEKTIVITAS
PELAYANAN INFRASTRUKTUR DI DESA UMPUNGENG,
KECAMATAN LALABATA, KABUPATEN SOPPENG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A
Oleh
YAYAH AWALIYAH
NIM. 60800114052

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, 26 Juli 2018

Penyusun,

Yayah Awaliyah
60800114052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Studi Pengembangan Desa dikaitkan dengan Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Yayah Awaliyah

NIM : 60800114052

Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
NIP. 19680303 199403 1 013


Andi Asmulyany, S.T., M.Si.
NIP. 70010066

Mengetahui


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik
Perencanaan Wilayah dan Kota



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 100 1


Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.
NIP. 19760603 200212 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Studi Pengembangan Desa dikaitkan dengan Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng” yang disusun oleh Yayah Awaliyah, NIM: 60800114052, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 26 Juli 2018

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati K, S.T., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kurniati, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ir. Mahmuddin, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Asmulyany, S.T., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag
NIP. 19651205 199303 1 00 1

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji atas kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “**Studi Pengembangan Desa dikaitkan dengan Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng**” untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sehingga dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta pihak-pihak yang menggunakan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan perencanaan.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada bagian ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hasanuddin R. dan Ibu Hj. Rahminah yang telah mencurahkan segala perhatian, doa, dukungan dan dorongan serta

mencurahkan segala tenaga selama proses penelitian berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Ir. Mahmuddin, Msi., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Andi Asmuliany, S.T., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si. selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Risma Handayani, S.IP., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
7. Teman – teman angkatan 2014 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (**Perisai**) serta semua keluarga besar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat dan teman–teman saya yang lainnya yang telah membantu baik berupa tenaga dan dukungan moril sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang turut andil membantu selama proses penelitian dan penyusunan skripsi berlangsung.

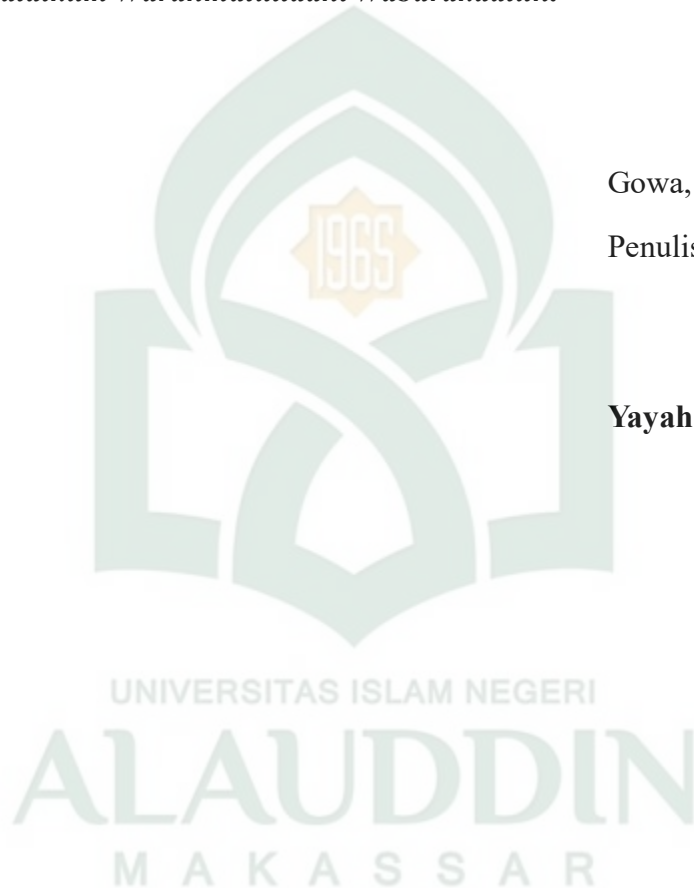
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Semoga Allah Swt. meridhoi penyusunan skripsi ini dan memberikan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Gowa, Juli 2018

Penulis

Yayah Awaliyah



ABSTRAK

Nama Penyusun : Yayah Awaliyah
NIM : 60800114052
Judul Skripsi : Studi Pengembangan Desa dikaitkan dengan Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Desa Umpungeng yang terletak di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng mempunyai permasalahan terkait infrastruktur. Permasalahan infrastruktur di Desa Umpungeng sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dengan kondisi topografi yang tinggi menyebabkan pola permukiman tumbuh secara berpecah sehingga pelayanan infrastruktur tidak efektif pada sebagian wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan infrastruktur dan menyusun arahan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di Desa Umpungeng. Metode analisis yang digunakan adalah proyeksi penduduk, analisis efektivitas pelayanan infrastruktur dan analisis kebutuhan infrastruktur. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa (1) Tingkat efektivitas pelayanan sangat tinggi dengan nilai 5 yaitu pelayanan pendidikan TK/RA/BA, pelayanan pendidikan SD sederajat dan ketersediaan poskesdes/polindes, (2) Tingkat efektivitas pelayanan tinggi dengan nilai 4 yaitu pelayanan pendidikan SMP sederajat dan ketersediaan puskesmas/pustu, (3) Tingkat efektivitas pelayanan sedang dengan nilai 3 yaitu pelayanan lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, pelayanan listrik, pelayanan air bersih dan sanitasi serta pelayanan komunikasi dan informasi, (4) Tingkat efektivitas pelayanan rendah dengan nilai 2 yaitu pelayanan perdagangan dan jasa dan fasilitas olahraga, (5) Tidak terlayani dengan nilai 0 yaitu pelayanan pendidikan SMA sederajat. Arahan pengembangan infrastruktur di Desa Umpungeng meliputi rencana pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, rencana penyediaan balai kesehatan, rencana pengembangan jalan penghubung dan jembatan penghubung desa, peningkatan kualitas jalan dan jembatan rusak, pemeliharaan terhadap jalan dan drainase, pengadaan jaringan listrik bagi wilayah dusun yang belum teraliri listrik, penyediaan tong sampah, bak sampah kecil dan gerobak sampah, serta pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*).

Kata Kunci : Infrastruktur, Efektivitas Pelayanan, Pengembangan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup.....	7
1. Ruang Lingkup Wilayah.....	7
2. Ruang Lingkup Substansi.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Pedesaan dan Pola Permukiman Perdesaan	9
1. Pengertian Wilayah dan Ruang.....	9
2. Pengertian Desa dan Perdesaan	10
3. Karakteristik dan Tipologi Desa	11
4. Pola Permukiman Desa	15
5. Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan	22

B. Pengertian dan Jenis Infrastruktur	23
1. Pengertian Infrastruktur.....	23
2. Jenis – Jenis Infrastruktur.....	25
3. Infrastruktur Pedesaan.....	28
4. Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja.....	31
C. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	33
1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur.....	33
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.....	35
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dalam Bidang Infrastruktur....	37
D. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah Perdesaan.....	37
1. Asal Perkembangan Wilayah Perdesaan	38
2. Komponen Perkembangan Wilayah : Model Triple A	41
E. Pengertian Efektivitas	44
F. Perbandingan Materi Pembahasan.....	46
G. Penelitian Sebelumnya.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
1. Jenis Data	56
2. Sumber Data.....	57
E. Variabel Penelitian	58
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	59
1. Metode Proyeksi Penduduk.....	59
2. Metode Analisis Fungsi Pelayanan (Daya Layan) atau <i>Function</i>	

<i>of Availability</i>	60
3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur	68
G. Definisi Operasional	73
H. Kerangka Pikir	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Soppeng	77
1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah	77
2. Kondisi Demografi Wilayah	79
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Lalabata	84
1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah	84
2. Kondisi Demografi Wilayah	87
C. Gambaran Umum Wilayah Desa Umpungeng	92
1. Letak Geografis dan Administrasi	92
2. Kondisi Demografi Wilayah	94
3. Penggunaan Lahan	97
4. Pola Permukiman	98
5. Potensi Wilayah	101
D. Ketersediaan Infrastruktur	102
1. Fasilitas	102
2. Utilitas	111
E. Proyeksi Penduduk Desa Umpungeng	136
F. Analisis Efektivitas Pelayanan infrastruktur	138
1. Fasilitas	138
2. Utilitas	142
G. Analisis Kebutuhan Infrastruktur	146
1. Fasilitas	146
2. Utilitas	152
H. Arahana Pengembangan Infrastruktur	155

1. Rencana Pengembangan Pelayanan Pendidikan	155
2. Rencana Pengembangan Pelayanan Kesehatan	156
3. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan	156
4. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik	157
5. Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan	157
I. Kajian Islam Terkait Kebutuhan Infrastruktur	163
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tipologi Distribusi Keruangan Desa	14
Tabel 2.	Sarana dan Prasarana Perdesaan	29
Tabel 3.	Arahan Kebijakan RPJMD Terkait Infrastruktur Wilayah	37
Tabel 4.	Tabel Perbandingan Materi Pembahasan	46
Tabel 5.	Jenis Variabel dan Indikator Penelitian	58
Tabel 6.	Indikator Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA.....	61
Tabel 7.	Indikator Ketersediaan dan Akses ke SD Sederajat	62
Tabel 8.	Indikator Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat	62
Tabel 9.	Indikator Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat	62
Tabel 10.	Indikator Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Puskesmas	63
Tabel 11.	Indikator Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktek Bidan	63
Tabel 12.	Indikator Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes atau Polindes	64
Tabel 13.	Indikator Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko/ Warung Kelontong	64
Tabel 14.	Indikator Ketersediaan Pasar.....	65
Tabel 15.	Indikator Ketersediaan Fasilitas Olahraga	66
Tabel 16.	Indikator Lalu Lintas dan Kualitas Jalan.....	66
Tabel 17.	Indikator Aksesibilitas Jalan.....	66
Tabel 18.	Indikator Jaringan Listrik	67
Tabel 19.	Indikator Sumber Air Minum	67
Tabel 20.	Indikator Sumber Air untuk Mandi/Cuci	67
Tabel 21.	Indikator Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler	68
Tabel 22.	Tingkat Efektivitas Pelayanan Infrastruktur berdasarkan Indikator.....	68
Tabel 23.	Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Lingkungan Permukiman	69

Tabel 24.	Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan	70
Tabel 25.	Kebutuhan Prasarana Persampahan	73
Tabel 26.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	78
Tabel 27.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016.....	81
Tabel 28.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	82
Tabel 29.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016.....	83
Tabel 30.	Luas Wilayah Desa dan Kelurahan yang Terdapat di Kecamatan Lalabata	85
Tabel 31.	Jarak Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Lalabata (km)	86
Tabel 32.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Lalabata Tahun 2016	87
Tabel 33.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalabata Tahun 2016	89
Tabel 34.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lalabata Tahun 2016	91
Tabel 35.	Luas Wilayah Dusun di Desa Umpungeng	93
Tabel 36.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun Pada Tahun 2017.....	94
Tabel 37.	Jumlah Penduduk Desa Umpungeng Tahun 2013-2017	96
Tabel 38.	Penggunaan Lahan di Desa Umpungeng Tahun 2018.....	97
Tabel 39.	Fasilitas Pendidikan di Desa Umpungeng.....	103
Tabel 40.	Fasilitas Kesehatan di Desa Umpungeng	105
Tabel 41.	Tabel Fasilitas Perdagangan dan Jasa.....	106
Tabel 42.	Fasilitas Olahraga di Desa Umpungeng	109
Tabel 43.	Fasilitas Peribadatan di Desa Umpungeng.....	110

Tabel 44.	Jaringan Jalan dan Jembatan di Desa Umpungeng	118
Tabel 45.	Jumlah Penduduk Desa Umpungeng Tahun 2013-2017	136
Tabel 46.	Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Tahun 2017-2037.....	137
Tabel 47.	Panjang Jalan berdasarkan Jenis Jalan di Desa Umpungeng	143
Tabel 48.	Tingkat Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng	146
Tabel 49.	Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi	147
Tabel 50.	Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi ..	148
Tabel 51.	Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi	149
Tabel 52.	Kebutuhan Fasilitas Olahraga di Desa Umpungeng hasil Proyeksi.....	151
Tabel 53.	Kebutuhan Fasilitas Peribadatan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi.....	152
Tabel 54.	Kebutuhan Prasarana Persampahan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pola Permukiman Tersebar	16
Gambar 2.	Pola Permukiman Menjalur	16
Gambar 3.	Pola Permukiman Mengelompok	17
Gambar 4.	<i>The Farm Village Type</i>	17
Gambar 5.	<i>The Nebulous Farm Type</i>	18
Gambar 6.	<i>The Arranged Isolated Farm Type</i>	18
Gambar 7.	<i>The Pure Isolated Type</i>	18
Gambar 8.	Pola Permukiman menurut Geograf Misra dalam Muta'ali	20
Gambar 9.	Pola Permukiman Menurut Bintaro (1977) dalam Muta'ali (2016)...	21
Gambar 10.	Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Alam yang Harmoni (Grigg, 1998)	24
Gambar 11.	Kerangka Pikir	76
Gambar 12.	Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Soppeng	78
Gambar 13.	Peta Administrasi Kabupaten Soppeng	80
Gambar 14.	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng dibagi berdasarkan Wilayah Kecamatan	81
Gambar 15.	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016.....	82
Gambar 16.	Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016	84
Gambar 17.	Diagram Persentase Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalabata	86
Gambar 18.	Peta Administrasi Kecamatan Lalabata	88
Gambar 19.	Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Lalabata Tahun 2016	89
Gambar 20.	Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Lalabata Tahun 2016.....	90

Gambar 21.	Piramida Penduduk Kecamatan Lalabata Tahun 2016	92
Gambar 22.	Diagram Persentase Luas Wilayah Dusun di Desa Umpungeng	93
Gambar 23.	Peta Administrasi Desa Umpungeng	95
Gambar 24.	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Umpungeng.....	96
Gambar 25.	Diagram Luas Penggunaan Lahan di Desa Umpungeng Tahun 2018	97
Gambar 26.	Permukiman di Desa Umpungeng	98
Gambar 27.	Peta Penggunaan Lahan Desa Umpungeng	99
Gambar 28.	Peta Pola Permukiman Desa Umpungeng	100
Gambar 29.	Potensi Desa Umpungeng.....	101
Gambar 30.	Fasilitas Perkantoran di Dusun Jolle	102
Gambar 31.	Peta Fasilitas Perkantoran.....	112
Gambar 32.	Peta Fasilitas Pendidikan.....	113
Gambar 33.	Peta Fasilitas Kesehatan	114
Gambar 34.	Peta Fasilitas Perdagangan dan Jasa.....	115
Gambar 35.	Peta Fasilitas Olahraga	116
Gambar 36.	Peta Fasilitas Peribadatan	117
Gambar 37.	Jaringan Listrik di Desa Umpungeng	126
Gambar 38.	Peta Jenis Jaringan Jalan	127
Gambar 39.	Peta Kondisi Jaringan Jalan.....	128
Gambar 40.	Peta Kondisi Jembatan	129
Gambar 41.	Peta Jaringan Listrik	130
Gambar 42.	Jaringan Air Bersih di Desa Umpungeng	131
Gambar 43.	Jaringan Persampahan	132
Gambar 44.	Jaringan Telekomunikasi	132
Gambar 45.	Peta Jaringan Air Bersih	133
Gambar 46.	Peta Jaringan Persampahan	134
Gambar 47.	Peta Jaringan Telekomunikasi	135
Gambar 48.	Peta Rencana Fasilitas Kesehatan	159

Gambar 49. Peta Rencana Jaringan Jalan dan Jembatan	160
Gambar 50. Peta Rencana Jaringan Listrik	161
Gambar 51. Peta Rencana Jaringan Persampahan.....	162



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan desa di Indonesia mengalami proses yang terus bergerak, dimulai dari jaman kolonial belanda, masa kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi saat ini (Muta'ali 2016 : 1). Pembangunan pedesaan dilaksanakan untuk mengurangi tingkat disparitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan sebagai akibat yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang lebih difokuskan kepada wilayah perkotaan. Pembangunan pedesaan diharapkan menjadi solusi terhadap dinamika sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai dasar perubahan (Barokah, et al. : 1). Namun selama proses perkembangannya, pembangunan pedesaan belum memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dilakukan sejak dahulu hingga saat ini (Muta'ali 2016 : 22).

Jumlah Penduduk Indonesia sekitar 50 % merupakan penduduk pedesaan namun, tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih tergolong rendah, yang dicerminkan dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah, tingkat kemiskinan tinggi, kualitas lingkungan permukiman rendah serta ketersediaan infrastruktur yang belum memadai (Adisasmita, 2012 : 133). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, penduduk Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk perdesaan jika dibandingkan dengan perkotaan tidak lagi jauh berbeda namun, memiliki disparitas ekonomi yang tinggi.

Kebijakan dan program pembangunan infrastruktur pedesaan yang diprioritaskan saat ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur di kawasan pedesaan (Cakrawijaya, Riyanto, & Nuroji, 2014 : 137). Infrastruktur merupakan poros perekonomian. Kucuran dana yang berasal dari pembiayaan publik dan swasta dipandang sebagai induk pembangunan (Haris, 2009 : 1). Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan–bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988 *dalam* Kodoatie, 2003 : 9). Penyediaan infrastruktur juga termuat dalam Al-Quran di antaranya tentang jalan dalam QS An-Nahl/16 : 15 yang berbunyi:

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

Terjemahnya:

“Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan (dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk”. (Departemen Agama RI, 2012 : 270)

Dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa setelah Allah Swt. menghamparkan gunung-gunung agar bumi tidak goncang kendati ia lonjong dan terus berputar, dan Dia menciptakan juga sungai-sungai yang dialiri air yang dapat digunakan untuk minum, dan selanjutnya Allah swt. menjadikan juga jalan-jalan yang terhampar agar kamu mendapat petunjuk lahiriah menuju arah yang kamu kehendaki dan petunjuk batiniah menuju pengakuan keesaan dan kekuasaan Allah swt. (Shihab, 2002 : 201). Selain jalan, Allah swt. juga menjelaskan tentang permukiman untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS An – Nahl/16 : 81 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم
 سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تُسْلِمُونَ^{٨١}

Terjemahnya :

“Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”. (Departemen Agama RI, 2012 : 277)

Dalam tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut menjelaskan tentang naungan dengan menyatakan bahwa: Dan Allah menjadikan bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan seperti pepohonan, atau bangunan-bangunan tinggi tempat-tempat bernaung dari cuaca panas dan dingin, dan Dia jadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup yakni gua dan lorong-lorong di gunung-gunung yang dapat kamu jadikan tempat tinggal atau bernaung sebagaimana halnya rumah-rumah, demikianlah sebagaimana Allah menciptakan kamu dari tiada, dan menganugerahkan kamu sarana kehidupan duniawi, Allah juga menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu dengan jalan mengutus para nabi untuk menyampaikan petunjuk keagamaan agar kamu berserah diri yakni tunduk patuh melaksanakan perintah-perintah-Nya (Shihab, 2002 : 310)

Setiap lingkungan permukiman perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai aktivitasnya (Pollo, Tondobala, & Sela, 2011 : 46). Pembangunan sarana dan prasarana fisik pada wilayah perdesaan masih perlu diperhatikan terutama akses perhubungan dan transportasi (Kusumastuti, 2015 : 82). Sarana dan prasarana transportasi yang masih minim menyebabkan sulitnya akses bagi masyarakat

pedesaan sehingga pertumbuhan ekonomi pedesaan tumbuh sangat lambat dibandingkan perkotaan (Farida, 2013 : 50).

Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 menyatakan bahwa nilai indeks pembangunan desa secara rata – rata yang paling tinggi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Soppeng dengan nilai rata – rata indeks sebesar 68,03. Total 49 desa yang ada di Kabupaten Soppeng, 46 desa (93,88%) diantaranya dalam kategori desa berkembang, 3 desa (6,12%) dalam kategori desa mandiri dan tidak ada desa tertinggal.

Menurut Syahza (2007) dalam Syahza & Suarman (2013 : 128) Pendekatan dalam pembangunan pedesaan harus disesuaikan dengan sifat dan cirinya. Karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas pada suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap sifat dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan oleh suatu daerah (Atmaja & Mahalli, 2015 : 251). Pembangunan infrastruktur tidak terbatas pada pembangunan fisik saja akan tetapi menuntut adanya operasional yang mengutamakan kualitas pelayanan jasa dan efektivitas pengelolaan infrastruktur (Haris, 2009 : 6).

Desa Umpungeng merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang merupakan daerah perbukitan dengan jumlah penduduk sebanyak 4.088 jiwa. Kondisi topografi wilayah Desa Umpungeng mempunyai pengaruh terhadap ketersediaan dan pelayanan infrastruktur sehingga terjadi kesenjangan antara dusun yang satu dengan dusun lainnya. Kondisi pembangunan infrastruktur Desa Umpungeng mempunyai permasalahan yang kompleks terkait dengan pelayanan infrastruktur yang tidak merata terhadap seluruh wilayah desa seperti aksesibilitas yang tidak memadai sehingga sulit

dijangkau, untuk menjangkau wilayah dusun tersebut tidak tersedia jalan yang terhubung dengan pusat desa sehingga harus melewati wilayah desa lain yang cukup jauh, kemudian dari desa tersebut untuk sampai pada salah satu dusun dengan melalui jalan pegunungan berjurang dengan lebar jalan yang kurang dari 1 meter tanpa pembatas sehingga hanya kendaraan khusus yang dapat melalui jalan tersebut. Kondisi jalan di sebagian wilayah Desa Umpungeng disaat musim hujan licin disebabkan jenis permukaan jalan tanah dan beton pada bagian tengahnya dengan lebar kurang dari 1 meter. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pelayanan listrik yang belum menjangkau sebagian wilayah serta pelayanan kesehatan yang kurang efektif.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012–2032, Kawasan Budaya Umpungeng yang terletak di Desa Umpungeng diperuntukkan sebagai Kawasan Wisata Budaya namun, aksesibilitas menuju kawasan tersebut belum memadai. Hal tersebut juga merupakan salah satu permasalahan terhadap pelayanan infrastruktur yang terjadi di Desa Umpungeng.

Pembangunan pedesaan yang diharapkan menjadi solusi perubahan sosial masyarakat desa yang menjadikannya sebagai basis perubahan pada kenyataannya belum mampu direalisasikan dengan munculnya berbagai permasalahan di Desa Umpungeng. Permasalahan infrastruktur di Desa Umpungeng sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dengan kondisi topografi yang tinggi menyebabkan pola permukiman tumbuh secara berpecah sehingga pelayanan infrastruktur tidak efektif pada sebagian wilayah. Oleh sebab itu Pembangunan infrastruktur menjadi aspek penting untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut sehingga diperlukan sebuah penelitian tentang **“Studi Pengembangan**

Desa dikaitkan dengan Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng” sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan arahan pengembangan infrastruktur di Desa Umpungeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka untuk menjawab permasalahan tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah yaitu :

1. Sejauhmana tingkat efektivitas pelayanan infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimana arahan pengembangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. Untuk menyusun arahan pengembangan infrastruktur di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini sebagai bahan masukan dan acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan.

2. Dapat dijadikan sebagai arahan untuk pengembangan wilayah perdesaan bagi perencanaan dan pihak–pihak yang berkepentingan.

E. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Wilayah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini untuk pengembangan desa dalam mewujudkan efektivitas pelayanan infrastruktur di Desa Umpungeng, maka ruang lingkup wilayah penelitian hanya terbatas pada wilayah Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini berisi bagaimana potensi pengembangan desa berbasis pelayanan infrastruktur di Desa Umpungeng berdasarkan pola permukiman yang terdapat pada wilayah tersebut dengan mengkaji ketersediaan infrastruktur yang terdapat di Desa Umpungeng, kemudian berdasarkan penelitian yang lebih lanjut sehingga dapat disusun arahan pengembangan desa dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini pembahasan dilakukan secara sistematis guna memudahkan dalam penulisan. Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian antara lain :

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang menguraikan tentang pengertian wilayah, pengertian ruang, pengertian desa dan perdesaan, karakteristik dan tipologi desa, pola permukiman desa, pengertian infrastruktur, jenis infrastruktur, infrastruktur pedesaan, infrastruktur pedesaan padat karya, kebijakan pembangunan infrastruktur secara umum, kebijakan RTRW Kabupaten Soppeng Tahun 2012–2032, Kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dalam bidang infrastruktur, strategi pengembangan wilayah perdesaan, pengertian efektivitas serta penelitian sebelumnya.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, yang menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis yang digunakan, definisi operasional dan kerangka pikir penelitian.
- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, yang menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Soppeng, gambaran umum wilayah Kecamatan Lalabata, gambaran umum wilayah Desa Umpungeng, ketersediaan infrastruktur, proyeksi penduduk Desa Umpungeng, analisis efektivitas pelayanan infrastruktur, analisis kebutuhan infrastruktur, strategis pengembangan infrastruktur dan kajian islam terkait hasil penelitian.
- BAB V PENUTUP**, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdesaan dan Pola Permukiman Perdesaan

1. Pengertian Wilayah dan Ruang

Terminologi wilayah (region) hingga kini belum ada kesepakatan diantara para pakar ekonomi, pembangunan, geografi maupun bidang lainnya (Richardson, 1975; Alkadri 2002). Sebagian ahli mendefinisikan wilayah merujuk pada tipe-tipe, fungsi wilayah atau kawasan dan korelasi unsur-unsur fisik dan non fisik dalam pembentukan suatu wilayah. Namun demikian, secara umum definisi wilayah dapat diartikan sebagai suatu unit geografis yang membentuk suatu kesatuan, Pengertian unit geografis merujuk pada ruang (spatial) yang mengandung aspek fisik dan non fisik, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, biologi dan pendidikan. Dalam konteks pembangunan, penerapan ilmu kewilayahan berpijak pada empat pilar, yaitu: (1) sumber daya alam, (2) lokasi, (3) ekonomi dan (4) sosial-budaya (socio-culture).

Wilayah merupakan kesatuan alam yang seragam dan/atau kesatuan masyarakat dengan kebudayaan yang khas sehingga dapat dibedakan satu wilayah dengan wilayah yang lain (AS, 2013 : 26). Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Ruang adalah tempat yang memberikan kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut istilah geografi umum yang dimaksud dengan ruang (space) adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia (AS, 2013 : 25). Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Pengertian Desa dan Perdesaan

Kuntjaraningrat (1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah, sedangkan Bergel (1995) mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek; (1) analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2500 orang, (2) analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya, dan (3) analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian (Sumpeno, 2011 : 3).

Zakaria (2000) dalam Sumpeno (2011) menyatakan, desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan - peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Definisi ini, menegaskan bahwa desa sebagai satu unit

kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan sendiri diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

3. Karakteristik dan Tipologi Desa

Menurut Roucek dan Warren (1962) masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) peranan kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Sorokin dan Zimerman dalam T.L Smith dan P.E Zop (1970) mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota, yaitu; mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klasifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni, desa swadaya desa swakarsa dan desa swasembada.

a. Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut;

- 1) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
 - 2) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
 - 3) Adat istiadat masih mengikat kuat.
 - 4) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
 - 5) Prasarana masih sangat kurang.
 - 6) Kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik.
- Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu instruksi dari atas.

b. Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut;

- 1) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- 2) Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- 3) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang hidup.
- 4) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- 5) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- 6) Swadaya masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

c. Desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana yang lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barana dan jasa.

Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut;

- 1) Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan atau lebih dari 55% penduduk bekerja di sektor tertier.
- 2) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha di atas 100 juta rupiah setiap tahun.
- 3) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- 4) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai fungsinya dan telah ada 7-9 lembaga yang hidup.
- 5) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD, sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- 6) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik
- 7) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

Everett. M. Rogers dan Rabel J. Budge dalam bukunya “Social Change in Rural Societies” (Leibo, 1995 dalam Muta’ali, 2016) dan mendasarkan pola permukiman mengelompokkan desa ke dalam empat tipe distribusi keruangan permukiman desa yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tipologi Distribusi Keruangan Desa

No.	Tipologi distribusi Keruangan Desa	Keterangan
1	<i>The Scattered Farmstead Community</i>	Pola permukiman desa terpencar, yang umumnya mengikuti sawah, ladang, atau sumber penghidupan penduduk. Tipologi biasanya terdapat pada daerah pegunungan dan perbukitan dan daerah terpencil lainnya.

No.	Tipologi distribusi Keruangan Desa	Keterangan
		Perkembangan desa ditentukan oleh aksesibilitas dan interaksi desa antara tersebut dengan desa lain atau kota.
2	<i>The Cluster Village</i>	Tipologi desa menunjukkan pola permukiman yang mengelompok dan dikelilingi oleh sawah atau kebun mereka. Tipe ini banyak ditemukan di daerah dataran dengan pola kehidupan sosial yang homogeny, guyup, gotong royong dsb. Desa – desa ini akan mengalami perkembangan tercepat mengingat terkonsentrasi penduduk dan efisiensi pelayanan.
3	<i>The Line Village</i>	Tipologi desa yang membentuk pola spasial memanjang mengikuti komponen utama desa, seperti jalan dan sungai, pantai, danau, dan khususnya transportasi baik darat maupun sungai.
	a. Pola Linier Mengikuti Jalan	Pola yang paling umum terjadi di pedesaan baik yang telah maju, maupun yang belum maju. Jalan sebagai sarana interaksi menarik banyak penduduk dan permukiman untuk tinggal di sekitarnya karena memiliki aksesibilitas tinggi. Desa – desa ini jugat termasuk tipe desa koridor transportasi antar kota
	b. Pola linier mengikuti sungai	Juga terkait dengan fungsi sungai tidak hanya sebagai sumber air tetapi juga sarana transportasi. Pola desa memanjang di tepi sungai banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan
	c. Pola Linier sepanjang pantai adalah desa – desa yang terletak di sepanjang pantai	

Sumber: Pengembangan Wilayah Pedesaan (Muta'ali, 2016)

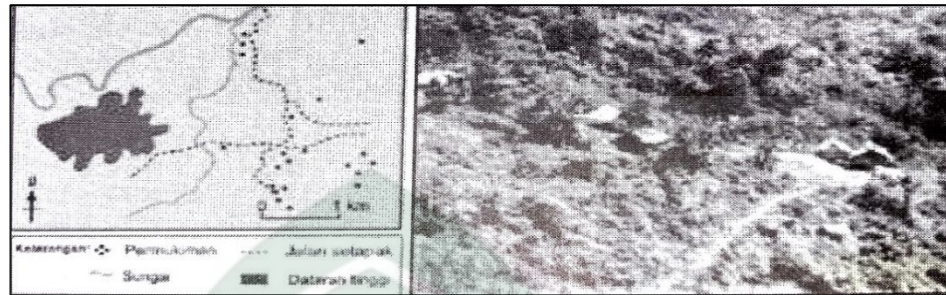
4. Pola Permukiman Desa

Pola permukiman desa dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut (AS, 2013 : 34):

a. Pola Permukiman Tersebar

Pola ini terbentuk dari rumah-rumah penduduk yang dibangun bebas dan tersebar pada wilayah yang luas. Pola permukiman ini umumnya terdapat di daratan rendah. Arah pemekaran permukiman dapat ke segala

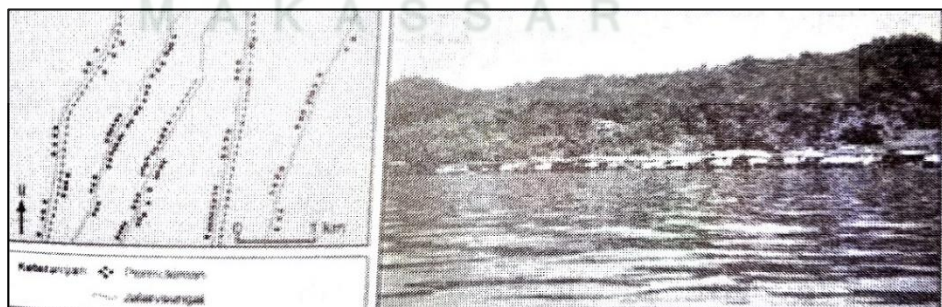
jurusan. Pusat kegiatan dan fasilitas dapat dibangun tersebar sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 1. Pola Permukiman Tersebar

b. Pola Permukiman Menjalur

Pola ini terbentuk di lokasi sepanjang jalur utama, seperti jalan, sungai, dan pantai. Di daerah pantai yang landai, dapat tumbuh permukiman menjalur. Penduduk pantai pada umumnya bermata pencaharian di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Apabila kemudian permukiman desa ini berkembang, maka rumah-rumah dibangun meluas sejajar garis pantai. Permukiman desa yang berkembang ini akhirnya dapat tersambung dengan permukiman di desa terdekat. Pusat kegiatan industri kecil seperti perikanan dan pertanian, dapat tetap bertahan di dekat permukiman lama.



Gambar 2. Pola Permukiman Menjalur

c. Pola Permukiman Mengelompok

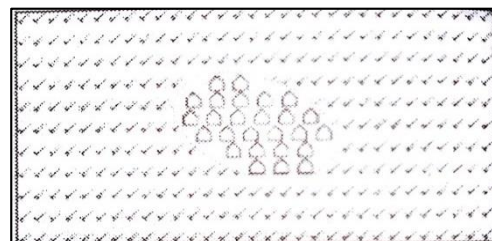
Pola ini terbentuk karena terjadi pengelompokan rumah pada wilayah terpadu yang biasanya berupa titik pertemuan atau persimpangan jalur transportasi. Pola permukiman mengelompok dapat juga berkembang di daerah pegunungan. Penduduk desa di daerah pegunungan umumnya masih memiliki hubungan keluarga. Pengelompokan permukiman ini di dorong oleh kegotong royongan penduduknya. Apabila jumlah penduduk bertambah dan terjadi pemekaran desa, maka arah pemekaran ke segala jurusan tanpa direncanakan. Pusat kegiatan penduduk dapat bergeser mengikuti pemekaran.



Gambar 3. Pola Permukiman Mengelompok

Paul H. landis, seorang ahli sosiologi pedesaan, membedakan pola persebaran permukiman desa menjadi empat tipe. Perbedaan pola ini ditentukan oleh lahan pertanian, pusat kegiatan permukiman, dan jalan utama.

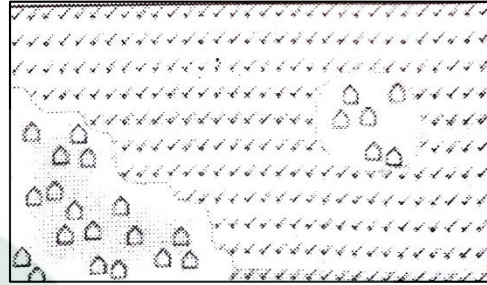
- 1) Tipe desa yang penduduknya tinggal bersama di suatu daerah dengan lahan pertanian di



Gambar 4. *The Farm Village Type*

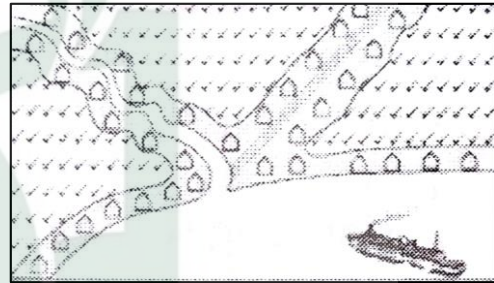
sekitarnya (*The farm village type*).

- 2) Tipe desa yang sebagian besar penduduknya tinggal bersama di suatu daerah dengan lahan pertanian di sekitarnya dan sebagian kecil penduduknya tersebar di luar permukiman utama yang telah padat (*The nebulous farm type*).



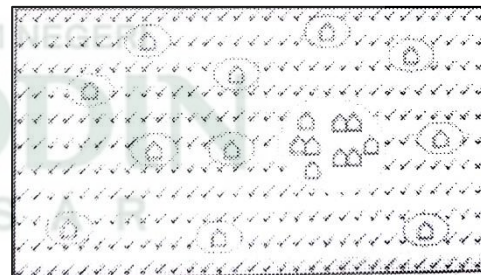
Gambar 5. *The Nebulous Farm Type*

- 3) Tipe desa yang penduduknya bermukim di sepanjang jalan utama desa, sungai, atau pantai. Lahan pertanian berada di sekitar permukiman desa dan jarak antar rumah tidak terlalu jauh (*The arranged isolated farm type*).



Gambar 6. *The Arranged Isolated Farm Type*

- 4) Tipe desa yang penduduknya tinggal tersebar dan terpisah dengan lahan pertanian masing-masing serta mengumpul pada suatu pusat perdagangan. Tipe ini biasanya terjadi pada daerah yang tanahnya memiliki tingkat kesuburan tidak sama (*The pure isolated type*).

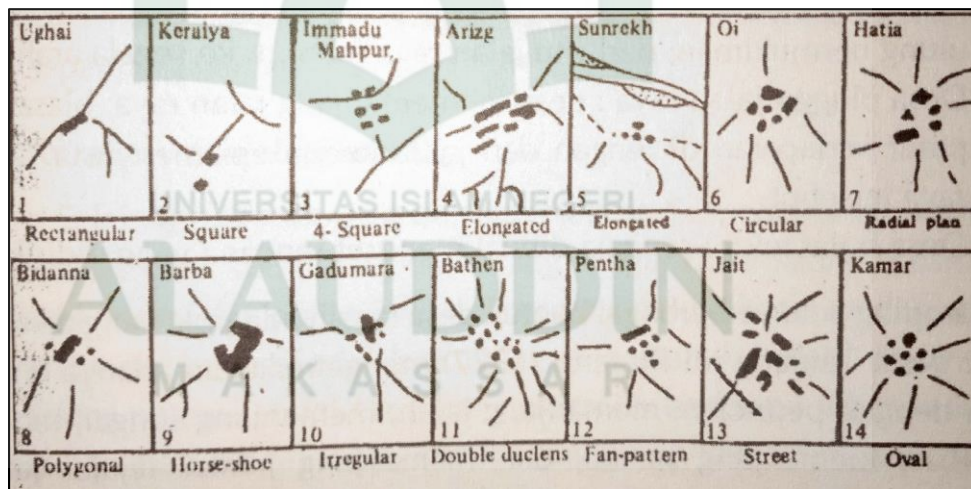


Gambar 7. *The Pure Isolated Type*

Berkaitan dengan pola ruang pedesaan, dalam kajiannya di Pakistan, Geograf Misra dalam Muta'ali (2016) menyusun 14 pola desa seperti di bawah ini.

- a. (1) *Rectangular* (segi empat panjang), tipe ini paling umum dan salah satu penyebabnya adalah mungkin bentuk lahan pertaniannya. Juga karena kekompakan desa membutuhkan letak rumah penduduk yang saling berdekatan (karena tak adanya tembok keliling yang mengamankannya). Pola segi empat panjang ini paling sedikit cocok bagi permukiman yang berkelompok.
- b. (2) *Square* (bujur sangkar): tipe ini muncul di persilangan jalan. Dapat pula muncul di permukiman berbentuk segi empat panjang yang terbagi atas empat blok.
- c. (4-5) Desa memanjang: kondisi alami dan budayawi setempat telah membatasi terjadinya pemekaran desa ke arah – arah tertentu sehingga dipaksa memanjangkan diri.
- d. (6) Desa melingkar: bentuk ini diwarisi dari zaman ketika kawasan permukiman masih kosong. Desa dibangun atas urugan tanah, sehingga dari luar Nampak seperti benteng dengan lubang untuk keluar-masuk.
- e. (7) Tipe beruji: jika pusat desa berpengaruh besar atas perumahan penduduk, maka tercapai bentuk beruji. Pengaruh tersebut berasal dari sebuah istana bangsawan, rumah ibadah maupun pasar.
- f. (8) Desa Poligonal: karena desa tak pernah dibangun menurut rencana tertentu, maka Nampak bentuk – bentuk luar yang serba aneka. Bentuk poligonal ini ada diantara bentuk melingkar dan segi empat panjang.

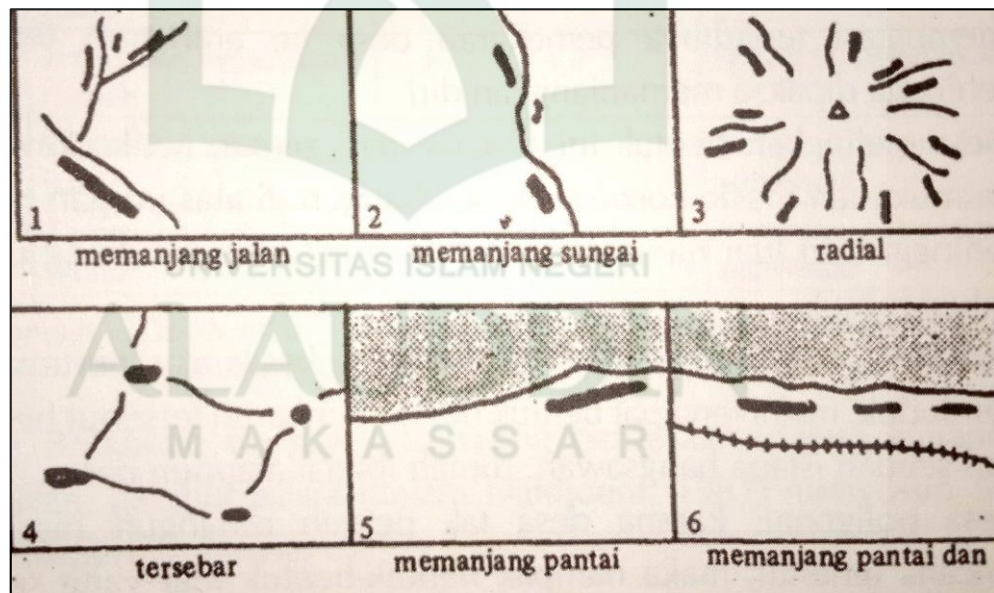
- g. (9) Pola tapal kuda: ini dihasilkan oleh suatu gunduk, bukit ataupun ledokan, sehingga pola desa menjadi setengah melingkar.
- h. (10) Tak teratur: desa yang masing – masing rumahnya tak karuan alang-ujurnya.
- i. (11) Inti rangkap: desa kembar sebagai hasil dari bertemunya dua permukiman yang saling mendekat; misalnya akibat dari lokasi stasiun K.A. diantaranya.
- j. (12) pola kipas: ini tumbuh dari suatu pusat yang letaknya di salah satu ujung permukiman; dari situ jalan raya menuju ke segala arah.
- k. (13) Desa pinggir jalan raya: desa ini memanjang jalan raya; biasanya pasar kedapatan di tengah dan jalan kereta api menyusur jalan tersebut.
- l. (14) Desa bulat telur: sengaja dibuat menurut rencana yang didirikan.



Gambar 8. Pola Permukiman menurut Geograf Misra dalam Muta'ali (2016)

Sedangkan menurut Bintarto (1977) dalam Muta'ali (2016), terdapat enam pola pemukiman penduduk desa, yaitu:

- a. Memanjang jalan; Di daerah plain (datar) susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai dan meru
- b. Memanjang sungai dan merupakan “Line Village” atau pola desa yang memanjang.
- c. Radial. Pola desa ini berbentuk radial terhadap wilayah pegunungan dan memanjang sepanjang sungai di lereng pegunungan.
- d. Pola desa di daerah karst Gunung Kidul - Yogyakarta adalah tersebar atau *scattered*, merupakan nukleus yang berdiri sendiri.
- e. Di daerah pantai susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai.
- f. Memanjang pantai dan sejajar dengan kereta api.



Gambar 9. Pola Permukiman Menurut Bintarto (1977) dalam Muta'ali (2016)

5. Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni (Adisasmita, 2006 : 19):

- a. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM).
- d. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan – kawasan miskin).
- e. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

Hal tersebut juga disebutkan oleh Lutfi Muta'ali (2016) dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Wilayah Perdesaan (dalam perspektif keruangan)” yang mengemukakan tentang Ruang lingkup pengembangan desa yang meliputi :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan dan transportasi, pengairan, energi listrik, telekomunikasi, lingkungan permukiman dan lainnya).
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Penguatan asset pedesaan melalui pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM).
- d. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)

- e. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban linkages*).
- f. Penguatan sistem kelembagaan.
- g. Penataan ruang kawasan perdesaan.

B. Pengertian dan Jenis Infrastruktur

1. Pengertian Infrastruktur

Grigg (1988) dalam Sasmita (2012) menyatakan bahwa Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Sistem infastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aspek fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting (Grigg, 2000 dalam Sasmita, 2012).

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur,

dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.



Gambar 10. Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Alam yang Harmoni (Grigg, 1998)

Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak penting yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi, sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas terutama bagi penentu kebijakan

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah (Haris, 2009 : 1). Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan

produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata (Atmaja & Mahalli, 2015 : 1).

Secara lebih spesifik oleh American Publik Works Association; Stone, (1974) dalam Kodoatie (2002) Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas – fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan – pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011, di jelaskan bahwa; Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menyebutkan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

2. Jenis-Jenis Infrastruktur

Dari definisi yang telah diuraikan, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori (Grigg, 1988) yang meliputi :

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (*treatment plant*)
- b. Sistem pengolahan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulang
- c. Fasilitas pengolahan limbah (padat)
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi
- f. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara. Termasuk di dalamnya adalah tanda – tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol
- g. Sistem transit publik
- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
- i. Fasilitas gas alam
- j. Gedung publik : sekolah, rumah sakit
- k. Fasilitas perumahan publik
- l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
- m. Komunikasi

Tiga belas kategori di atas dapat lebih diperkecil pengelompokkannya (Grigg, 1988; Grigg & Fontane, 2000) yaitu :

- a. Grup transportasi (jalan, jalan raya, jembatan)
- b. Grup pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
- c. Grup komunikasi
- d. Grup keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa)
- e. Grup pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat)

- f. Grup bangunan
- g. Grup distribusi dan produksi energi

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa termasuk prasarana ialah; jaringan jalan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, listrik, telepon, gas. Sedangkan, yang termasuk sarana ialah; tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pasar, perpustakaan, museum, dsb.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya harus diatur oleh pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur di atas dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena bersifat dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah tentang penyediaannya (Atmaja & Mahalli, 2015: 4).

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada Bab III ayat 2 menyebutkan jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. Infrastruktur transportasi
- b. Infrastruktur jalan
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi
- d. Infrastruktur air minum

- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan
- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
- k. Infrastruktur konservasi energi
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian
- o. Infrastruktur kawasan
- p. Infrastruktur pariwisata
- q. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- r. Infrastruktur perumahan rakyat

3. Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan terdiri dari berbagai jenis prasarana dan sarana dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial sehari-hari. Berbagai jenis infrastruktur pedesaan dapat di kelompokkan dalam berbagai bentuk kegiatannya, sebagai berikut (Sasmita, 2012 : 135): (1) bentuk kegiatan infrastruktur pedesaan mendukung aksesibilitas, seperti jalan desa, jembatan desa dan tamban perahu, (2) bentuk kegiatan infrastruktur pedesaan yang mendukung produksi pangan, misalnya irigasi desa, (3) bentuk kegiatan infrastruktur pedesaan yang mendukung

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan.

Komponen prasarana fisik desa mencakup pelayanan dibidang ekonomi, seperti jalan desa, jembatan, irigasi dan pabrik pengolahan pertanian. Dibidang kesehatan tersedianya sarana posyandu, sanitasi dan air bersih. Dibidang pendidikan tersedianya sekolah dasar, pesantren, atau madrasah (Sumpeno, 2011: 5).

Sistem sarana dan prasarana wilayah yang penting dan mencerminkan karakter pedesaan adalah sistem sarana transportasi, sarana pertanian khususnya irigasi, listrik, komunikasi, dan sanitasi lingkungan. Disamping itu juga sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Muta'ali, 2016 : 46).

Dalam Rencana Tata Ruang yang dimaksudkan dengan sarana dan prasarana desa adalah sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sarana perekonomian yang mencakup sarana produksi, perhubungan, telekomunikasi, pemasaran, dan sarana prasarana ekonomi lainnya (Muta'ali, 2016 : 187).

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Perdesaan

No.	Kelompok Sarana Prasarana Perdesaan	Jenis Sarana Prasarana Perdesaan
A	Dasar	
	Pendidikan	TK,SD, SMP, SMA/SMK, Pendidikan Informasi, kursus
	Kesehatan	Sarana kesehatan (Posyandu, Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Poliklinik, Tempat Praktek Tenaga Kesehatan, Toko Obat) Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan, Mantri, Dll.)
	Peribadatan	Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara
	Sanitasi Lingkungan	Air Bersih, MCK, limbah, tempat sampah (TPS)

No.	Kelompok Sarana Prasarana Perdesaan	Jenis Sarana Prasarana Perdesaan
	Prasarana Pemerintahan dan Publik	Kantor desa dan perlengkapannya, kantor pemerintahan lainnya, lapangan olah raga, tempat pertemuan warga
B	Ekonomi	
	Produksi	Waduk dan sarana prasarana irigasi lainnya, Toko Saprodi, penjual gas dan BBM
	Transportasi	Jalan (jenis, kuantitas dan kualitas), sarana transportasi desa (umum)
	Elektrifikasi	Listrik
	Telekomunikasi	Telpon, jaringan telpon, warnet, kantor pos, sambungan TV
	Pemasaran	Pasar, pertokoan, warung
	Jasa ekonomi lainnya	Bank, BPR, Koperasi

Sumber: *Pengembangan Wilayah Pedesaan (Muta'ali, 2016)*

Keberadaan sarana dan prasarana perdesaan tersebut akan berpengaruh terhadap tata letaknya khususnya jika dihubungkan dengan distribusi penduduk atau pola permukiman, sehingga faktor jarak dan posisi serta aksesibilitas sarana tersebut harus dipertimbangkan secara matang. Dari jenis sarana prasarana tersebut, yang paling menentukan pola dan bentuk desa serta arah perkembangannya adalah sistem jaringan transportasi.

Sarana perhubungan juga akan berpengaruh terhadap pola fisik desa karena fungsinya yang vital untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, untuk melaksanakan interaksi antara satu aktivitas dengan aktivitas lain. Pada hakekatnya jaringan jalan, yang merupakan faktor pengaruh terhadap pola fisik desa adalah jaringan jalan regional antar desa, antar kecamatan, dll yang menghubungkan desa tertentu dengan daerah di luarnya. Sedangkan pola jaringan internal dalam suatu desa merupakan bagian dari pada pola tata ruang fisik desa yang bersangkutan yang ditentukan oleh macam-macam aktivitas

yang ada di dalam desa yang bersangkutan dan intensitasnya (Muta'ali, 2016 : 188).

Tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah: (1) tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan (2) tujuan jangka menengahnya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin di pedesaan kepada infrastruktur dasar pedesaan. Sasaran kegiatan yang hendak dicapai adalah: (1) tersedianya infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, (2) meningkatkan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan, (3) meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan, serta (4) mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pedesaan partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan (Sasmita, 2012 : 136).

4. Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik sederhana yang dibangun melalui sistem padat karya yang memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Infrastruktur pedesaan padat pekerja meliputi (Pedomana Umum Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja Tahun 2014) :

- a Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa, pengerjaannya memanfaatkan tenaga kerja setempat, kualitas sederhana dari bahan material setempat dengan sistem padat karya. Ukuran lebar maksimal 3 meter, panjang jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Jenis konstruksi dari perkerasa batu pecah/batu kali, beton

adukan (1:3:5) yang dipadatkan dengan tenaga manusia menggunakan alat-alat sederhana.

- b Jalan lingkungan adalah jalan dilingkungan perkampungan masyarakat setempat. Jalan lingkungan dimaksud berukuran lebar (1,20 s/d 1,5 meter) dan ketebalan perkerasannya (0,15 s/d 0,20 meter) dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan. Bahan/material menggunakan batu pecah/krikil/adukan semen, yang pekerjaannya dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat sistem padat karya.
- c Jembatan sederhana adalah jembatan yang terletak pada ruas jalan desa ke sentra ekonomi atau jembatan sederhana yang menghubungkan antara desa. Pengerjaannya memanfaatkan tenaga kerja setempat dengan sistem padat pekerja. Ukuran jembatan sederhana (lebar = 2,75 meter s/d 3 meter dan panjang = 2 meter s/d 3 meter). Jenis konstruksi lokal teknologi yang digunakan adalah teknologi setempat.
- d Gorong – gorong sederhana adalah gorong – gorong yang terletak di jalan desa ke sentra ekonomi. Pengerjaannya memanfaatkan tenaga kerja setempat dengan sistem padat karya.
- e Talud/dinding penahan tanah/bronjong adalah konstruksi penahan tanah agar tidak longsor. Dinding penahan tanah ini terbuat dari batu pecah/batu kali, material, bahan setempat, diperkuat dengan adukan (semen, pasir dan kerikil). Pengerjaannya memanfaatkan tenaga kerja setempat dengan sistem padat pekerja. Adapun ukurannya seperti (ketebalan, tinggi, serta panjang) disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga konstruksi bronjolan dibuat dari batu kali dan diberi penahan dari kawat yang dianyam.

Talud/bronjolan (dinding penahan tanah), yang dimaksud terletak di jalan desa ke sentra ekonomi, guna menjaga kestabilan tanah agar tidak longsor.

- f Pasar desa adalah pasar tradisional untuk kebutuhan pergerakan ekonomi masyarakat pedesaan. Pasar dibuat berupa los/peta sederhana dengan menggunakan bahan material lokal dengan pengerjaannya memanfaatkan tenaga kerja setempat dengan sistem padat karya. Ukuran tiap los/petak (3 meter x 3 meter s/d 4 meter x 4 meter) maksimal, lengkap dengan fasilitas jalan untuk menunjang pasar dan halaman seperlunya/sesuai dengan kebutuhan.
- g Saluran irigasi yang dimaksud adalah saluran cacing (nonteknis) yang mengairi tempat pertanian (sentra ekonomi pertanian) masyarakat pedesaan. Pengerjaannya dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat dengan sistem padat pekerja. Adapun ukuran penampang irigasi : lebar bawah kurang lebih 0,60 meter, lebar atas 0,70 meter) berbentuk trapesium dengan panjang saluran disesuaikan menurut kebutuhan, saluran/irigasi berbentuk trapesium ini dimaksudkan agar tanah di atasnya tidak mudah longsor.

C. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Secara konsepsional, kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan diarahkan kepada :

- a Perencanaan pembangunan berimbang. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) dilakukan menggunakan

pendekatan perencanaan *top down* (strategi nasional PPDT) dan pendekatan perencanaan *bottom-up* (strategi daerah PPDT) secara terpadu dan berimbang berdasarkan prioritas pembangunan. Untuk mengurangi/mengatasi daerah tertinggal ditempuh melalui penyediaan infrastruktur pedesaan.

- b Penyusunan jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana transportasi meliputi pusat-pusat di daerah tertinggal dihubungkan oleh prasarana transportasi. Jaringan pelayanan transportasi menyangkut kegiatan pelayanan angkutan barang dan penumpang antar yang dilayani oleh moda transportasi. Dengan terselenggaranya jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi di daerah tertinggal akan mendorong kegiatan produksi dan jasa distribusi (jasa perdagangan dan jasa distribusi) di daerah tertinggal secara internal maupun secara eksternal (hubungan/keterkaitan dengan daerah-daerah lain).
- c Pengarusutamaan dalam prioritas pembangunan. Pembangunan kawasan strategis nasional, termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan menjadi arus utama (mainstream) pembangunan, yaitu arus utama pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, meliputi delapan prioritas, yaitu (a) peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja, (b) revitalisasi pertanian, ekspor dan kesempatan kerja, (c) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi, (d) peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, (e) peningkatan aktivitas

penanggulangan kemiskinan, pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, (g) penguatan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri, dan (h) penanganan bencana alam dalam pengurangan risiko bencana lainnya.

- d Sinergis Lokomotif dan Gerbang. Kawasan strategis nasional, termasuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan menghadapi berbagai masalah, yang dapat dikelompokkan, yaitu (a) permasalahan berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, (b) permasalahan berkaitan dengan keberdayaan masyarakat, (c) permasalahan berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, (d) permasalahan berkaitan dengan keterisolasian daerah (di dalamnya termasuk masalah infrastruktur pedesaan), serta permasalahan berkaitan dengan karakteristik daerah. Penanggulangan masalah – masalah tersebut perlu dilakukan upaya – upaya sinergis untuk mencapai hasil yang optimal, efektif dan efisien. Untuk setiap permasalahan apa yang ditanggulangi (program dan kemampuan sarana sebagai lokomotif untuk menarik gerbong tersebut). Jadi antara gerbong dan lokomotif harus sinergis agar dicapai hasil yang efektif dan efisien.

Dalam konteks pembangunan/pengembangan infrastruktur pedesaan pada satuan wilayah pembangunan terkecil membutuhkan pendekatan kewilayahan dan berkaitan terhadap dampak yang ditimbulkan, diantaranya dampak terhadap pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032

Kebijakan Penataan Ruang daerah yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng terdiri atas :

- a Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- c Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah;
- d pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- f perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- g pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- h pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- i pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- j pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
- k pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- l peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 dalam Bidang Infrastruktur

Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng disebutkan rencana terkait peningkatan infrastruktur daerah yang dirincikan dari tujuan, sasaran dan strategi perencanaan yang dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 3. Arahan Kebijakan RPJMD Terkait Infrastruktur Wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksi wilayah dan membuka lokasi terpencil	Memperbaiki kualifikasi jalan dan jembatan serta merintis jalan baru untuk lokasi terpencil dan lokasi khusus
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa	Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib kendaraan
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat	Merehabilitasi perumahan yang tidak layak huni bagi keluarga miskin, memperbaiki sistem sanitasi, dan menata permukiman kumuh
		Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya.	Menyadarkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam hal regulasi tata ruang serta menata utilitas perkotaan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021

D. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah Perdesaan

Strategi pengembangan wilayah pedesaan adalah langkah-langkah yang ditempuh guna optimalisasi potensi pedesaan (internal dan eksternal) untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal yang substansial dalam penyusunan strategi adalah mengetahui dan

memahami secara mendalam tentang faktor-faktor kunci yang menentukan perkembangan wilayah perdesaan. Dalam teori pertumbuhan wilayah dikemukakan bahwa terdapat dua perspektif penentu perkembangan wilayah yaitu (1) *intraregional factor*, yang menekankan pentingnya kandungan sumberdaya internal wilayah dan (2) *interregional factor* yang mengarah kepada optimasi hubungan antar wilayah sebagai determinan perkembangan. Selain itu pada akhir-akhir ini muncul penentu ketiga yaitu faktor manajemen atau pengelolaan wilayah baik terkait dengan perangkat kelembagaan maupun manajerial.

Bagian berikut menjelaskan dua pandangan tentang penentu perkembangan wilayah perdesaan yang didasarkan pada asal dan komponen perkembangan wilayah.

1. Asal Perkembangan Wilayah Perdesaan

Friedman dan Allonso (1978) dalam Muta'ali (2016) mengemukakan bahwa pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana kunci pengembangan wilayah perdesaan ditentukan oleh faktor internal, eksternal, dan pengelolaan yang dapat diformulasikan :

$$\text{PW}_{\text{Perdesaan}} = f(\text{FI} + \text{FE} + \text{M})$$

Keterangan :

PW = Pengembangan wilayah

f = fungsi

FI = faktor internal

FE = faktor eksternal

M = Manajemen

- a) Faktor internal terdiri dari semua potensi sumberdaya yang dimiliki dan terkandung di dalam wilayah perdesaan, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan. Sumberdaya alam dapat berupa potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan industri, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya yang kesemuanya tercermin dari tipologi desa masing-masing. Sumberdaya manusia terdiri dari aspek kuantitas seperti jumlah penduduk dan tenaga kerja dan aspek kualitas yang terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sumberdaya buatan lebih banyak berkaitan dengan output hasil pembangunan khususnya infrastruktur sarana dan prasarana fisik (transportasi), ekonomi dan sosial. Tingginya peran faktor internal sumberdaya akan berpengaruh pada perkembangan wilayah itu sendiri. Suatu wilayah akan dapat berkembang terus menerus apabila ada internalisasi sumberdaya, artinya sektor yang menjadi penggerak mula-mula tersebut bisa membangkitkan atau menumbuhkan sektor-sektor lain. Semakin tinggi potensi faktor internal tersebut, semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah.

- b) Faktor Eksternal, berkaitan dengan posisi relatif hubungan dengan wilayah perdesaan dengan wilayah lainnya, khususnya pusat-pusat pertumbuhan baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional (global). Posisi relatif berkaitan dengan letak geografis desa tersebut dengan wilayah lain khususnya pusat pertumbuhan dan kota, dimana umumnya desa-desa yang memiliki letak yang dekat dan aksesibilitas yang baik memberikan kemungkinan transfer manfaat yang lebih besar sehingga desa berkembang lebih cepat. Sedangkan pengertian hubungan atau keterkaitan bisa bermakna interaksi, interrelasi dan interdependensi bersifat lebih luas, tidak hanya secara fisik (transportasi), namun juga dalam pengertian sosial, ekonomi dan politik. Wilayah yang mampu memposisikan dalam keterkaitan dengan wilayah lain, akan membawa dampak dalam perkembangan wilayah itu sendiri, dan sebaliknya wilayah dengan keterkaitan yang rendah akan membawa konsekuensi pada rendahnya perkembangan wilayah. Dengan kata lain desa-desa yang memiliki hubungan eksternal lebih intensif bahkan sampai global akan berkembang lebih cepat. Beberapa contoh desa berbasis kerajinan dan industri kreatif dan pariwisata yang mampu menembus pasar luar negeri terbukti mampu berkembang cepat tanpa mengurangi potensi lokal yang ada.
- c) Faktor Manajemen, dalam pengertian lebih luas bermakna penggunaan sumberdaya (manusia, uang, material) untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkup manajemen terdiri *planning, organizing, actuating, budgeting, controlling*. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks ini manajemen terkait dengan dua aspek yaitu aspek kelembagaan (organisasi dan tata

aturan) dan kebijakan serta material yaitu kemampuan manajerial dari pengelola wilayah. Faktor kebijakan adalah perangkat aturan yang berisi tentang arah pengembangan perdesaan khususnya di dalam mendayagunakan potensi internal dan eksternal. Faktor kebijakan pembangunan perdesaan dapat berasal dari pusat maupun daerah bahkan lokal seperti kebijakan sebagai dasar berlangsungnya fungsi manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan khususnya pembiayaan yang menjadi komponen strategis dalam pembangunan perdesaan, untuk menjalankan fungsi manajemen maka diperlukan lembaga atau organisasi tertentu. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pelaku manajemen atau manajer wilayah perdesaan yang sangat menentukan bagaimana arah pembangunan desa dilakukan.

2. Komponen Perkembangan Wilayah : Model Triple A

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk pengembangan perdesaan secara menyeluruh dan terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja sustainable livelihood yang dikembangkan oleh DfID. Dalam bentuk paling sederhana, kerangka kerja ini menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) merupakan penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman.

Manusia dalam hal ini memiliki akses terhadap berbagai aset produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Chambers dan Conway mendefinisikan penghidupan berkelanjutan sebagai: “Suatu penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpanan, sumberdaya, claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan

untuk sarana untuk hidup: suatu penghidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang memberi sumbangan terhadap penghidupan-penghidupan lain pada tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep Triple-A dikembangkan berdasarkan kerangka kerja sustainable livelihood untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan tingkat perkembangan desa. Triple-A terdiri dari Aset-Akses-Aktivitas, yang dalam definisi chambers dikenal dengan asset, kemampuan, akses, dan kegiatan. Konsep Triple-A melakukan modifikasi pada indikator dan menggunakan unit kerja satuan analisis wilayah perdesaan, sehingga semakin tinggi keberadaan atau kepemilikan asset oleh desa dan asset tersebut mudah dijangkau serta didayagunakan oleh sistem pengelolaan (manajemen) yang baik, maka semakin tinggi tingkat perkembangan desa.

$$PW_{\text{pedesaan}} = f(\text{ASET} + \text{AKSES} + \text{AKTIVITAS})$$

Berdasarkan formulasi tersebut, wujud dari keberlangsungan pengembangan wilayah perdesaan terdiri dari pendapatan dan kesejahteraan yang baik, keberlangsungan tersebut ditentukan oleh Asset (natural, physical, human, financial dan sosial), aktivitas, dan akses terhadap asset yang ada. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

Asset, adalah kandungan sumberdaya yang ada di dalam wilayah perdesaan. Dalam konteks pendekatan sebelumnya dikenal dengan faktor internal desa. Lima aset desa tersebut antara lain:

- a) *Human capital*, yakni modal yang dimiliki oleh desa berupa kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia seperti pendidikan, keterampilan, pengetahuan, tenaga kerja, dan kesehatan;
- b) *Social capital*, adalah kekayaan sosial yang dimiliki masyarakat desa seperti jaringan, keanggotaan dari kelompok-kelompok, hubungan berdasarkan kepercayaan, pertukaran hak yang mendorong untuk beroperasi dan juga mengurangi biaya-biaya transaksi serta menjadi dasar dari sistem jaringan pengaman sosial yang informal;
- c) *Natural capital* adalah persediaan sumberdaya alam perdesaan seperti tanah, hutan, air, kualitas udara, bahan galian tambang, keanekaragaman hayati, dan lainnya;
- d) *Physical capital* adalah infrastruktur dasar perdesaan seperti jalan, saluran irigasi, sarana komunikasi, sanitasi dan persediaan air yang memadai, akses terhadap komunikasi, sdbnya;
- e) *Financial capital* sumber-sumber keuangan desa baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya.

Akses, adalah kemudahan atau keterjangkauan desa tersebut oleh wilayah lain atau keterjangkauan desa tersebut terhadap pasar yang merupakan salah satu komponen penting dalam pemasaran hasil pendayagunaan sumberdaya perdesaan. Akses dalam setiap wilayah berbeda satu sama lain dan mungkin ada wilayah yang tidak mempunyai akses terhadap pasar atau secara fisik sulit dijangkau. Akses terhadap pasar sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jarak terhadap pasar, akses kepada infrastruktur fisik,

telekomunikasi, akses terhadap informasi, akses terhadap pelayanan, dll. Faktor akses dalam pendekatan sebelumnya disebut dengan faktor eksternal yang berisi tentang daya interaksi, interrelasi, interdependensi wilayah desa tersebut dengan wilayah-wilayah lain baik regional, nasional maupun global. Semakin tinggi nilai aksesibilitas desa tersebut terhadap pasar atau wilayah lain, maka semakin tinggi potensi perkembangan wilayah perdesaan.

Aktivitas dapat berarti cara yang ditempuh semua stakeholder perdesaan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya internal dan eksternal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Aktivitas di sini dapat berarti perumusan kebijakan, manajemen (planning, organizing, actuating, budgeting, controlling), dan leadership dari manajer desa. Beberapa dari aktivitas dalam pembangunan desa di antaranya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD), pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat. Dukungan pada asset yang dimiliki desa dan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama akan mendukung tingkat perkembangan wilayah perdesaan.

E. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut effendi (1998) “komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Efektivitas menurut

pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Susanto, 1975).

“Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto 1975:156). Menurut pengertian diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya transformasi pelayanan publik, Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

Memperhatikan pendapat para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektivitas sering dicampur adukkan dengan kata efisien walau artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

F. Perbandingan Materi Pembahasan

Tabel 4. Tabel Perbandingan Materi Pembahasan

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
1	Wilayah	Wahyuddin Sumpeno (2011)	Nursyam AS (2013)	UU No. 26 Tahun 2007			Wilayah adalah kesatuan unit geografis yang meliputi segenap unsur yang meliputi berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mempunyai batasan yang jelas.
		suatu unit geografis yang membentuk suatu kesatuan, Pengertian unit geografis merujuk pada ruang (spatial) yang mengandung aspek fisik dan non fisik, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, biologi dan pendidikan.	Wilayah merupakan kesatuan alam yang seragam dan/atau kesatuan masyarakat dengan kebudayaan yang khas sehingga dapat dibedakan satu wilayah dengan wilayah yang lain	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.			
2	Ruang	Nursyam AS (2013)	Istilah Geografi Umum	UU No. 26 Tahun 2007			Ruang adalah wadah yang meliputi seluruh unsur baik darat, laut, udara termasuk ruang di dalam permukaan bumi sebagai tempat bagi makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya.
		Ruang adalah tempat yang memberikan kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur – unsur yang diperlukan untuk kehidupan	ruang (space) adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia	Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.			

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
3	Desa dan Perdesaan	Kuntjaraningrat (1977)	Bergel (1995)	Zakaria (2000) dalam Sumpeno (2011)	UU No. 26 Tahun 2007	UU No. 6 Tahun 2014	Desa adalah suatu wilayah yang memiliki kegiatan utama dalam bidang pertanian, tingkat kekerabatan yang tinggi dan masih memegang teguh adat istiadat. Sedangkan Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan dengan ciri masyarakat desa.
		Mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah	mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani	desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri	Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi	
4	Karakteristik dan Tipologi Desa	Roucek dan Warren (1962)	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1972 t	Everett. M. Rogers dan Rabel J. Budge			
		masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) peranan kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih	Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangannya: <ul style="list-style-type: none"> Desa Swadaya Desa Swakarsa Desa Swasembasa 	Tipologi Distribusi Keruangan Desa: <ul style="list-style-type: none"> <i>The Scattered Farmstead Community</i> <i>The Cluster Village</i> <i>The Line Village:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pola Linier Mengikuti Jalan ✓ Pola linier mengikuti sungai ✓ Pola Linier sepanjang pantai adalah desa – desa yang terletak di sepanjang pantai 			

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
		ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.					
5	Pola Permukiman	Aksa, N (2012)	Geograf Misra dalam Muta'ali (2016)	Bintaro			<ul style="list-style-type: none"> • Pola permukiman tersebar • Pola permukiman menjalur • Memanjang pantai • Memanjang pantai sejajar kereta • Pola permukiman mengelompok • Pola Permukiman Radial • Tipe beruji • Pola tapal kuda • Pola kipas • Desa bulat telur • Square • Rectangular • Desa poligonal • Inti rangkap
		<ul style="list-style-type: none"> • Pola permukiman tersebar • Pola permukiman menjalur • Pola permukiman mengelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rectangular</i> • <i>Square</i> (bujur sangkar) • Desa Memanjang • Desa melingkar • Tipe beruji • Desa poligonal • Pola tapal kuda • Tak teratur • Inti rangkap • Pola kipas • Desa pinggir jalan raya • Desa bulat telur 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanjang jalan • Memanjang sungai • Radial • Tersebar • Memanjang pantai • Memanjang pantai dan sejajar dg kereta api 			
6	Pengertian Infrastruktur	Grigg (1988)	Haris (2009)	<i>American Publik Works Association</i> (Stone, 1974)	Perpres No.38 Thn 2015	Pedomana Umum Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja Tahun 2014	Sarana dan prasarana fisik yang meliputi transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik yg lain yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dan merupakan roda
		sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan – bangunan gedung dan fasilitas publik	Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi	fasilitas – fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi – fungsi pemerintahan dalam	fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan	sarana dan prasarana fisik sederhana yang dibangun melalui sistem padat karya yang memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.	

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
		yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi		penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan – pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan – tujuan ekonomi dan sosial.	struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.		penggerak pertumbuhan ekonomi.
7	Jenis Infrastruktur	Grigg (1988)	Grigg & Fontane, 2000 (Pengelompokan Infrastruktur)	UU No.1 Tahun 2011	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005	Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi • Pengairan • Jaringan Jalan • Jaringan Air Bersih • Jaringan Air limbah • Jaringan Drainase • Jaringan persampahan • Jaringan Listrik • Jaringan Telekomunikasi • Fasilitas gas alam • Fasilitas publik • Fasilitas pendidikan • Fasilitas kesehatan • Fasilitas olahraga • Infrastruktur pariwisata • Infrastruktur lembaga pemasyarakatan • Infrastruktur perumahan rakyat • Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan • Infrastruktur konservasi energi • Infrastruktur fasilitas perkotaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem penyediaan air • Sistem pengolahan air limbah • Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi • Fasilitas lintas air dan navigasi • Fasilitas transportasi • Sistem transit publik • Sistem kelistrikan • Fasilitas gas alam • Gedung publik • Fasilitas perumahan publik • Taman kota termasuk stadion • komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • grup transportasi • grup pelayanan transportasi • grup komunikasi • grup keairan • grup pengolahan limbah • grup bangunan • grup distribusi & produksi energi 	<ul style="list-style-type: none"> • prasarana ialah; jaringan jalan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, listrik, telepon, gas. • sarana ialah; tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pasar, perpustakaan, museum, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> • infrastruktur transportasi, • infrastruktur jalan, • infrastruktur pengairan, • infrastruktur air minum dan sanitasi, • infrastruktur telematika, • infrastruktur ketenagalistrikan • infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur transportasi • Infrastruktur jalan • Infrastruktur sumber daya air dan irigasi • Infrastruktur air minum • Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat • Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat • Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan • Infrastruktur telekomunikasi dan informatika • Infrastruktur ketenagalistrikan • Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan • Infrastruktur konservasi energi 	

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
						<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur fasilitas perkotaan • Infrastruktur fasilitas pendidikan • Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian • Infrastruktur kawasan • Infrastruktur pariwisata • Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan • Infrastruktur perumahan rakyat 	
8	Infrastruktur Pedesaan	Sasmita (2012)	Pedoman Umum Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja 2014	(Muta'ali, 2016 : 187)			<ul style="list-style-type: none"> • Jalan desa • Jalan lingkungan • Jembatan desa • Listrik • Penyediaan air minum • Sanitasi pedesaan • Telekomunikasi • Saluran irigasi • Gorong – gorong • Tamban perahu • Talud/dinding penahan tanah/bronjong • Pasar • Sarana Pendidikan • Sarana Kesehatan • Sarana Peribadatan • Prasarana Pemerintahan dan Publik • Sarana Jasa Ekonomi
		<ul style="list-style-type: none"> • Jalan desa • Jembatan desa • Tamban perahu • Irigasi • Penyediaan air minum • Sanitasi pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan desa • Jalan lingkungan • Jembatan sederhana • Gorong – gorong • Talud/dinding penahan tanah/bronjong • Pasar • Saluran irigasi 	Dasar <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: TK,SD, SMP, SMA/SMK, Pendidikan Informasi, kursus • Kesehatan: Sarana kesehatan (Posyandu, Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Poliklinik, Tempat Praktek Tenaga Kesehatan, Toko Obat); Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan, Mantri, Dll.) 			

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
				<ul style="list-style-type: none"> • Peribadatan: Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara • Sanitasi Lingkungan: Air Bersih, MCK, limbah, tempat sampah (TPS) • Prasarana Pemerintahan dan Publik: Kantor desa dan perlengkapannya, kantor pemerintahan lainnya, lapangan olah raga, tempat pertemuan warga <p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi: Waduk dan sarana prasarana irigasi lainnya, Toko Saprodi, penjual gas dan BBM • Transportasi: Jalan (jenis, kuantitas dan kualitas), sarana transportasi desa (umum) • Elektrifikasi: Listrik • Telekomunikasi: Telpn, jaringan telpon, warnet, kantor pos, sambungan TV • Pemasaran: Pasar, pertokoan, warung 			

No	Materi	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Sumber 4	Sumber 5	Kesimpulan
				<ul style="list-style-type: none"> Jasa ekonomi lainnya: Bank, BPR, Koperasi 			
9	Efektivitas	effendi (1998)	Susanto (1975:156)	Agung Kurniawan			efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang
		komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan	Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi	Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.			

G. Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Joel Yermia Pollo, Linda Tondobala, & Rieneke L. E Sela	Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Pesisir Studi Kasus : Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana tingkat capaian pelayanan infrastruktur permukiman pesisir di Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong? Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman pesisir di Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong ditinjau dari ketersediaan infrastruktur ? 	Metode analisis kuantitatif deskriptif menggunakan SPM dipadukan dengan Arcgis	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Infrastruktur dalam perkembangan permukiman di Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong, didapati belum mencapai cakupan pelayanan maksimal, asumsi didukung oleh hasil perhitungan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Permen PU no.1 Tahun 2014) pada setiap jenis infrastruktur yg semuanya memiliki nilai masih berada di bawah target capaian SPM Tingkat kekumuhan pada kedua desa dalam kategori “kumuh sedang” dengan parameter infrastruktur yang belum terlayani secara komprehensif.

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2	Rosmawita Dharmasanti (Skripsi, 2016)	Sarana Prasarana Permukiman berdasarkan Sistem Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bentuk perbedaan sarana dan prasarana permukiman di Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Karangrejo yang memiliki perbedaan sistem perkotaan? • Bagaimana daya jangkauan yang dimiliki oleh penduduk di daerah pelayanan dan daya layan sarana prasarana di pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut? • Bagaimana tingkat ketercukupan sarana prasarana di kedua kecamatan tersebut sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan? 	<p>Penelitian deskriptif ini memanfaatkan data sekunder dan primer dalam pengolahan data menggunakan metode penelitian sensus. Pendekatan keruangan digunakan untuk melihat perbedaan sarana prasarana di daerah kajian. Analisis data kuantitatif untuk memfasilitasi penelitian kualitatif (sequential explanatory) menghasilkan kajian yang lebih mendalam untuk menjelaskan tentang kondisi dan bentuk sarana prasarana yang ada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan sistem perkotaan berdampak pada perbedaan sarana prasarana di dalam Banjarnegara dan Karangrejo, yaitu berupa jumlah, kondisi, dan kualitas sarana prasarana. • Daerah pelayanan Banjarnegara memiliki kemampuan daya jangkauan yang lebih baik daripada di Karangrejo karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dan jaringan jalan yang ada dalam kondisi yang baik. Daya layan yang diberikan oleh kedua PKL ini masih tergolong kurang efektif karena jumlah sarana yang sedikit. • Beberapa sarana prasarana yang ada jumlahnya sudah mampu melayani kebutuhan penduduk yang berada di dalam kecamatan, tetapi sarana prasarana tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk di daerah pelayanan (daerah di luar kecamatan sebagai daerah yang disangga kebutuhannya).
3	Hepi Ambarani (Skripsi, 2015)	Daya Layan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peningkatan Derajat Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti apa tingkat daya layan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo? • Apa saja strategi pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan derajat kesehatan? • Seperti apa efektivitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Sukoharjo? 	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan pengambilan sampel dengan <i>cluster sampling</i> kemudian dilakukan <i>random sampling</i> untuk menentukan responden. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis tingkat daya layan dilakukan menggunakan perhitungan <i>scalogram</i> setelah dilakukan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki rasio daya layan yang tidak seimbang dikarenakan jumlah tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang dapat dilayani. Kondisi fisik wilayah dan kesenjangan pembangunan menyebabkan distribusi fasilitas pelayanan tidak merata. Wilayah bagian utara Kabupaten Sukoharjo memiliki hirarki fasilitas pelayanan tingkat I, dan wilayah bagian selatan memiliki hirarki III. Dalam upaya pembangunan kesehatan, Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan 8 strategi untuk mencapai masyarakat Sukoharjo yang sejahtera dalam bidang kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</p>

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Seperti apa tingkat kepuasan peserta Jamkesmas terhadap pelaksanaan Jamkesmas di Kabupaten Sukoharjo? 	pembobotan. Analisis efektivitas Jamkesmas dengan indikator produktivitas, efisiensi, dan kepuasan.	Pelaksanaan Jamkesmas di Sukoharjo dapat dikatakan belum efektif, terutama dari segi produktivitas. Tingkat kepuasan responden sebesar 71,85%.
4	Husna Tiara Putri dan Sri Maryati (Jurnal Plano Madani, 2018)	Prioritas Penyediaan Infrastruktur Dasar Oleh Pengembang Perumahan di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Preferensi pengembang terhadap penyediaan infrastruktur di lingkungan perumahan yg dibangunnya • Komponen infrastruktur dasar 	<p>Secara keseluruhan pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dimana seluruh kriteria dan analisis yang dilakukan dapat diukur, dihitung, atau dioperasikan secara matematis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan komponen infrastruktur dasar yang menjadi prioritas penyediaan oleh pengembang dengan Analisis Hirarki Proses (AHP). • Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi pengembang dalam menyediakan infrastruktur akan dijawab dengan teknik skoring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembang memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bersifat vital seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, pembuangan air limbah, dan pos keamanan. Pertimbangan penyediaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan kondisi fisik dan lingkungan perumahan, keberadaan sumber daya alam, pendanaan, serta aturan formal yang berlaku. • Hasil penelitian yang secara tidak langsung memaparkan bagaimana peran dan perilaku pengembang dalam menyediakan infrastruktur dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. • Dari penelitian ini dapat dikembangkan strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan memanfaatkan peran aktor-aktor untuk menyediakan infrastruktur dasar dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimilikinya dan mengoptimalkan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata terkait dengan konsep penataan ruang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2015: 215) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain (Sudaryono, 2017 : 92).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan fokus wilayah penelitian pada setiap dusun di Desa Umpungeng, yang meliputi Dusun Jolle, Dusun Liangeng, Dusun Awo, Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu dan Dusun Waessuru. Penelitian ini akan dilakukan selama lima bulan yang terhitung mulai dari bulan Maret hingga Juli 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Survey lapangan yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi sasaran penelitian untuk memahami kondisi dan melakukan pengambilan data fisik wilayah pedesaan yang menjadi objek penelitian.
2. Pendataan Instansional, yaitu salah satu teknik pengumpulan data pada instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian.

3. Kepustakaan (library research) adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.
4. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Sudaryono, 2017 : 212).
5. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2017 : 219).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka, data ini berupa penjelasan secara deskriptif terhadap objek yang sedang diteliti.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui hasil yang diinginkan. Adapun jenis data yang dimaksud meliputi :
 - 1) Gambaran umum wilayah penelitian
 - 2) Kondisi demografi/kependudukan
 - 3) Ketersediaan infrastruktur

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi/pengamatan langsung di lapangan.
 - 1) Ketersediaan Infrastruktur diperoleh melalui survey lapangan
 - 2) Kondisi pelayanan Infrastruktur diperoleh melalui survey lapangan dan wawancara
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi atau lembaga – lembaga terkait serta data dari hasil penelitian sebelumnya yang sifatnya merupakan data baku guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian.
 - 1) Gambaran umum wilayah penelitian; diperoleh dari instansi terkait, dapat melalui Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Soppeng, maupun data yang berasal dari arsip kantor Desa Umpungeng.
 - 2) Kondisi demografi/kependudukan; diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Soppeng, maupun data yang berasal dari kantor Desa Umpungeng.
 - 3) Jumlah Ketersediaan infrastruktur; diperoleh melalui instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Soppeng, maupun data yang berasal dari arsip kantor Desa Umpungeng.

E. Variabel Penelitian

Kerlinger (2002) menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Selanjutnya Cresswell (2008) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qualities) di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2017:151). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5. Jenis Variabel dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Kependudukan	Perkembangan Jumlah Penduduk
2	Fasilitas, yang meliputi : a. Fasilitas Pendidikan b. Fasilitas Kesehatan c. Fasilitas Perdagangan dan Jasa d. Fasilitas Olahraga e. Fasilitas Peribadatan	- Ketersediaan - Kondisi - Efektivitas Pelayanan - Kebutuhan
3	Utilitas, yang meliputi : a. Jaringan Jalan dan Jembatan b. Jaringan Listrik c. Jaringan Air bersih d. Jaringan Persampahan e. Jaringan Telekomunikasi	- Ketersediaan - Kondisi - Efektivitas Pelayanan - Kebutuhan

Sumber : Pengolahan data kepustakaan

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka metode analisis yang digunakan yaitu :

1. Metode Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk di masa mendatang, tetapi merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi tertentu dari variabel pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga komponen variabel inilah yang menentukan besarnya penduduk dan karakteristiknya di masa mendatang (Mantra, 2000 dalam Muta'ali, 2015).

Agar dapat menghitung proyeksi penduduk Desa Umpungeng pada masa yang akan datang maka digunakan Metode Extrapolasi yang menurut Tarigan (2012), merupakan kecenderungan pertumbuhan penduduk di masa lalu dan melanjutkan kecenderungan tersebut untuk masa yang akan datang sebagai proyeksi. Rumus proyeksi tersebut adalah :

$$P_t = P_o + f (t-o)$$

Keterangan :

P_t = penduduk pada tahun t

P_o = penduduk pada tahun dasar

$(t-o)$ = selisih antara tahun dasar dengan tahun yang diramalkan, yang sering disingkat dengan n

f = fungsi perkembangan penduduk

Apabila trend masa lalu mendekati garis lurus maka $f(t-o)$ berubah menjadi $b(t-o)$ dan rumus keseluruhan menjadi

$$P_t = P_o + b(t-o)$$

dimana :

b = rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun pada masa lampau sampai sekarang (tahun dasar proyeksi)

Apabila trend masa lalu adalah garis lengkung yang menaik, rumusnya berubah menjadi

$$P_t = P_o (1+r)^{(t-o)}$$

dimana :

r = rata-rata proporsi kenaikan penduduk setiap tahun, yaitu jumlah kenaikan/pertambahan penduduk dibagi jumlah penduduk pada tahun dasar (tahun sebelumnya). Rumus tersebut sering disingkat menjadi

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

2. Metode Analisis Fungsi Pelayanan (Daya Layan) atau *Function of Availability*

Metode analisis fungsi pelayanan (daya layan) merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding, seperti besarnya pengguna aktual, pengguna potensial, penduduk keseluruhan, luas wilayah dan dengan pembanding standar. Fungsi daya layan memberikan indikasi kualitas dan tingkat kecukupan pelayanan, sehingga semakin baik daya layan, kualitas pelayanan juga semakin baik. Sedangkan jika memiliki standar pelayanan minimal (SPM) tertentu, maka kondisi daya layan lebih baik jika

nilainya melebihi standar yang ditetapkan (Muta'ali 2015). Ada dua tipe formula daya layan:

Tipe A

$$DLi = JP / JF$$

Tipe B

$$DLi = JF / JP$$

Keterangan :

DLi = Daya layan fasilitas i

JF = Jumlah fasilitas

JP = Pembanding jumlah penduduk. Pembanding lain dapat berupa luas wilayah, pengguna actual, pengguna potensial, penduduk menurut kelompok umur, dan sebagainya yang disesuaikan dengan tujuan.

Berdasarkan buku Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014, dimensi pelayanan dasar mencakup ketersediaan dan akses terhadap fasilitas. Metode ini digunakan untuk mengukur dimensi pelayanan dasar, yaitu :

a. Pelayanan Pendidikan

Tabel 6. Indikator Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA

Skor Indikator	Keterangan
0	Kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 20 km
1	Kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA sejauh lebih dari atau sama dengan 10 km dan kurang dari 20 km.
2	Merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA kurang dari 10 km.
3	kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk kurang dari 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk)
4	Kondisi dimana di desa tsb. Terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk)
5	Kondisi dimana di desa tsb. Terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk).

Tabel 7. Indikator Ketersediaan dan Akses ke SD sederajat

Skor Indikator	Keterangan
0	Kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 8 km
1	Kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat sejauh lebih dari atau sama dengan 4 km dan kurang dari 8 km
2	Merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat terdekat kurang dari 4 km.
3	kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0.00069840871109 (7 fasilitas per 10.000 penduduk)
4	Kondisi dimana di desa tsb. Terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00069840871109 (7 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0.00139681742219 (14 fasilitas per 10.000 penduduk)
5	Kondisi dimana di desa tsb. Terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00139681742219 (14 fasilitas per 10.000 penduduk)

Tabel 8. Indikator Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat

Skor Indikator	Keterangan
0	Kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 9 km
1	Kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat sejauh lebih dari atau sama dengan 3 km dan kurang dari 6 km
2	Merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP terdekat kurang dari 4 km.
3	kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terdekat kurang dari 3 km
4	Kondisi dimana di desa tsb. terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00053431809209 (5 fasilitas per 10.000 penduduk)
5	Kondisi dimana di desa tsb. terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00053431809209 (5 fasilitas per 10.000 penduduk)

Tabel 9. Indikator Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat

Skor Indikator	Keterangan
0	kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 14 km.
1	kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 9 km dan kurang dari 14 km.
2	kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat lebih dari atau sama dengan 5 km dan kurang dari 9 km.
3	kondisi dimana di desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat kurang dari 5 km.
4	kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMA sederajat dengan rasio ketersediaan SMA sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00044061849597(4 fasilitas per 10.000 penduduk).

Lanjutan Tabel 9

Skor Indikator	Keterangan
5	kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMA sederajat dengan rasio ketersediaan SMA sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00044061849597 (4 fasilitas per 10.000 penduduk).

b. Pelayanan Kesehatan

Tabel 10. Indikator Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Puskesmas

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat lebih dari atau sama dengan 4 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit
1	Desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat lebih dari sama dengan 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah
2	Desa yang tidak terdapat/pustu, rumah sakit bersalin/maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat kurang dari 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit
3	Desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat kurang dari 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah
4	Desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa kurang dari 0,000507032962398 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika desa tersebut terdapat praktek dokter, tetapi tidak tersedia poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin maupun rumah sakit
5	Desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan praktek bidan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,000507032962398 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan tempat praktek dokter.

Tabel 11. Indikator Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktek Bidan

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak terdapat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat lebih dari atau sama dengan 16 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit
1	Desa yang tidak terdapat tidak terdapat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju praktek bidan terdekat lebih dari sama dengan 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah
2	Desa yang tidak terdapat tidak terdapat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju praktek bidan terdekat kurang dari 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit
3	Desa yang tidak tidak terdapat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju praktek bidan terdekat kurang dari 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan muda atau sangat mudah

Lanjutan Tabel 11

Skor Indikator	Keterangan
4	Desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa kurang dari 0,00062957239928 (6 fasilitas per 10.000). termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit bersalin tetapi tidak ada rumah sakit
5	Desa yang terdapat/puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00062957239928 (6 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit tanpa memperhatikan ketersediaan rumah sakit bersalin

Tabel 12. Indikator Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes atau Polindes

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat lebih dari atau sama dengan 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit
1	Desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes/polindes terdekat lebih dari atau sama dengan 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah
2	Desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat kurang dari 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit
3	Desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat kurang dari 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah
4	Desa yang terdapat poskesdes atau polindes dengan rasio ketersediaan poskesdes atau polindes terhadap penduduk kurang dari desa kurang dari 0,00070719038224 (7 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit.
5	Desa yang terdapat poskesdes atau polindes dengan rasio ketersediaan poskesdes atau polindes terhadap penduduk desa lebih dari satu atau sama dengan 0,00070719038224 (7 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan tempat praktek bidan.

c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa

Tabel 13. Indikator Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko/Warung Kelontong

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko/warung kelontong

Lanjutan Tabel 13

Skor Indikator	Keterangan
1	Desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan maupun minimarket, tapi tersedia toko/warung kelontong dengan rasio ketersediaan toko/warung kelontong terhadap penduduk desa kurang dari 0,01004450094485 (100 fasilitas per 10.000 penduduk)
2	Desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan maupun minimarket, tetapi tersedia toko/warung kelontong dengan rasio ketersediaan toko/warung kelontong terhadap penduduk lebih dari atau sama dengan 0,01004450094485 (100 fasilitas per 10.000 penduduk)
3	Desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan tetapi tersedia minimarket dengan rasio ketersediaan minimarket terhadap penduduk desa kurang dari 0,00043681590218 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan toko/warung kelontong
4	Desa yang tidak terdapat kelompok pertokoan tetapi tersedia minimarket dengan rasio ketersediaan minimarket terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00043681590218 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan toko/warung kelontong
5	Desa yang terdapat kelompok pertokoan tanpa mempertimbangkan ketersediaan minimarket maupun toko/warung kelontong.

Tabel 14. Indikator Ketersediaan Pasar

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, maupun pasar tanpa bangunan
1	Desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, maupun pasar dengan bangunan semi permanen, tetapi masih ada pasar tanpa bangunan
2	Desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, tetapi masih ada pasar dengan bangunan semi permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen terhadap penduduk desa kurang dari 0,00053925247833 (5 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar tanpa bangunan
3	Desa yang tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen, tetapi masih ada pasar dengan bangunan semi permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00053925247833 (5 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar tanpa bangunan
4	Desa yang terdapat pasar dengan bangunan permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan permanen terhadap penduduk desa kurang dari 0,0003999640901 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen maupun pasar tanpa bangunan.
5	Desa yang terdapat pasar dengan bangunan permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan permanen dengan rasio ketersediaan pasar dengan bangunan permanen terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,0003999640901 (4 fasilitas per 10.000 penduduk), tanpa mempertimbangkan ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen maupun pasar tanpa bangunan.

d. Fasilitas Olahraga

Tabel 15. Indikator Ketersediaan Fasilitas Olahraga

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak tersedia fasilitas/lapangan olahraga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard)
1	Desa yang tersedia 1 atau 2 jenis fasilitas/lapangan olahraga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard)
2	Desa yang tersedia 3 atau 4 jenis fasilitas/lapangan olahraga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard)
3	Desa yang tersedia 5 atau 6 jenis fasilitas/lapangan olahraga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard)
4	Desa yang tersedia 3 atau 4 jenis fasilitas/lapangan olahraga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard)
5	Desa yang tersedia 9 atau 10 jenis fasilitas/lapangan olahraga apapun (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri, bilyard)

e. Sarana Transportasi

Tabel 16. Indikator Lalu Lintas dan Kualitas Jalan

Skor Indikator	Keterangan
1	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa hanya melalui air
2	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya selain aspal/beton, diperkeras, maupun tanah
3	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya adalah tanah
4	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya adalah diperkeras (batu, kerikil, dan lain-lain)
5	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa/kelurahan melalui darat, serta jenis permukaan jalan terluasnya adalah aspal/beton

Tabel 17. Indikator Aksesibilitas Jalan

Skor Indikator	Keterangan
1	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa hanya melalui air
2	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, tetapi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun
3	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, serta jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan
4	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, serta jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dan lain – lain)
5	Desa yang lalu lintas dari dan ke desa melalui darat, atau darat dan air, dan jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun

f. Infrastruktur Jaringan Listrik

Tabel 18. Indikator Jaringan Listrik

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik kurang dari atau sama dengan 17 persen
1	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 17 persen dan kurang dari atau sama dengan 33 persen
2	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 33 persen dan kurang dari atau sama dengan 50 persen
3	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 50 persen dan kurang dari atau sama dengan 67 persen
4	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 67 persen dan kurang dari atau sama dengan 83 persen
5	Desa yang persentase keluarga pengguna listrik lebih dari 83 persen

g. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 19. Indikator Sumber Air untuk Minum

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari air hujan atau lainnya
1	Desa yang sumber air minum sebagian besar keluarga berasal dari sungai/danau/kolam
2	Desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari sumur
3	Desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari mata air
4	Desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari ledeng tanpa meteran, sumur bor, atau pompa
5	Desa yang sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari air kemasan, atau ledeng dengan meteran

Tabel 20. Indikator Sumber Air untuk Mandi/Cuci

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari air hujan atau lainnya
1	Desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari sungai/danau/kolam
2	Desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari mata air
3	Desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari sumur
4	Desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari ledeng tanpa meteran, sumur bor, atau pompa
5	Desa yang sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari air kemasan, atau ledeng dengan meteran

h. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

Tabel 21. Indikator Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler

Skor Indikator	Keterangan
0	Desa yang tidak ada <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) dan tidak ada sinyal telepon seluler/ <i>handphone</i>
1	Desa yang ada <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) tetapi tidak ada sinyal telepon seluler/ <i>handphone</i>
2	Desa yang tidak ada <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) tetapi ada sinyal telepon seluler/ <i>handphone</i>
3	Desa yang ada <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) tetapi ada sinyal telepon seluler/ <i>handphone</i> yang lemah
4	Desa yang tidak ada <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) tetapi ada sinyal telepon seluler/ <i>handphone</i> yang kuat
5	Desa yang ada <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) tetapi ada sinyal telepon seluler/ <i>handphone</i> kuat

Berdasarkan Indikator tersebut sehingga dapat ditentukan tingkat efektivitas pelayanan infrastruktur pada suatu desa dengan memberikan bobot :

Tabel 22. Tingkat Efektivitas Pelayanan Infrastruktur berdasarkan Indikator

Skor Indikator	Keterangan Tingkat Efektivitas
0	Tidak Terlayani
1	Sangat rendah
2	Rendah
3	Sedang
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

Sumber : Modifikasi dari Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014

3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur

Kebutuhan fasilitas pelayanan merupakan fungsi dari jumlah penduduk, sehingga dalam proyeksi kebutuhan fasilitas diperlukan perhitungan proyeksi pertambahan jumlah penduduk sebagaimana telah di jelaskan dalam bahasan tentang pertumbuhan penduduk (Muta'ali 2015). Berikut formula proyeksi kebutuhan fasilitas :

$$Di-t(n) = JPt(n) / Thi$$

Dimana,

$$JP t(n) = Po (1+r)t / Thi$$

Keterangan

$D_{i-t(n)}$ = demand atau kebutuhan fasilitas I pada tahun ke – n (proyeksi)

$JPt(n)$ = jumlah penduduk hasil proyeksi pada tahun ke-n

$P_o (1+r)^t$ = proyeksi penduduk dengan metode pertumbuhan geometri

Th_i = Threshold atau ambang batas fasilitas i

Berdasarkan formula tersebut, maka dapat dihitung jumlah tambahan fasilitas (JTF) pelayanan yang harus dipenuhi pada tahun ke-n yaitu :

JTF = $D_{i-t(n)}$ - S_i dimana, S_i merupakan ketersediaan fasilitas saat awal perhitungan.

SPM Masing – masing pelayanan fasilitas permukiman di Indonesia tertuang dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang ditampilkan pada tabel berikut (Muta'ali 2015) :

Tabel 23. Kriteia Penentuan Fasilitas Pelayanan Lingkungan Permukiman

No	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Penduduk Pendukung (Threshold)	Luas Lahan	Radius Jangkauan
		Jiwa	(m ²)	m
A. PENDIDIKAN				
1	TK	1250	1.200	500
2	SD	1.600	1.500	1.000
3	SMP	4.800	10.000	1.000
4	SMA	4.800	20.000	3.000
B. KESEHATAN				
1	Posyandu	1.250		500
2	Balai pengobatan	2.500	300	1.000
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.600	4.000
4	Puskesmas Pembantu	30.000	500	1.500
5	Puskesmas	120.000	650	3.000
6	Rumah Sakit	240.000	86.400	
7	Tempat Praktek Dokter	5.000		1.500
8	Apotik/Rumah Obat	30.000	350	1.500
C. EKONOMI				
1	Toko/warung	250	250	300
2	Pertokoan	6.000	6.000	2.000

No	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Penduduk Pendukung (Threshold)	Luas Lahan	Radius Jangkauan
		Jiwa	(m ²)	m
3	Pusat pertokoan/pasar kecil lingkungan	30.000	30.000	
4	Pusat Niaga (toko, pasar, bank, kantor, industri)	120.000	120.000	
5	Shopping center	340.000	96.000	
D. UMUM				
1	Gedung serbaguna	120.000	3.000	
2	Gedung bioskop	120.000	2.000	
3	Masjid lokal	2.500	600	1.000
4	Masjid kelurahan	30.000	3.600	
5	Masjid kecamatan	120.000	5.400	
6	Taman dan Lapangan Olahraga	30.000		
7	Taman tempat Main dan olahraga (GOR)	480.000		
8	Taman/Tempat Main	250	250	100
9	Taman/Tempat Main	2.500	1.250	1.000
E. PELAYANAN PUBLIK				
1	Kantor kelurahan	30.000	1.000	
2	Kantor kecamatan	120.000	25.000	
3	Kantor polisi / koramil	120.000	1000	
4	Tempat pembuangan sampah sementara	120.000	1000	

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimum dapat juga menggunakan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

a. Jaringan jalan

Tabel 24. Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari elemen – elemen jalan			
	Perkerasan (m)	Bahu jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)
Lokal sekunder I	3-7 (mobil-motor)	1.5-2 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda)	0.5

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari elemen – elemen jalan			
	Perkerasan (m)	Bahu jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)
Lokal sekunder II	3-6 (mobil-motor)	1-1.5 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyangkang cacat roda)	0.5
Lokal sekunder III	3 (mobil-motor)	0.5 (darurat parkir)	1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyangkang cacat roda)	0.5
Lingkungan I	1.5-2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	-	0.5
Lingkungan II	1.2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	-	0.5

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

b. Jaringan Listrik

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

1) Penyediaan kebutuhan daya listrik

- setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
- setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa
- dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

2) Penyediaan jaringan listrik

- disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
- disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi

jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar (lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan);

- c) disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
- d) adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah;
- e) sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan.

c. Penyediaan Air Minum

Standar Pelayanan Minimum untuk penyediaan utilitas Air Minum dalam mendukung lingkungan permukiman warga mengacu pada Permen PU No. 1 Tahun 2014 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator penyediaan air minum adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Target pencapaian SPM Air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/perhari.

$$\text{SPM cakupan pelayanan} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Proyeksi total masyarakat}}$$

d. Pengelolaan Persampahan

Distribusi pengolahan sampah pada lingkup terkecil RW, Kelurahan, Kecamatan hingga lingkup Kota

Tabel 25. Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	-	
RW (2500 jiwa)	- Bak sampah kecil - Gerobak sampah	TPS	- 2 m ² - 6 m ²	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kelurahan (30.000 jiwa)	- Gerobak sampah - Bak sampah besar	TPS	- 2 m ² - 12 m ²		Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kecamatan (120.000 jiwa)	- Mobil sampah - Bak sampah besar	TPS/TPA local	- - 25 m ²		Mobil mengangkut 3x seminggu
Kota (>480.000 jiwa)	- Bak sampah akhir - Tempat dauh ulang sampah	TPA	-	-	

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

G. Definisi Operasional

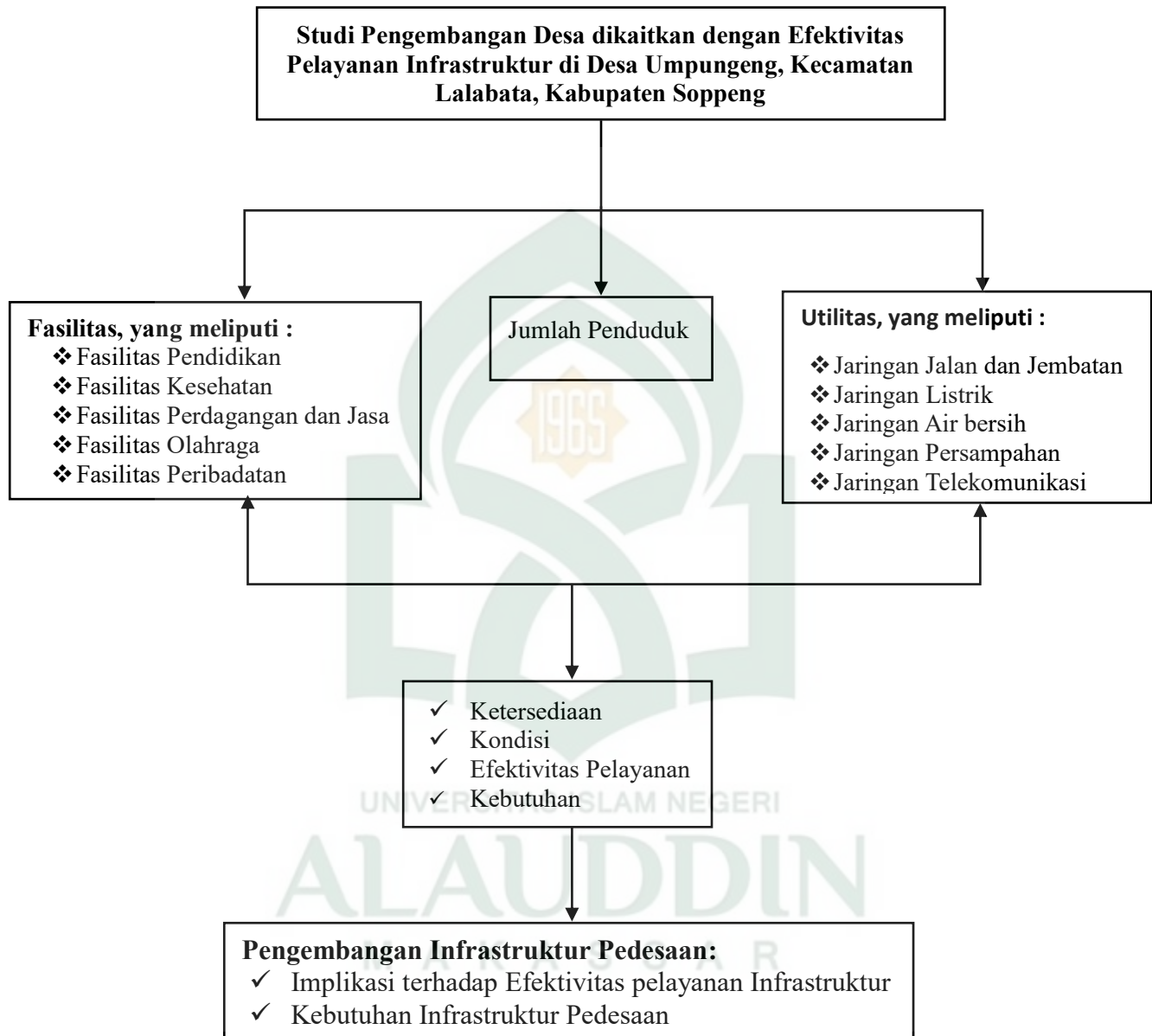
Secara sederhana definisi operasional dimaknai sebagai sebuah petunjuk yang menjelaskan kepada peneliti mengenai bagaimana mengukur sebuah variabel secara konkret. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah Desa Umpungeng, yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan karakteristik wilayah yang merupakan desa yang berada pada daerah perbukitan.
2. Kawasan Pedesaan merupakan batasan wilayah yang mempunyai karakteristik masyarakat pedesaan dalam hal ini Desa Umpungeng.

3. Infrastruktur adalah kelengkapan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Infrastruktur pedesaan adalah sarana dan prasarana dasar yang diperlukan dalam wilayah Desa Umpungeng untuk mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat desa dalam mendukung pengembangan desa.
5. Ketersediaan Infrastruktur adalah jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Umpungeng.
6. Fasilitas pendidikan adalah sarana penyedia dan penyelenggara kegiatan pendidikan serta unsur terkait yang terdapat di wilayah Desa Umpungeng.
7. Fasilitas kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di Desa Umpungeng.
8. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah sarana penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Umpungeng.
9. Fasilitas olahraga adalah sarana untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang terdapat di Desa Umpungeng.
10. Fasilitas peribadatan adalah sarana sebagai tempat untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada tuhan yang maha esa.
11. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan penghubung yang diperlukan untuk terhubung satu sama lainnya agar dapat mengakses wilayah Desa Umpungeng.
12. Jaringan listrik adalah sistem interkoneksi dari semua elemen listrik yang terhubung sehingga menghasilkan aliran listrik di Desa Umpungeng.

13. Jaringan air bersih adalah jaringan air yang terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Umpungeng
14. Jaringan persampahan adalah sistem pengelolaan sampah yang terdapat di Desa Umpungeng.
15. Jaringan telekomunikasi adalah segala perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakainya dengan pemakai lainnya sehingga dapat saling terhubung dan terkoneksi satu sama lain walaupun berada di lokasi yang berbeda dalam hal ini perangkat telekomunikasi yang terdapat di Desa Umpungeng.
16. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
17. Efektivitas pelayanan infrastruktur adalah tingkat pencapaian pelayanan infrastruktur dalam menjangkau kebutuhan wilayah Desa Umpungeng atau dapat diartikan pula sebagai tingkat keberhasilan terhadap pelayanan infrastruktur wilayah Desa Umpungeng.

H. Kerangka Pikir



Gambar 11. Kerangka Pikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Soppeng

1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu wilayah dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis wilayah Kabupaten Soppeng terletak antara 4° 06' Lintang Selatan dan 4° 32' Lintang Selatan dan antara 119° 47' 18" Bujur Timur dan 120° 06' 13" Bujur Timur. Kabupaten Soppeng mempunyai luas wilayah sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi wilayah Kabupaten Soppeng berbatasan langsung dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone

Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Dengan luas daratan 700 km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya 800 km² berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Gunung yang tertinggi yang di dalam wilayah Kabupaten Soppeng yaitu gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m. Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang

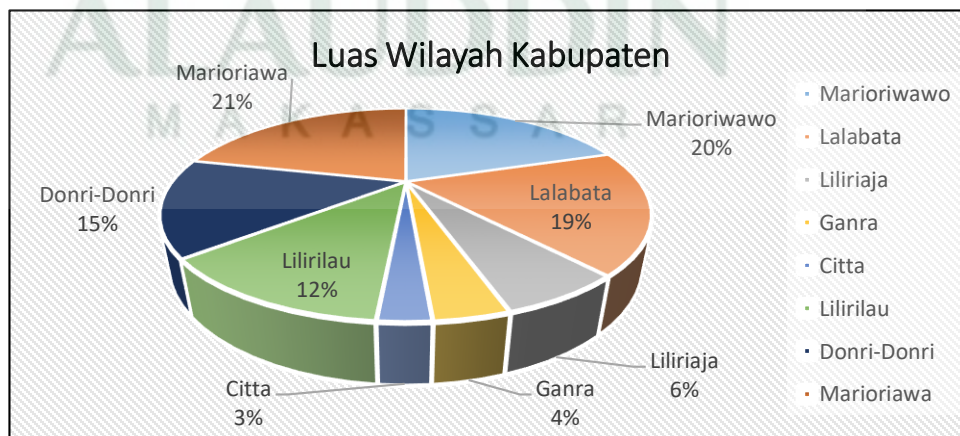
cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain : Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai walannae, sungai tersebut melalui Dusun Umpungeng, Dusun Langkemme, Dusun Cenranae, Dusun Soga ke Sungai Walannae.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 RW, dan 1.163 RT. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Soppeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 26. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Marioriwawo	300	20.0
2	Lalabata	278	18.5
3	Liliriaja	96	6.4
4	Ganra	57	3.8
5	Citta	40	2.7
6	Lilirilau	187	12.5
7	Donri-Donri	222	14.8
8	Marioriawa	320	21.3
Jumlah		1500	100

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2017



Gambar 12. Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Soppeng

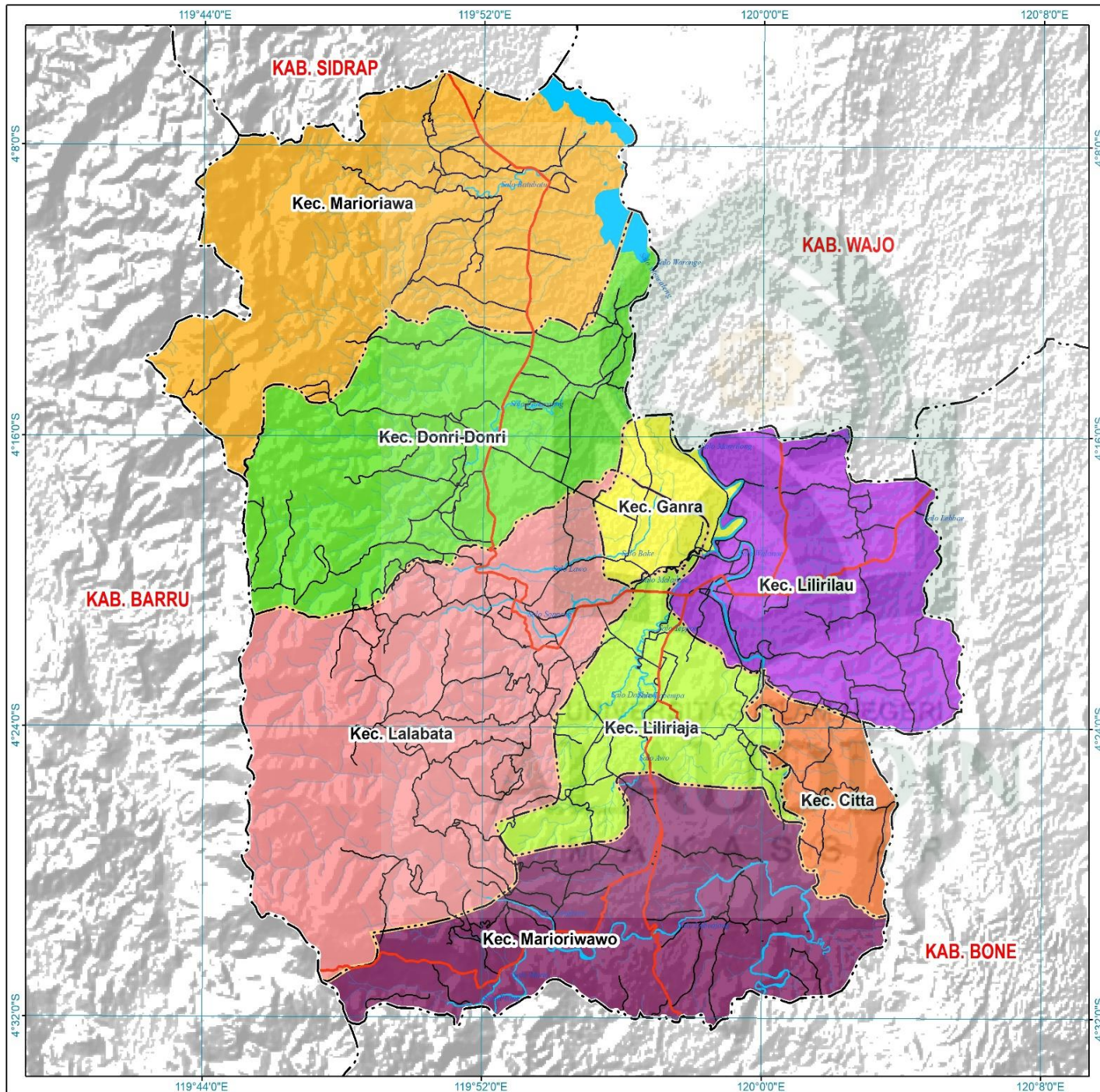
Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Marioriawa dengan luas wilayah sebesar 320 km² atau sekitar 21.3 % dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Citta dengan luas wilayah 40 km² atau 2.7 % dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng.

Secara umum seluruh kecamatan di wilayah Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat kabupaten. Jarak dari kecamatan menuju ibukota kabupaten berkisar antara 0 km hingga 35 km. Dengan jarak ibukota kabupaten sebesar 35 km, Kecamatan Citta menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Soppeng. Sedangkan Kecamatan Lalabata yang beribukota di Watansoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi ibukota kabupaten serta pusat pemerintahan dan perekonomian di Wilayah Kabupaten Soppeng.

2. Kondisi Demografi Wilayah

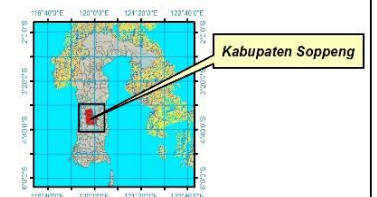
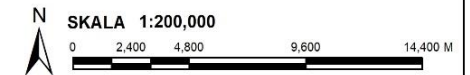
a. Penduduk dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Wilayah Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebanyak 226.305 jiwa. Hal ini menunjukkan terjadi pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 0.08 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng sekitar 151 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat diamati melalui tabel berikut.



Peta Administrasi

KABUPATEN SOPPENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984 dan 50S



TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Trans Sulawesi
- Jalan

PERHUBUNGAN

PERAIRAN

- Danau
- Sungai

KETERANGAN

- Kec. Citta
- Kec. Donri-Donri
- Kec. Ganra
- Kec. Lalabata
- Kec. Liliraja
- Kec. Lilirilau
- Kec. Marioriwawa
- Kec. Marioriwawo

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

Peta Rupa Bumi Indonesia Bakorsultanal

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmuliary, S.T., M.Si.

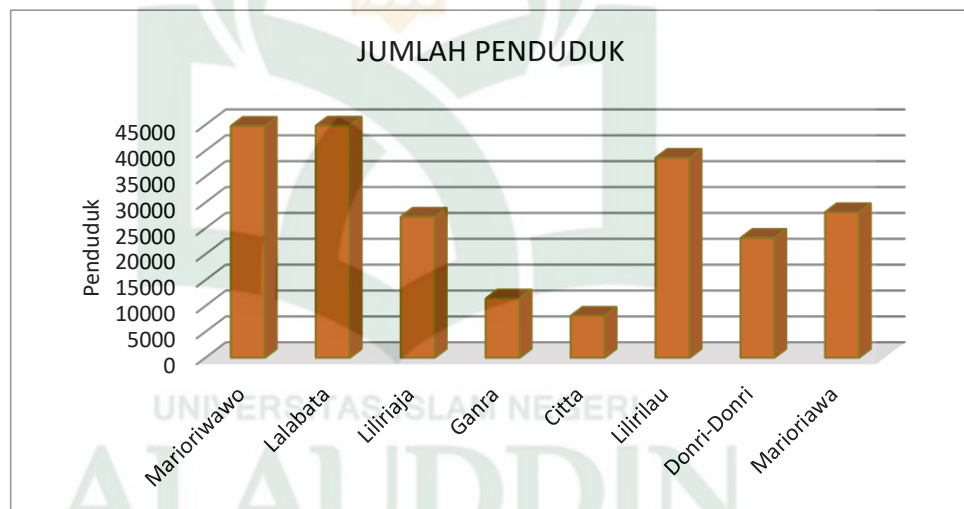
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awalayah

Tabel 27. Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Marioriwawo	300	44791	149
2	Lalabata	278	44845	161
3	Liliriaja	96	27230	284
4	Ganra	57	11441	201
5	Citta	40	8094	202
6	Lilirilau	187	38636	207
7	Donri-Donri	222	23146	104
8	Marioriawa	320	28122	88
Jumlah		1500	226305	151

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2017



Gambar 14. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng dibagi berdasarkan wilayah kecamatan

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

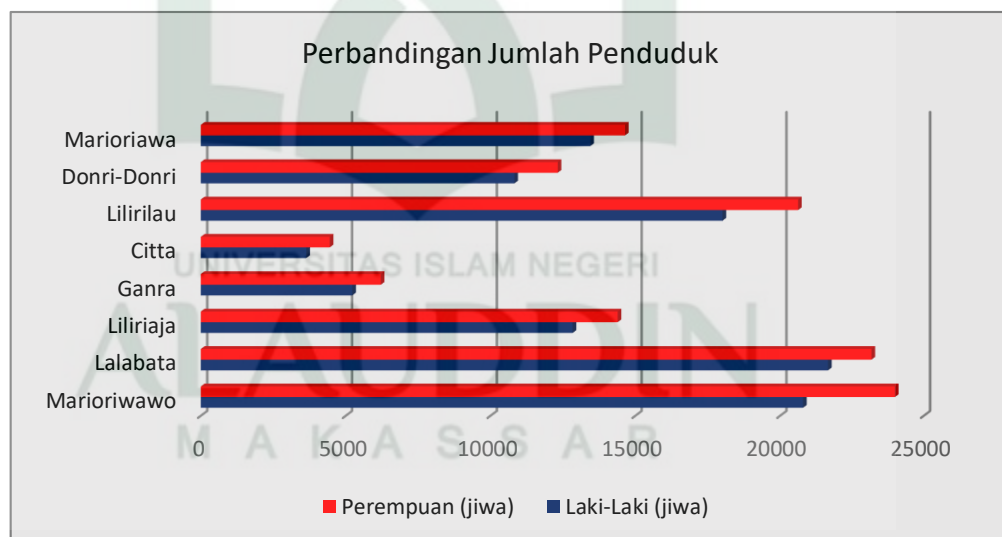
Jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan masih lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dalam angka *sex ratio* sebesar 89, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan, terdapat hanya 89 penduduk laki-laki. Berikut rincian

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang terdapat di Kabupaten Soppeng.

Tabel 28. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Marioriwawo	20797	23994	44791	87
2	Lalabata	21666	23179	44845	93
3	Liliriaja	12837	14393	27230	89
4	Ganra	5228	6213	11441	84
5	Citta	3643	4451	8094	82
6	Lilirilau	18012	20624	38636	87
7	Donri-Donri	10825	12321	23146	88
8	Marioriawa	13447	14645	28122	92
Jumlah		106485	119820	226305	89

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2017



Gambar 15. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

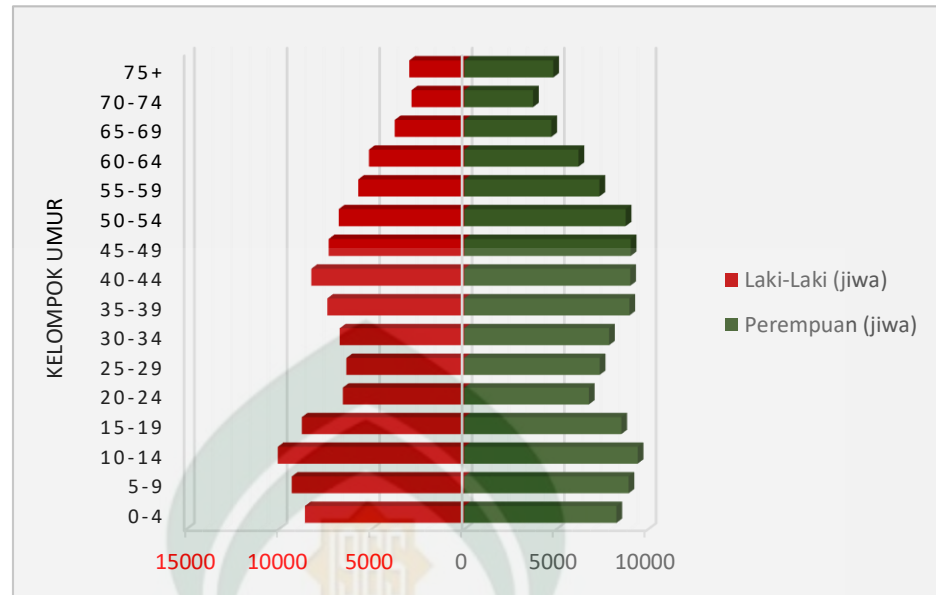
c. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Soppeng menunjukkan komposisi penduduk yang didominasi penduduk muda. Penduduk usia 10-14 tahun memiliki persentase tertinggi dalam komposisi penduduk. Sementara jumlah penduduk perempuan dari usia 20 tahun ke atas, selalu lebih banyak dibandingkan penduduk pria untuk setiap kelompok umur. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada uraian di tabel berikut.

Tabel 29. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk
0-4	8596	8271	16867
5-9	9306	8932	18238
10-14	10062	9427	19489
15-19	8762	8538	17300
20-24	6549	6769	13318
25-29	6357	7359	13716
30-34	6716	7872	14588
35-39	7389	8978	16367
40-44	8251	9025	17276
45-49	7312	9047	16359
50-54	6771	8770	15541
55-59	5719	7345	13064
60-64	5139	6208	11347
65-69	3752	4722	8474
70-74	2840	3726	6566
75+	2963	4832	7795
Jumlah	106484	119821	226305

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2017



Gambar 16. Piramida Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2016

B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Lalabata

1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah

Kecamatan Lalabata adalah salah satu Kecamatan dari 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 278 km² atau sekitar 18,53 persen dari total luas Kabupaten Soppeng . Secara astronomis wilayah Kecamatan Lalabata berada antara 4o 06' 0" – 4o 32' 0" Lintang Selatan dan antara 119o 4,2' 18" – 120o 06' 13" Bujur Timur. Secara Administrasi Wilayah Kecamatan Lalabata berbatasan langsung dengan :

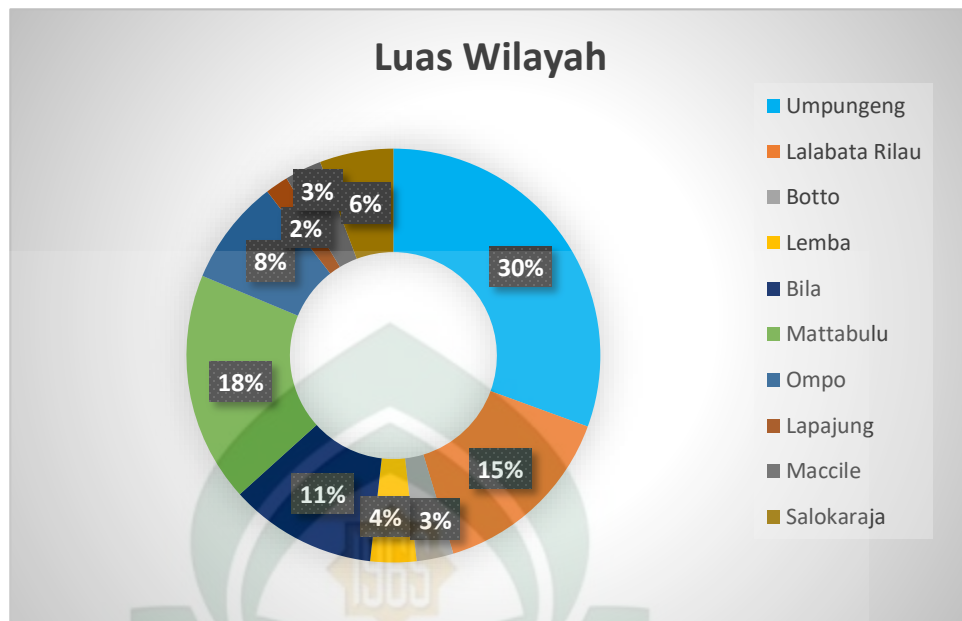
- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Ganra
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Liliriaja
- Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru
- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Marioriwawo

Kecamatan Lalabata dibagi atas 10 kecamatan yang terdiri atas 7 kelurahan dan 3 desa. Wilayah yang mempunyai luas wilayah terluas yaitu Desa Umpungeng dengan luas wilayah sekitar 85 km² atau sekitar 30,58 persen dari total luas wilayah Kecamatan Lalabata. Sedangkan wilayah yang mempunyai luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Lapajung dengan luas wilayah 5 km². Kecamatan Lalabata berada pada ketinggian antara 52-671 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Lalabata memiliki topografi yang cenderung datar. Namun begitu, ada sebanyak 2 desa yang memiliki topografi berbukit-bukit diantaranya Desa Umpungeng dan Mattabulu. Adapun rincian pembagian wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Lalabata dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 30. Luas Wilayah Desa dan Kelurahan yang Terdapat di Kecamatan Lalabata

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Umpungeng	85	30.57
2	Lalabata Rilau	41	14.75
3	Botto	8	2.88
4	Lemba	10	3.60
5	Bila	32	11.51
6	Mattabulu	50	17.98
7	Ompo	23	8.27
8	Lapajung	5	1.80
9	Maccile	8	2.88
10	Salokaraja	16	5.76

Sumber: Kecamatan Lalabata dalam Angka Tahun 2017



Gambar 17. Diagram Persentase Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalabata

Ibukota Kecamatan Lalabata adalah Kelurahan Lemba. Kelurahan terdekat dari kelurahan ini adalah Kelurahan Botto dan Kelurahan Bila yaitu sejauh 1 km, sedangkan desa terjauh adalah Desa Umpungeng sejauh 30 km. Jarak yang ditempuh desa/kelurahan di Lalabata untuk sampai ke ibukota kabupaten Soppeng, berkisar antara 0-28 km. Jarak terjauh dari ibukota Kecamatan Lalabata yaitu Desa Umpungeng sejauh 30 km, sedangkan Lalabata Rilau merupakan kelurahan tempat pusat pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Tabel 31. Jarak Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Lalabata (km)

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Umpungeng	30	28
2	Lalabata Rilau	2	0
3	Botto	1	2
4	Lemba	0	2
5	Bila	1	4

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
6	Mattabulu	12	16
7	Ompo	5	7
8	Lapajung	2	4
9	Maccile	7	5
10	Salokaraja	5	8

Sumber: Kecamatan Lalabata dalam Angka Tahun 2017

2. Kondisi Demografi Wilayah

a. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Wilayah

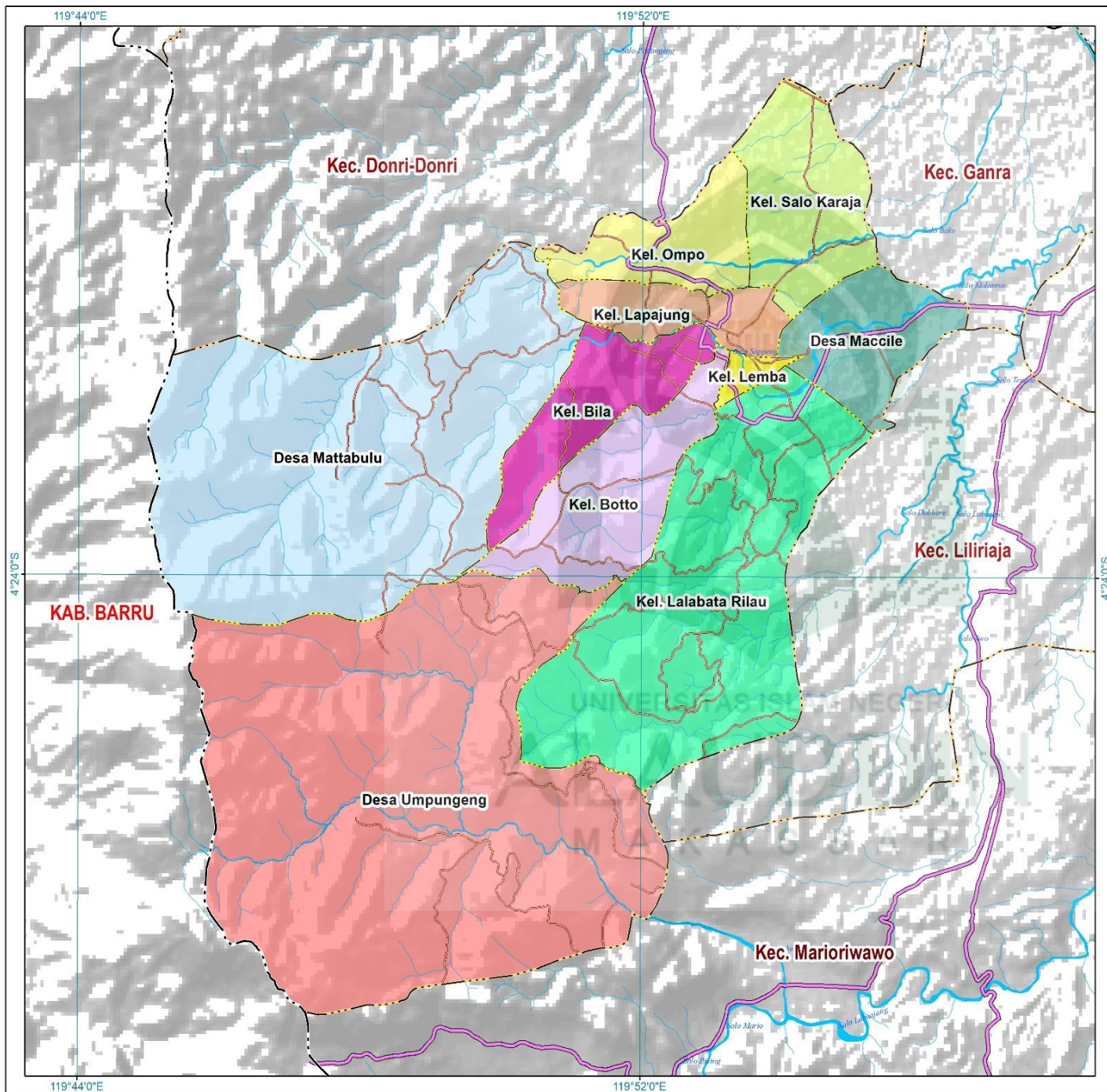
Desa/Kelurahan

Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk di Kecamatan Lalabata pada tahun 2016 sebanyak 44.845 jiwa dengan kepadatan penduduk keseluruhan sebanyak 161 jiwa/ km². Adapun rincian jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Lalabata pada tahun 2016 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 32. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Lalabata Tahun 2016

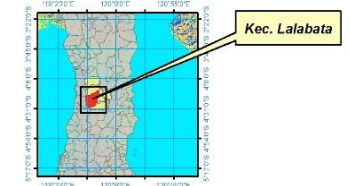
No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
1	Umpungeng	85	3061	36
2	Lalabata Rilau	41	8355	204
3	Botto	8	5090	636
4	Lemba	10	4068	407
5	Bila	32	6773	212
6	Mattabulu	50	1392	28
7	Ompo	23	2972	129
8	Lapajung	5	7089	1418
9	Maccile	8	3132	392
10	Salokaraja	16	2913	182
Jumlah		278	44845	161

Sumber: Kecamatan Lalabata dalam Angka Tahun 2017



Peta Administrasi

KECAMATAN LALABATA



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984 dan 50S



TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

PERHUBUNGAN

--- Jalan Trans Sulawesi
--- Jalan

PERAIRAN

--- Sungai

KETERANGAN

Desa Maccile
Desa Mattabulu
Desa Umpungeng
Kel. Bila
Kel. Botto
Kel. Lalabata Rilau
Kel. Lapajung
Kel. Lembu
Kel. Ompo
Kel. Salo Karaja

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

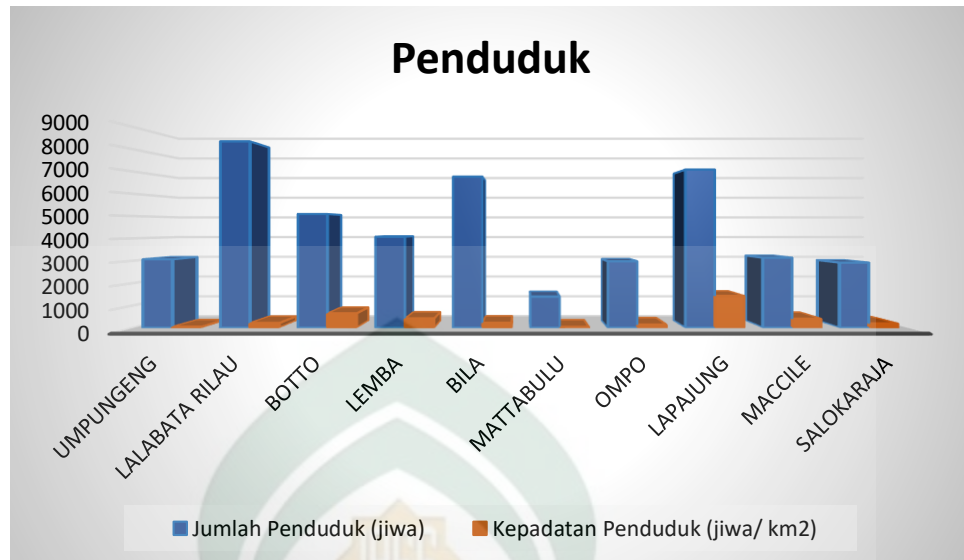
Peta Rupa Bumi Indonesia Bakorsultanal

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Gambar 19. Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Lalabata Tahun 2016

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

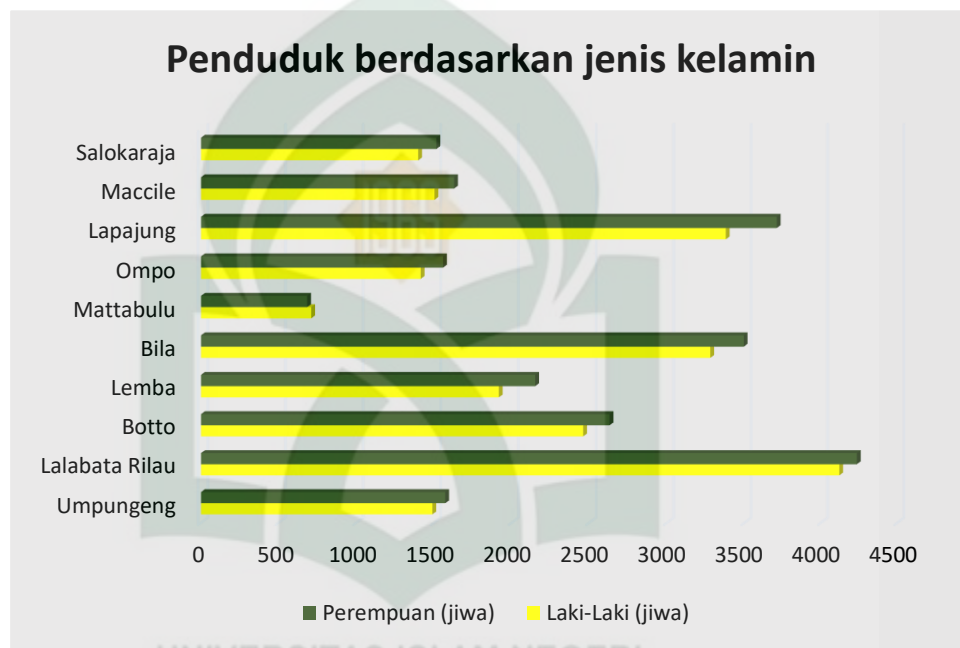
Jumlah penduduk Kecamatan Lalabata terdiri dari 21.666 jiwa penduduk laki-laki dan 23.179 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Lalabata Rilau dengan jumlah penduduk sebanyak 8.355 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Lalabata sebesar 93 laki-laki diantara 100 perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 33. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Lalabata Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Umpungeng	1489	1572	3061
2	Lalabata Rilau	4120	4235	8355
3	Botto	2460	2630	5090
4	Lemba	1917	2151	4068
5	Bila	3278	3495	6773

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
6	Mattabulu	709	683	1392
7	Ompo	1414	1558	2972
8	Lapajung	3378	3711	7089
9	Maccile	1503	1629	3132
10	Salokaraja	1398	1515	2913
Jumlah		21666	23179	44845

Sumber: Kecamatan Lalabata dalam Angka Tahun 2017



Gambar 20. Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Lalabata Tahun 2016

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

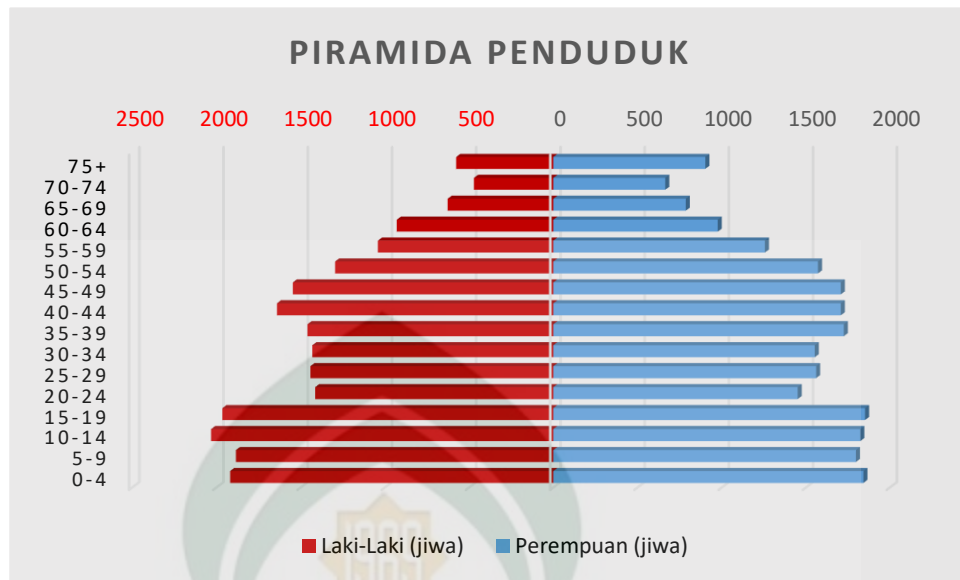
Penduduk Kecamatan Lalabata pada tahun 2016 didominasi oleh penduduk usia remaja yang berkisar antara kelompok umur 10-19 tahun. Penduduk dengan kelompok umur 70-74 tahun menempati jumlah penduduk urutan paling sedikit dibandingkan dengan penduduk kelompok umur lainnya. Kelompok umur 0-4 tahun lebih banyak dibandingkan dengan

kelompok umur 3-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode ini lebih tinggi dari pada periode sebelumnya. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur lebih jelasnya dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 34. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lalabata Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk
0-4	1918	1842	3760
5-9	1884	1798	3682
10-14	2031	1824	3855
15-19	1964	1852	3816
20-24	1413	1451	2864
25-29	1442	1561	3003
30-34	1430	1553	2983
35-39	1459	1726	3185
40-44	1640	1708	3348
45-49	1546	1708	3254
50-54	1295	1572	2867
55-59	1041	1256	2297
60-64	929	976	1905
65-69	627	786	1413
70-74	471	664	1135
75+	576	902	1478
Jumlah	21666	23179	44845

Sumber: Kecamatan Lalabata dalam Angka Tahun 2017



Gambar 21. Piramida Penduduk Kecamatan Lalabata Tahun 2016

C. Gambaran Umum Wilayah Desa Umpungeng

1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah

Desa Umpungeng merupakan salah satu desa dari 10 desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan berada pada daerah perbukitan. Secara geografis Desa Umpungeng berada antara 119°46'0" - 119°52'0" Bujur timur dan antara 4°24'0" - 4°30'0" Lintang Selatan. Secara administrasi Desa Umpungeng berbatasan langsung dengan:

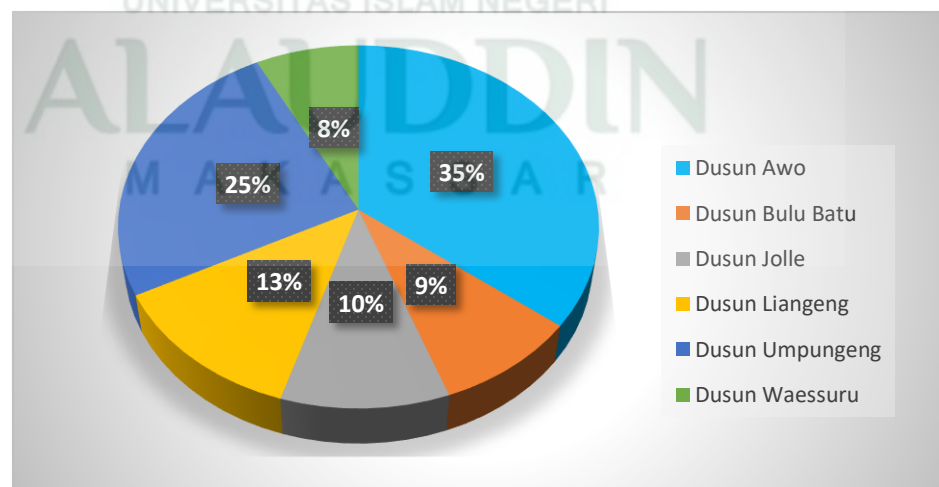
- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Mattabulu dan Kelurahan Botto
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Maririwawo dan Kecamatan Liliriaja
- Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru
- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Marioriawo

Berdasarkan data dari Bappeda bekerjasama dengan Pertanahan diketahui bahwa luas Desa Umpungeng sebesar 10.148 ha yang terbagi atas 6 dusun dengan Dusun Jolle sebagai pusat pemerintahan Desa Umpungeng. Jarak Desa Umpungeng ke ibukota Kabupaten Soppeng sekitar 24 km. Sedangkan jarak Desa Umpungeng ke ibukota Kecamatan Lalabata sekitar 25 km. Desa Umpungeng berada pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata harian sekitar 25° C. Adapun luas tiap wilayah dusun di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 35. Luas Wilayah Dusun di Desa Umpungeng

No	Dusun	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Dusun Awo	3593.2	35.41
2	Dusun Bulu Batu	911.6	8.98
3	Dusun Jolle	1055.2	10.40
4	Dusun Liangeng	1285.8	12.67
5	Dusun Umpungeng	2529.0	24.92
6	Dusun Waessuru	773.2	7.62
Total		10148.0	100

Sumber: Perhitungan calculator geometri 2018



Gambar 22. Diagram Persentase Luas Wilayah Dusun di Desa Umpungeng

Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa wilayah dusun yang mempunyai persentase luas wilayah terbesar yaitu Dusun Awo dengan persentase sebesar 35% terhadap luas wilayah Desa Umpungeng. Sedangkan wilayah yang mempunyai persentase luas wilayah terkecil yaitu Dusun Waessuru dengan persentase sebesar 7.62% terhadap luas wilayah Desa Umpungeng.

2. Kondisi Demografi Wilayah

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun

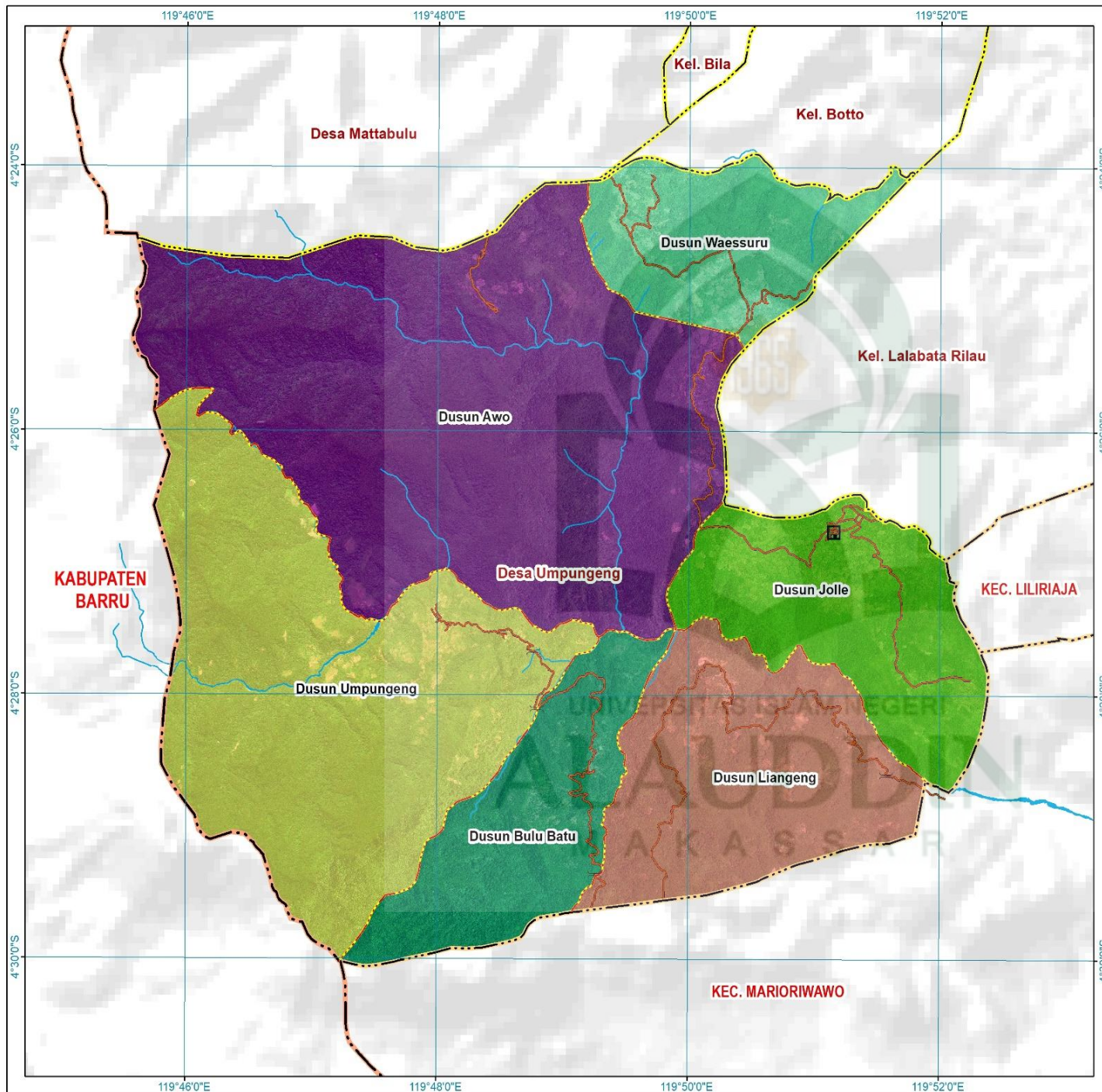
Jumlah penduduk Desa Umpungeng pada tahun 2017 sebanyak 4088 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2085 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2003 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk Desa Umpungeng tiap wilayah dusun dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 36. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun Pada Tahun 2017

No	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK
1	Jolle	1664	336
2	Awo	547	144
3	Waessuru	540	199
4	Liangeng	476	118
5	Bulu Batu	320	80
6	Umpungeng	541	105
Jumlah		4088	982

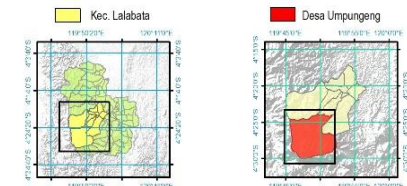
Sumber: Arsip Desa Umpungeng Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah dusun yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Dusun Jolle dengan jumlah penduduk sebanyak 1664 jiwa. Sedangkan dusun yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit adalah Dusun Bulu-Batu dengan jumlah penduduk sebanyak 320 jiwa.



Peta Administrasi

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Dusun Awo
- Dusun Bulu Batu
- Dusun Jolle
- Dusun Liangeng
- Dusun Umpungeng
- Dusun Waessuru

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah

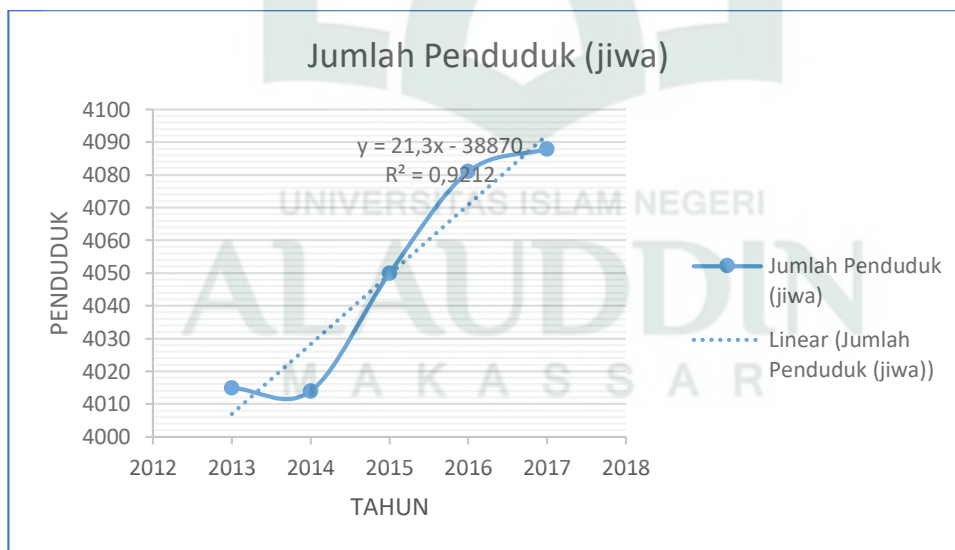
b. Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir

Perkembangan jumlah penduduk Desa Umpungeng selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup stabil tiap tahunnya mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 walaupun pada tahun 2014 mengalami pengurangan sebanyak 1 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk Desa Umpungeng selama 5 tahun terakhir dapat diamati melalui tabel berikut.

Tabel 37. Jumlah Penduduk Desa Umpungeng Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan (jiwa)	Pertumbuhan
1	2013	4015	-	-
2	2014	4014	-1	-0.02
3	2015	4050	36	0.89
4	2016	4081	31	0.76
5	2017	4088	7	0.17
Rata-Rata		4050	18.25	0.45

Sumber: Arsip Desa Umpungeng Tahun 2018



Gambar 24. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Umpungeng

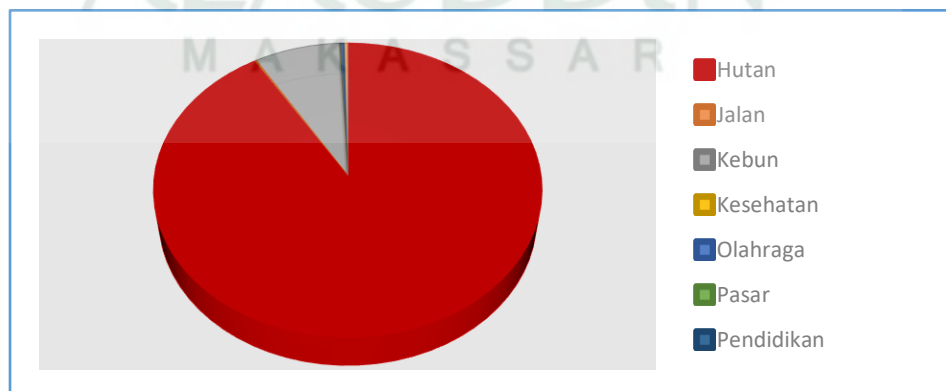
3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Umpungeng didominasi oleh hutan, perkebunan dan permukiman. Selain itu penggunaan lahan lainnya yang terdapat di Desa Umpungeng yaitu sawah, fasilitas umum, situs budaya dan tambak. Untuk lebih jelasnya, rincian penggunaan lahan di Desa Umpungeng dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 38. Penggunaan Lahan Desa Umpungeng Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan	9274.8434	91.39578
2	Jalan	11.4455	0.11279
3	Kebun	783.1920	7.71770
4	Kesehatan	0.1601	0.00158
5	Olahraga	1.4595	0.01438
6	Pasar	0.2552	0.00252
7	Pendidikan	2.2208	0.02188
8	Perdagangan dan Jasa	0.0660	0.00065
9	Peribadatan	0.5309	0.00523
10	Perkantoran	0.1175	0.00116
11	Permukiman	37.9139	0.37361
12	Sawah	5.3006	0.05223
13	Situs Budaya	0.0419	0.00041
14	Sungai	30.2833	0.29842
15	Tambak	0.1695	0.00167
Total		10148.0000	100

Sumber: Hasil Perhitungan Calculator Geometry 2018



Gambar 25. Diagram Luas Penggunaan Lahan di Desa Umpungeng Tahun 2018

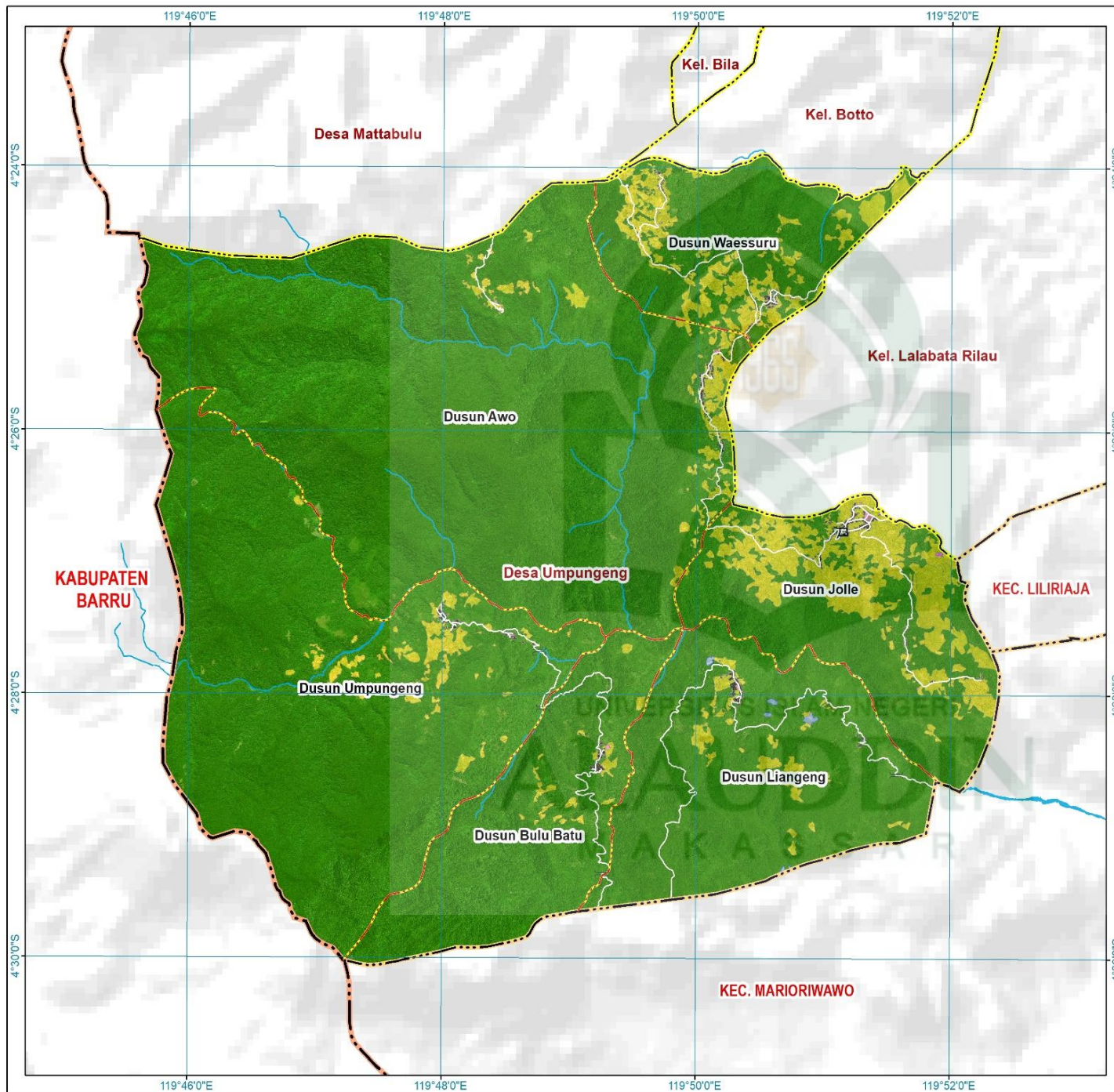
Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan yang terluas di Desa Umpungeng adalah hutan dengan persentase terhadap luas wilayah Desa Umpungeng sebesar 91.39578 % sedangkan penggunaan lahan paling kecil adalah situ budaya Umpungeng dengan persentase terhadap luas wilayah Desa Umpungeng sebesar 0.0419 %.

4. Pola Permukiman

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi persebaran permukiman di Desa Umpungeng dapat diketahui bahwa pola permukiman di Desa Umpungeng masuk dalam kategori *The Scattered Farmstead Community* yang mengindikasikan bahwa pola permukiman desa terpencar, yang umumnya mengikuti areal pertanian atau sumber penghidupan penduduk. Tipologi biasanya terdapat pada daerah pegunungan atau perbukitan seperti wilayah Desa Umpungeng. Selain itu kondisi permukiman di Desa Umpungeng merupakan tipe desa yang sebagian besar penduduknya tinggal bersama di suatu daerah di daerah pertanian di sekitarnya dan sebagian kecil penduduk tersebar di luar permukiman utama yang telah padat membentuk kelompok-kelompok kecil yang tersebar. Asumsi untuk setiap unit rumah dihuni oleh 5 jiwa penduduk sehingga asumsi jumlah rumah sebanyak 817 unit berdasarkan penduduk berjumlah 4.088 jiwa. Sedangkan jumlah unit rumah yang terdapat di Desa Umpungeng sebanyak 853 unit sehingga telah melewati standar jumlah rumah.

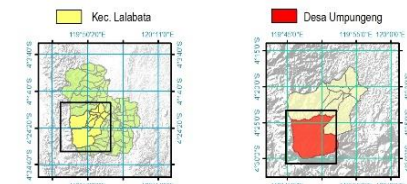


Gambar 26. Permukiman di Desa Umpungeng



Peta Penggunaan Lahan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Kesehatan
- Permukiman
- Pasar
- Pendidikan
- Perdagangan dan Jasa
- Peribadatan
- Perkantoran
- Hutan
- Kebun
- Olahraga
- Sawah
- Situs Budaya
- Sungai
- Tambak
- Jalan

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

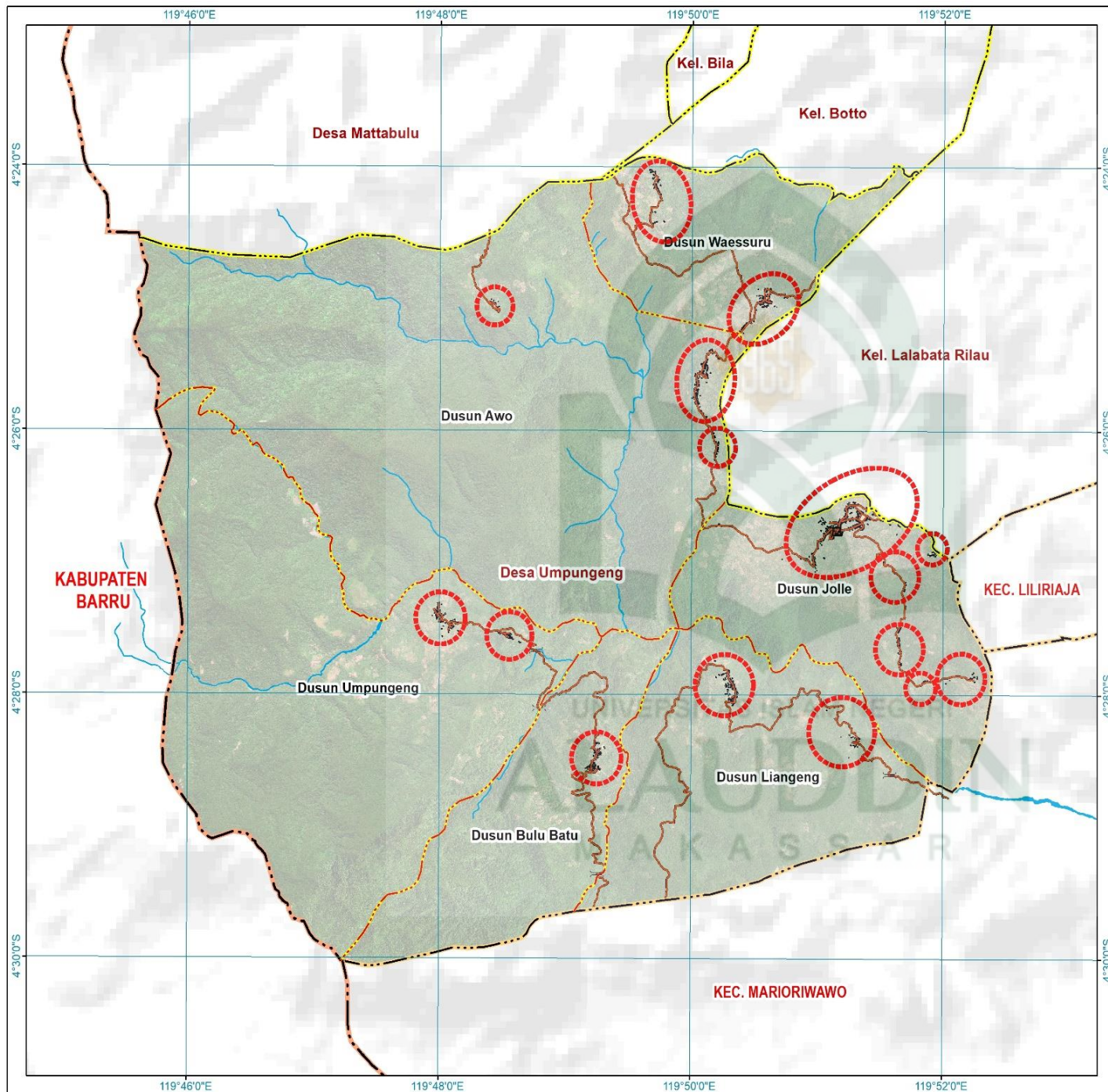
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

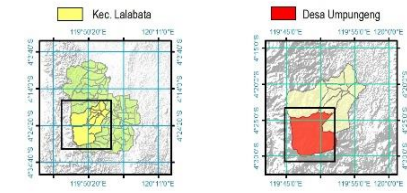
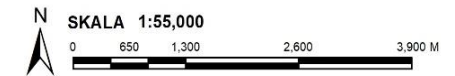
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Orientasi Pola Permukiman

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Bangunan
- Orientasi Permukiman

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awalayah

5. Potensi Wilayah

Desa umpungeng yang merupakan wilayah yang berada pada wilayah perbukitan mempunyai tipologi sebagai daerah pertanian sehingga potensi desa meliputi potensi pertanian dan potensi wisata alam dan budaya. Pertanian di Desa Umpungeng didominasi perkebunan Cengkeh. Selain itu Desa Umpungeng merupakan daerah penghasil pangi (keluak), gula aren, buah dan sayur. Potensi agrowisata di Desa Umpungeng tepatnya berada di Dusun Awo dengan luas sekitar 1 ha. Potensi wisata alam yaitu terdapat 2 lokasi Air terjun yang terdapat di Dusun Bulu Batu dan Dusun Umpungeng. Selanjutnya adalah potensi wisata budaya yaitu situs budaya Umpungeng yang berupa deretan batu-batu yang membentuk lingkaran peninggalan Arung Umpungeng tempat pelantikan para raja-raja terdahulu dan melakukan pertemuan. Lokasi tersebut juga dikenal masyarakat saat ini sebagai center point of Indonesia atau titik nol Negara Indonesia pada titik koordinat. Salah satu contoh bentuk keistimewaan Situ Budaya Umpungeng yaitu diadakannya pelantikan SKPD Kabupaten Soppeng oleh Bupati Soppeng pada tahun 2016 lalu. Di Umpungeng juga terdapat tradisi maccera tana dan mallangi arajang (memberikan persembahan pada tanah dan penyucian benda pusaka) yang diadakan setiap tahunnya selama beberapa hari.



Gambar 29. Potensi Desa Umpungeng

D. Ketersediaan Infrastruktur

1. Fasilitas

a. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas perkantoran di Desa Umpungeng terdiri atas kantor desa, kantor BPD dan kantor PKK. Semua fasilitas tersebut berada di Dusun Jolle yang merupakan ibukota Desa Umpungeng. Kondisi bangunan perkantoran di Desa Umpungeng mempunyai kondisi yang cukup baik dengan jenis bangunan permanen yang dilengkapi dengan pagar pelindung.



Gambar 30. Fasilitas Perkantoran di Dusun Jolle


b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Umpungeng tersebar hampir di seluruh wilayah dusun. Jenis fasilitas pendidikan di Desa Umpungeng terdiri atas Kelompok Bermain (KB), TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Fasilitas pendidikan yang paling banyak terdapat di Desa Umpungeng adalah PAUD berjumlah 2 unit TK, 4 unit KB dan 1 unit RA Sedangkan fasilitas pendidikan yang paling sedikit adalah 1 unit SMP dan 1 unit Mts. Adapun rincian fasilitas pendidikan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 39. Fasilitas Pendidikan di Desa Umpungeng

No		Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
KB/TK/RA (7 Unit)				
1		TK Negeri Latimummung Jolle	Dusun Jolle	
2		Pos PAUD Masamba	Dusun Jolle	
3		KB Bahagia	Dusun Jolle	
4		KB Anggrek Pangempangnge	Dusun Awo	
5		KB Abbanuang	Dusun Bulu Batu	
6		TK Lalengbata	Dusun Umpungeng	
7		RA Darul Ilmi	Dusun Liangeng	

No		Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
SD/MI (6 Unit)				
1		SDN 15 Jolle	Dusun Jolle	
2		SDN 14 Pangempangge	Dusun Awo	
3		SDN 16 Liangeng	Dusun Liangeng	
4		SDN 11 Umpungeng	Dusun Umpungeng	
5		SDN 11 Umpungeng (Sekolah Jarak Jauh Kelas 1-3)	Dusun Bulu Batu	
6		MI Paonge	Dusun Jolle	
SMP/MTs (2 Unit)				
1		SMPN 4 Lalabata	Dusun Jolle	


No		Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
2		MTs DDI Jolle	Dusun Jolle	

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018

c. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan yang terdapat di Desa Umpungeng terdiri atas 1 unit pustu, 3 unit poskesdes dan 3 unit posyandu. Tenaga kesehatan di Desa Umpungeng terdiri atas 1 mantri dan 3 bidan (Dusun Jolle-Awo-Waessuru, Dusun Bulu Batu dan Dusun Liangeng). Adapun rincian jumlah fasilitas kesehatan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 40. Fasilitas Kesehatan di Desa Umpungeng

No	Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
1	Pustu Jolle	Dusun Jolle	
Jumlah		1 unit pustu	
2	Posyandu Masamba	Dusun Jolle	
3	Posyandu Mawar	Dusun Liangeng	


No	Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
4	Posyandu Bulupa Renreng	Dusun Awo	
Jumlah		3 unit posyandu	
5	Poskesdes Dusun Awo	Dusun Awo	
6	Poskesdes Bulu Batu	Dusun Bulu Batu	
7	Poskesdes Liangeng	Dusun Liangeng	
Jumlah		3 unit poskesdes	







Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa yang terdapat di Desa Umpungeng yaitu pasar, koperasi, kios, warung, toko/ruko, bengkel, penjahit dan pertamini. Adapun rincian fasilitas perdagangan dan jasa dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 41. Tabel Fasilitas Perdagangan dan Jasa

No	Nama Fasilitas	Unit	Lokasi	Dokumentasi
1	Pasar	1	Dusun Jolle	

No	Nama Fasilitas	Unit	Lokasi	Dokumentasi
Jumlah		1 unit pasar		
2	Warung/Kios	21	Dusun Jolle	
		3	Dusun Awo	
		9	Dusun Waessuru	
		3	Dusun Bulu Batu	
		3	Dusun Umpungeng	
		3	Dusun Liangeng	
Jumlah		43 unit warung/kios		
3	Warung Kopi	1	Dusun Jolle	
Jumlah		1 unit warung kopi		
4	Toko/Ruko	3	Dusun Jolle	

No	Nama Fasilitas	Unit	Lokasi	Dokumentasi
Jumlah		3 unit toko/ruko		
5	Koperasi	1	Dusun Jolle	
6	Bengkel	2	Dusun Jolle	
		1	Dusun Waessuru	
		1	Dusun Liangeng	
Jumlah		4 unit bengkel		
7	Penjahit	2	Dusun Jolle	
Jumlah		2 unit penjahit		
8	SPBU Mini	1	Dusun Jolle	
Jumlah		1 unit SPBU mini		

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018

e. Fasilitas Olahraga

Fasilitas Olahraga yang terdapat di Desa Umpungeng yaitu lapangan meliputi 2 unit lapangan sepak bola dan 2 unit lapangan volly. Adapun rincian fasilitas olahraga di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 42. Fasilitas Olahraga di Desa Umpungeng

No	Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
1	Lapangan sepak bola A. Makkasau Jolle	Dusun Jolle	
2	Lapangan sepak bola Tapparenge	Dusun Waessuru	
Jumlah		2 Unit Lapangan sepak bola	
3	Lapangan Volly Bulu Batu	Dusun Bulu Batu	
4	Lapangan Volly Umpungeng	Dusun Umpungeng	
Jumlah		2 Unit lapangan volly	

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018

f. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Desa Umpungeng adalah 11 unit mesjid sebab mayoritas penduduk Desa Umpungeng beragama Islam. Fasilitas peribadatan yang ada di Desa Umpungeng tersebar di seluruh wilayah dusun sehingga mudah untuk dijangkau oleh warga desa. Adapun rincian persebaran mesjid di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 43. Fasilitas Peribadatan di Desa Umpungeng

No	Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
1	Mesjid Jami Raodhatul Jannah	Dusun Jolle	
2	Mesjid Jannatul Falah Lannike	Dusun Jolle	
3	Mesjid Paonge	Dusun Jolle	
4	Mesjid Miftahul Khair	Dusun Awo	
5	Mesjid Campui	Dusun Awo	-
6	Mesjid Nurul Hidayah	Dusun Waessuru	
7	Mesjid Coppoliang	Dusun Waessuru	-
8	Mesjid Nurul Ijtihad	Dusun Bulu Batu	

No	Nama Fasilitas	Lokasi	Dokumentasi
9	Mesjid Al-Amin Umpungeng Baru	Dusun Umpungeng	
10	Mesjid Nurul Hidayah Umpungeng Lama	Dusun Umpungeng	
11	Mesjid Assasut Taqwa	Dusun Liangeng	
Jumlah		11 unit mesjid	

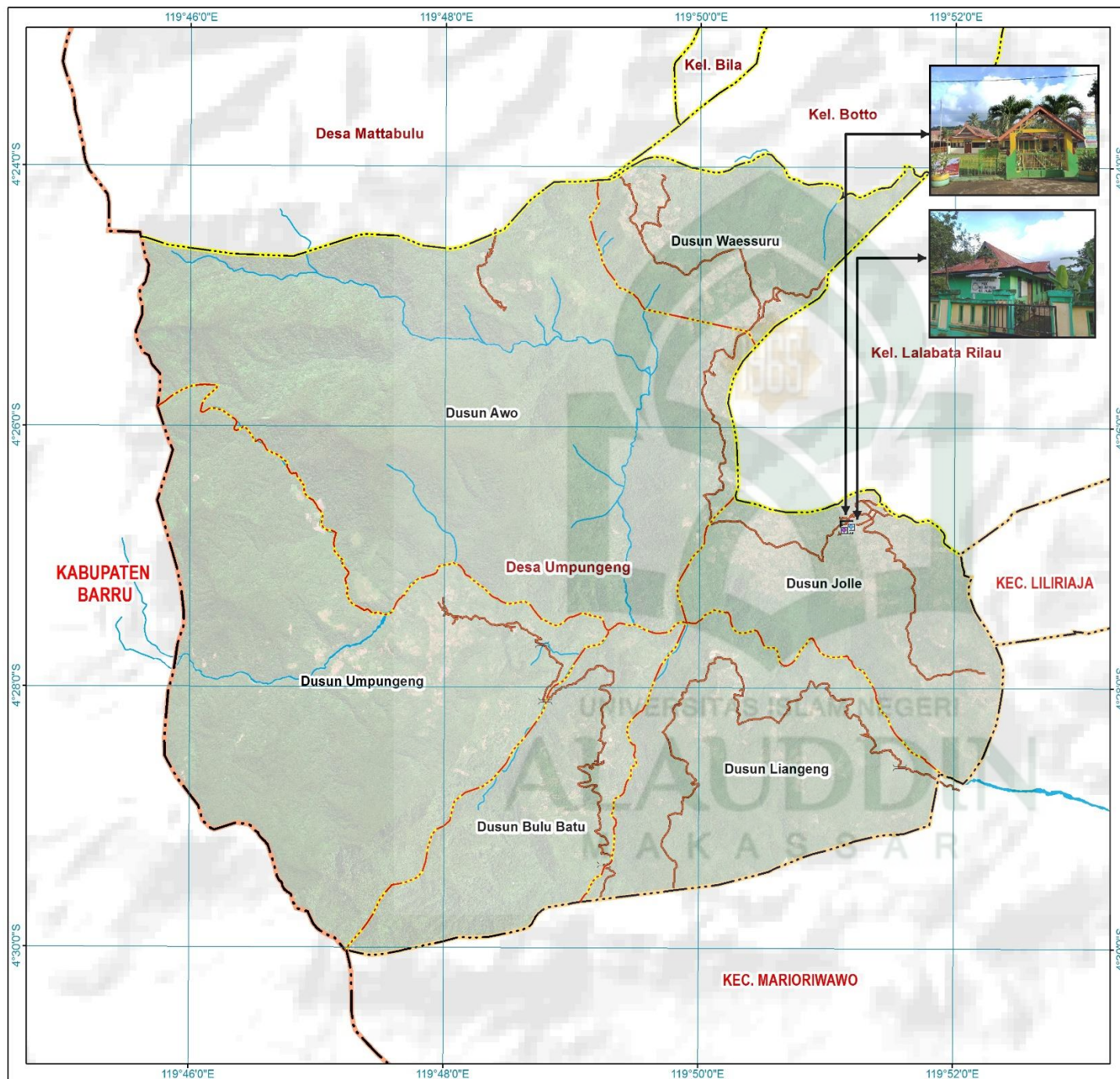
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018

Berdasarkan hasil survey lapangan dapat diketahui bahwa semua fasilitas mesjid yang terdapat di Desa Umpungeng menjangkau semua permukiman warga tiap dusunnya karena letaknya berada di tengah permukiman warga.

2. Utilitas

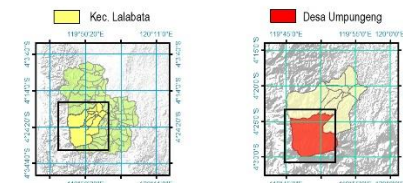
a. Jaringan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan di Desa Umpungeng terdiri atas jalan dengan jenis permukaan aspal, beton, perkerasan dan jalan tanah. Jalan aspal hanya terdapat di Dusun Jolle sedangkan pada dusun yang lain hanya terdapat jalan beton, perkerasan dan jalan tanah. Lebar jalan utama desa yaitu 3 meter. Jembatan yang terdapat di Desa Umpungeng sebanyak 4 unit dengan material kayu dan bambu dengan kondisi semua jembatan buruk dan perlu



Peta Fasilitas Perkantoran

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum Horizontal : WGS 1984



TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI



Kantor Desa



Batas Desa



Batas Dusun



Batas Kecamatan



Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN



Jalan Lokal



Jembatan

PERAIRAN



Sungai

KETERANGAN



Kantor BPD



Kantor Desa



Kantor PKK

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

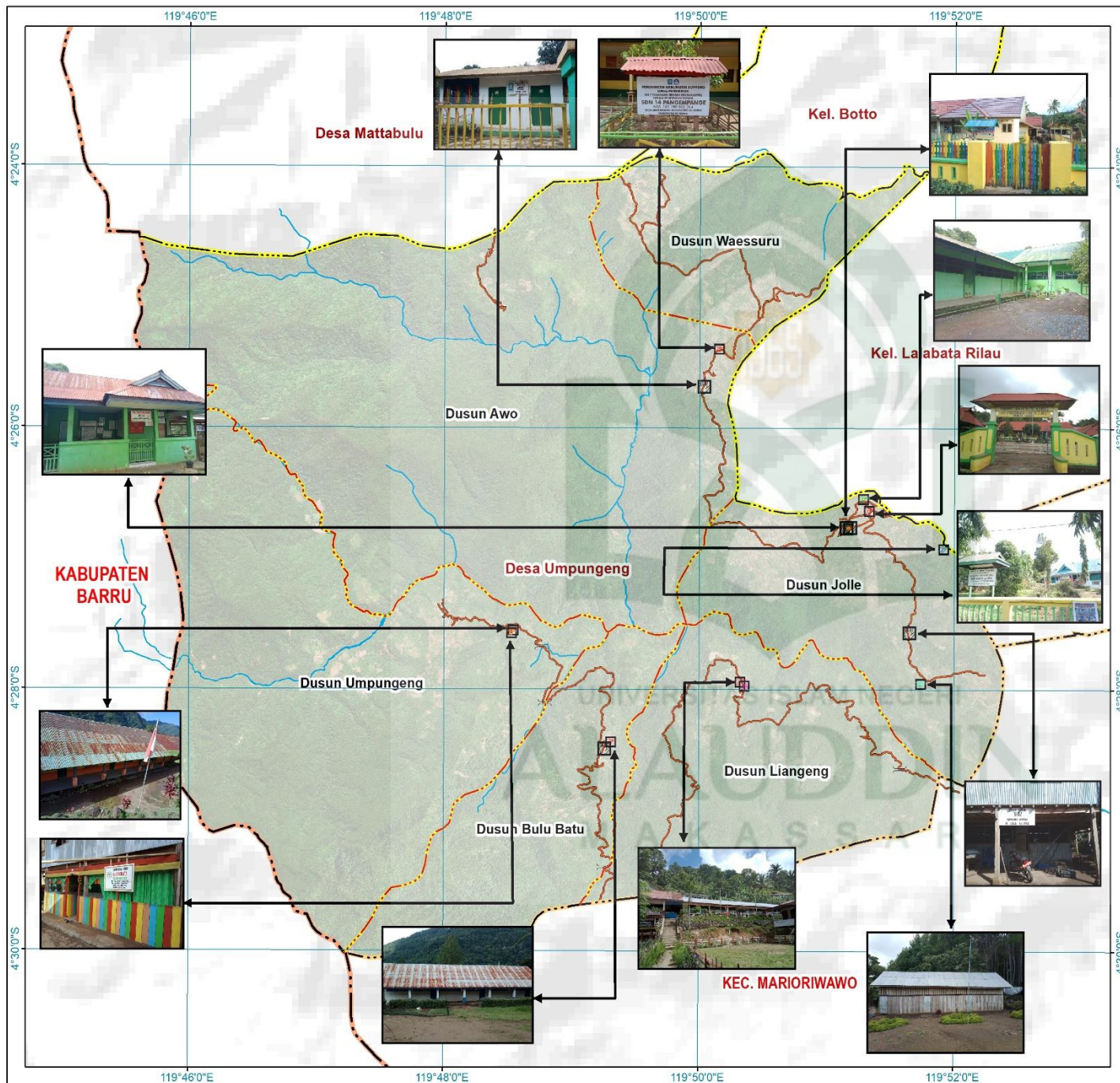
Survey Lapangan Tahun 2018
 Citra Satelit Tahun 2018
 Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
 Andi Asmulyan, S.T., M.Si.

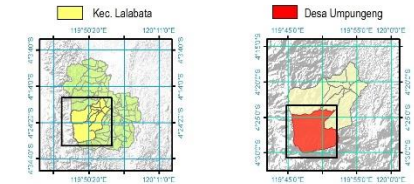
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Fasilitas Pendidikan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- TK
- KB
- RA
- SD
- MI
- SMP
- MTs

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

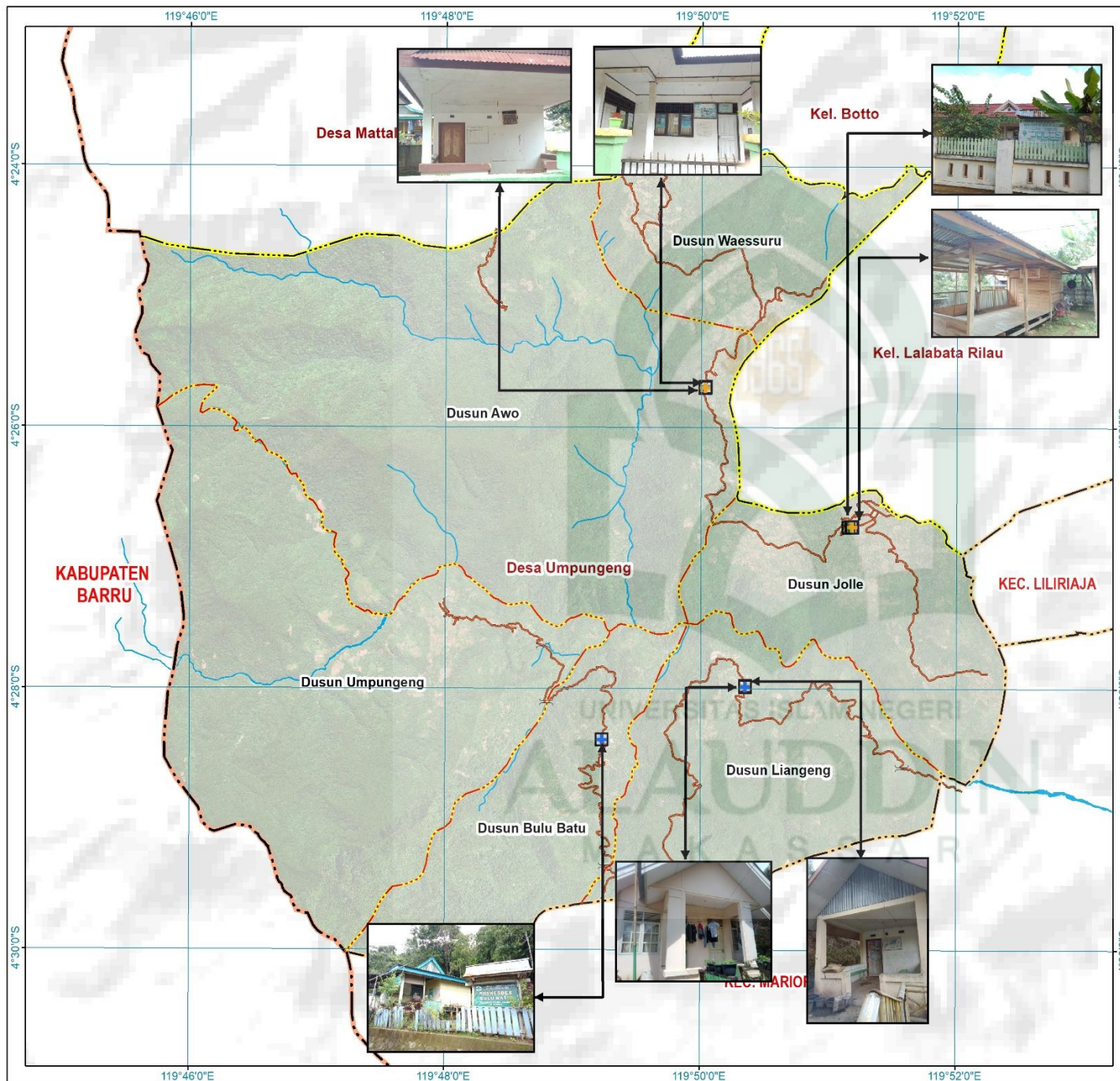
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

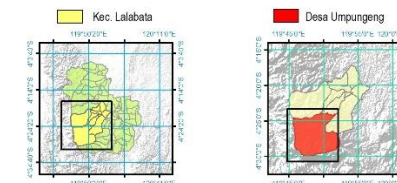
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Fasilitas Kesehatan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Pustu
- Poskesdes
- Posyandu

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

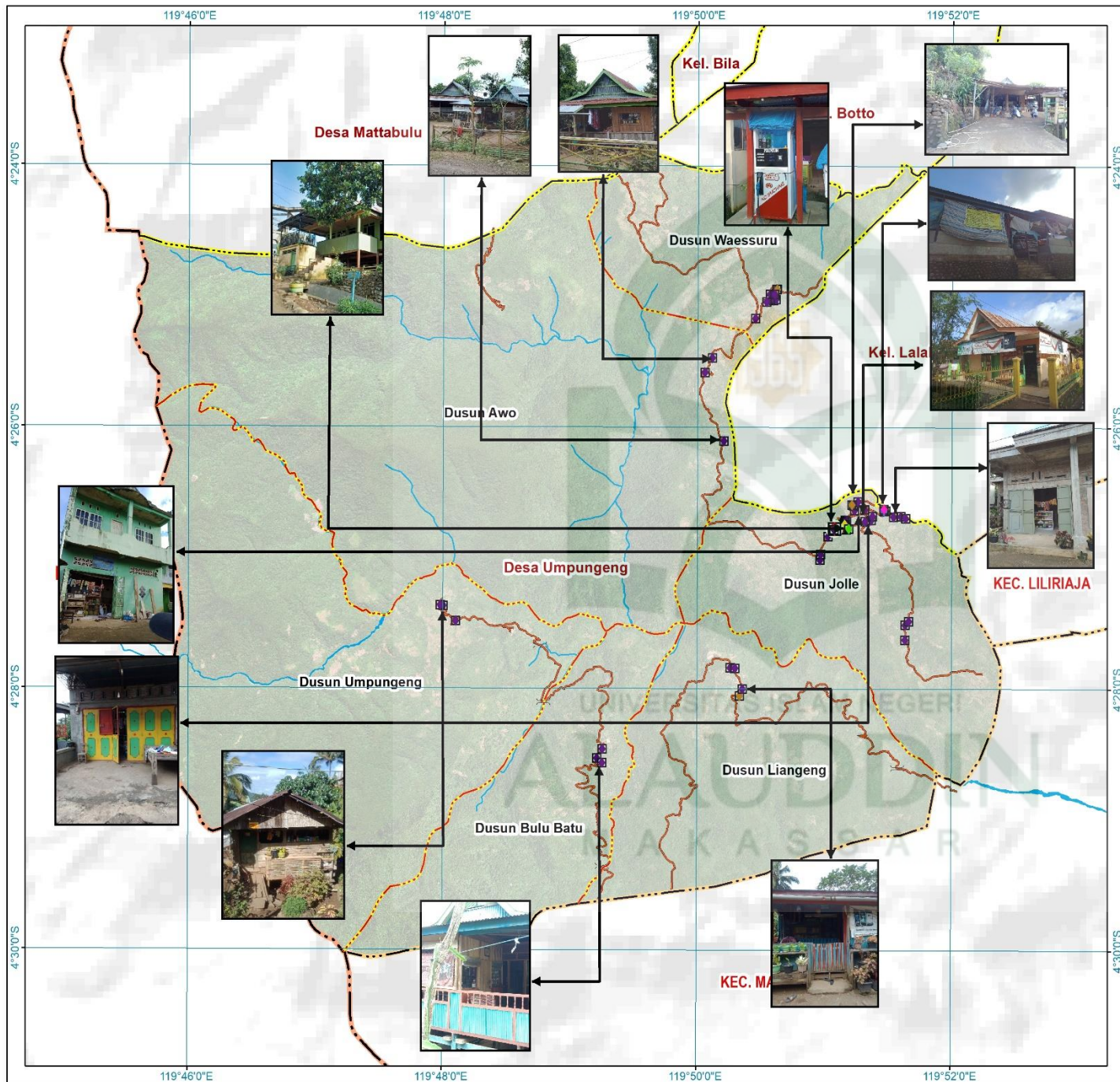
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.
Andi Asmulyan, S.T., M.Si.

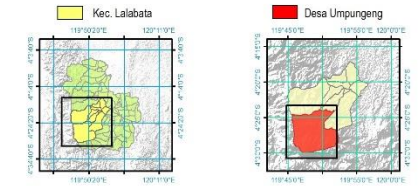
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Fasilitas Perdagangan dan Jasa

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai line

KETERANGAN

- Bengkel
- Koperasi
- Pasar
- Penjahit
- Ruko/Toko
- SPBU Mini
- Warung Kopi
- Warung/Kios

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

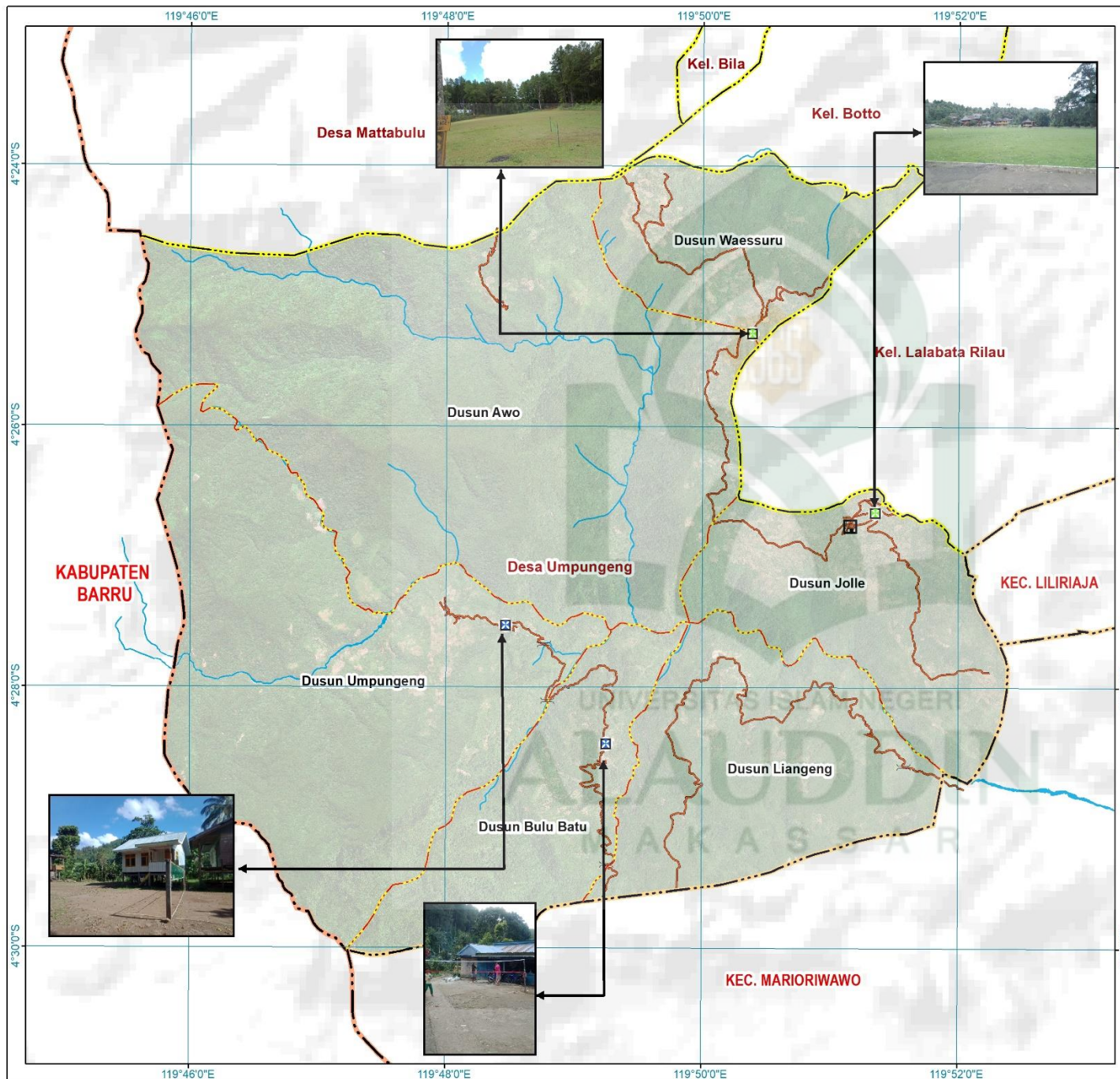
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyany, S.T., M.Si.

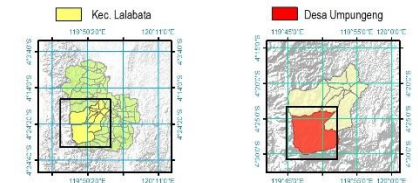
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliah



Peta Fasilitas Olahraga

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Lapangan Sepak Bola
- Lapangan Volly

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

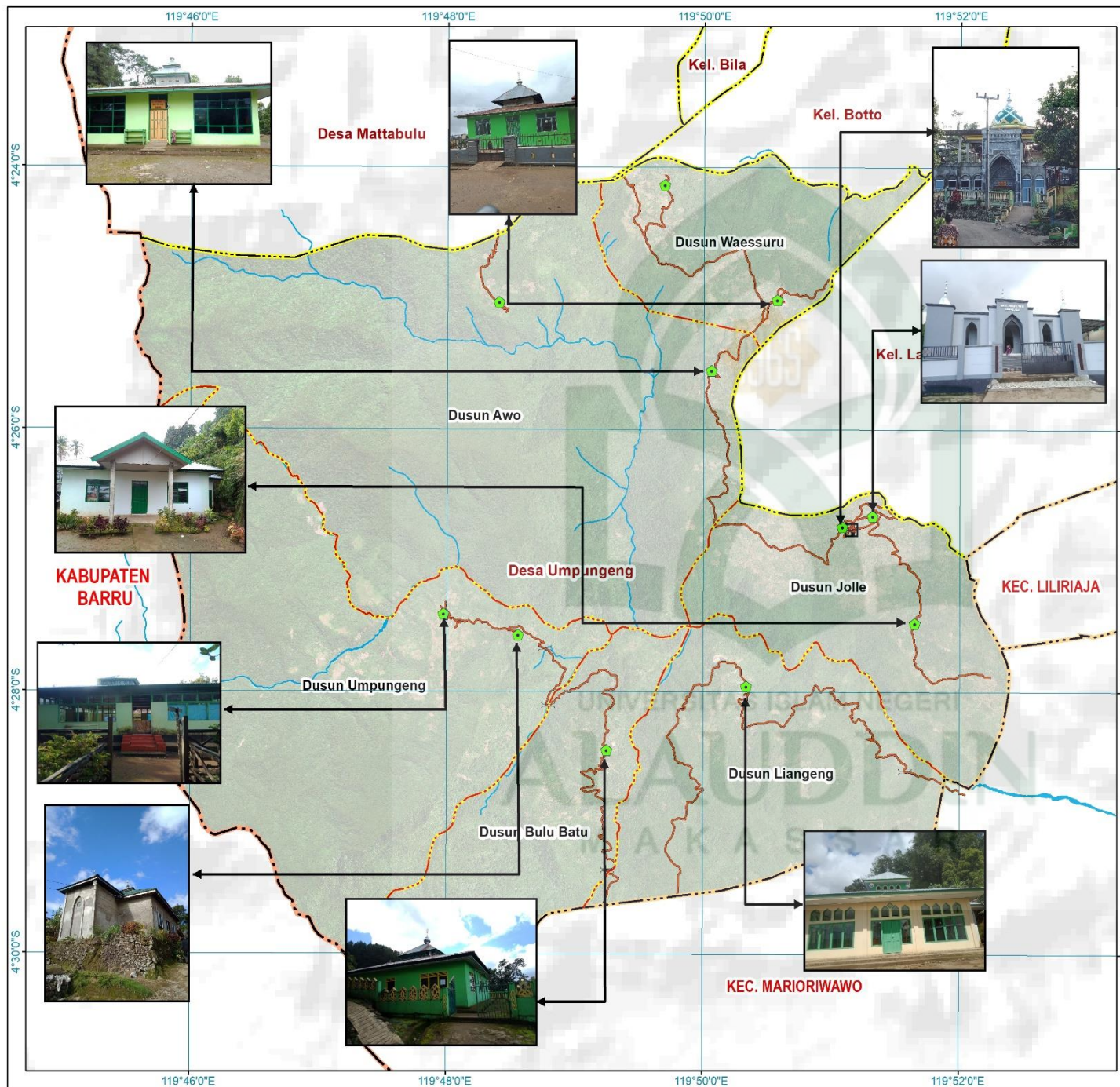
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

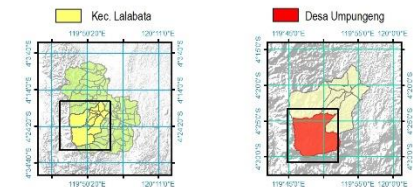
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awalayah



Peta Fasilitas Peribadatan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA KETERANGAN

ADMINISTRASI

Kantor Desa

Batas Desa

Batas Dusun

Batas Kecamatan

Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

Jalan Lokal

Jembatan

PERAIRAN

Sungai

Keterangan

Mesjid

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

Survey Lapangan Tahun 2018

Citra Satelit Tahun 2018

Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.

Andi Asmulyani, S.T., M.Si.









DIGAMBAR OLEH :








Yavah Awalayah

perbaikan. Adapun rincian jaringan jalan dan jembatan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 44. Jaringan Jalan dan Jembatan di Desa Umpungeng










No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
1	Jl. H. Husain	3	2698.18	Aspal	Baik	
2	Jl. Mesjid Jami Jolle	3	120.10	Aspal	Baik	
3	Jl. Panre Lainta	3	646.02	Aspal	Baik	
4	Jl. Lappa Lanniki	3	491.99	Beton	Baik	
5	Jl. Lappapanasa	4	60.1	Beton	Baik	
6	Jl. Lappapanasa	3	280.6	Beton	Baik	
7	Jl. Lappapanasa	3	49.1	Beton	Baik	
8	Jl. Lappapanasa 2	3	136.95	Beton	Baik	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
9	Jl. Sekolah 1	3	345.40	Beton	Baik	
10	Jl. Sekolah 2	3	104.90	Beton	Baik	
11	Jl. Paonge	2.5	872	Tanah	Buruk	
12	Jl. Paonge	2.5	89.86	Perkerasan	Buruk	
13	Jl. Paonge	2.5	265.06	Beton	Baik	
14	Jl. Paonge	2.5	89.08	Perkerasan	Baik	
15	Jl. Paonge	2.5	336.51	Aspal	Rusak Ringan	
16	Jl. Paonge	2.5	119.20	Beton	Baik	
17	Jl. Paonge	2.5	1613.73	Aspal	Rusak Sedang	
18	Jl. Paonge	2.5	137.32	Tanah	Buruk	
19	Jl. Paonge	2.5	206.89	Aspal	Baik	


No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
20	Jl. Paonge	2.5	397.56	Beton	Baik	
21	Jl. Pekuburan Lajoa		405.2	Aspal	Rusak Berat	
22	Jl. Pekuburan Lajoa		316.8	Aspal	Baik	
23	Jl. Pekuburan Lajoa		296.6	Beton	Baik	
24	Jl. Pekuburan Lajoa		284.4	Pengerasan	Buruk	
25	Jl. Lapangan		557.1	Beton	Baik	
26	Jl. Tani	1	156.2	Beton	Baik	
27	Jl. Pasar	2.5	134.2	Beton	Baik	-
28	Jl. Poros Coppoliang	3	3300.6	Tanah	Buruk	-
29	Jl. Poros Coppoliang	3	295.6	Tanah	Buruk	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
30	Jl. Poros Coppoliang	3	672.8	Beton	Baik	
31	Jl. Poros Coppoliang	3	630.2	Beton	Baik	
32	Jl. Poros Mattabulu	2.5	1140	Tanah	Buruk	
33	Jl. Poros Pangempangnge	3	608.6	Beton	Baik	
34	Jl. Poros Pangempangnge	4	1770	Pengerasan	Buruk	
35	Jl. Poros Pangempangnge	3	791.3	Pengerasan	Buruk	
36	Jl. Poros Pangempangnge	3	331.6	Beton	Baik	
37	Jl. Poros Pangempangnge	3	90.4	Beton	Baik	
38	Jl. Poros Pangempangnge	4	1080	Pengerasan	Buruk	
39	Jl. Setapak Awo	2	59.05	Tanah	Buruk	
40	Jl. Setapak Awo	2.5	60.2	Beton	Baik	
41	Jl. Setapak Awo 2	2	58.2	Tanah	Buruk	
42	Jl. Waessuru 1	2.5	321.3	Beton	Baik	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
43	Jl. Waessuru 1	4	182	Beton	Baik	
44	Jl. Waessuru 2	3	484.5	Beton	Baik	
45	Jl. Campui	2.5	1790	Tanah	Buruk	-
46	Jl. Palakka	2.5	863.4	Tanah	Buruk	-
47	Jl. Poros Liangeng	2	1978.1	Tanah	Buruk	
48	Jl. Poros Liangeng	1	1980	Tanah	Buruk	
49	Jl. Poros Liangeng	0.8	1010	Beton	Baik	
50	Jl. Poros Liangeng	1	379.3	Tanah	Buruk	
51	Jl. Poros Liangeng	1	468.7	Tanah	Buruk	
52	Jl. Poros Liangeng	1	219.5	Tanah	Buruk	
53	Jl. Poros Liangeng	0.8	873.6	Beton	Baik	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
54	Jl. Poros Liangeng	0.8	549.6	Beton	Baik	
55	Jl. Poros Liangeng	1	330.9	Tanah	Buruk	
56	Jl. Poros Liangeng	0.8	54.6	Beton	Baik	
57	Jl. Liangeng	2.5	541.6	Tanah	Buruk	
58	Jl. Wae Pute-Liangeng	2.5	5087.9	Tanah	Buruk	-
59	Jl. Bulu Batu	3	174.6	Beton	Baik	
60	Jl. Bulu Batu	0.8	158.9	Beton	Baik	
61	Jl. Bulu Batu	0.8	59.3	Beton	Baik	
62	Jl. Bulu Batu	2.5	55.4	Beton	Baik	
63	Jl. Bulu Batu	3	161.3	Beton	Baik	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
64	Jl. Bulu Batu	3	35	Beton	Rusak	
65	Jl. Bulu Batu	3	92.6	Beton	Rusak	
66	Jl. Bulu Batu	3	67.2	Beton	Baik	
67	Jl. Poros Bulu Batu	2.5	2393	Tanah	Buruk	
68	Jl. Poros Bulu Batu	2.5	675.8	Pengerasan	Buruk	
69	Jl. Poros Bulu Batu	2.5	554.1	Beton	Baik	
70	Jl. Poros Umpungeng	1	3900	Tanah	Buruk	
71	Jl. Poros Umpungeng	3	639.2	Tanah	Buruk	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
72	Jl. Umpungeng	2	254.9	Beton	Baik	
73	Jl. Umpungeng	2	201.9	Tanah	Buruk	
74	Jl. Umpungeng	2	61.1	Tanah	Buruk	
75	Jl. Umpungeng	2	266.9	Tanah	Buruk	
76	Jl. Umpungeng	3	580	Beton	Baik	
77	Jl. Umpungeng	3	461.2	Beton	Baik	
78	Jl. Umpungeng	3	168.9	Tanah	Buruk	
Jembatan						
1	Jembatan Liangeng	-	-	Kayu/bambu	Buruk	
2	Jembatan Bulu Batu	-	-	Kayu/bambu	Buruk	

No	Nama Jalan	Lebar (m)	Panjang (m)	Jenis Permukaan	Kondisi	Dokumentasi
3	Jembatan Umpungeng	-	-	Kayu/bambu	Rusak	
4	Jembatan Umpungeng	-	-	Kayu/bambu	Rusak	

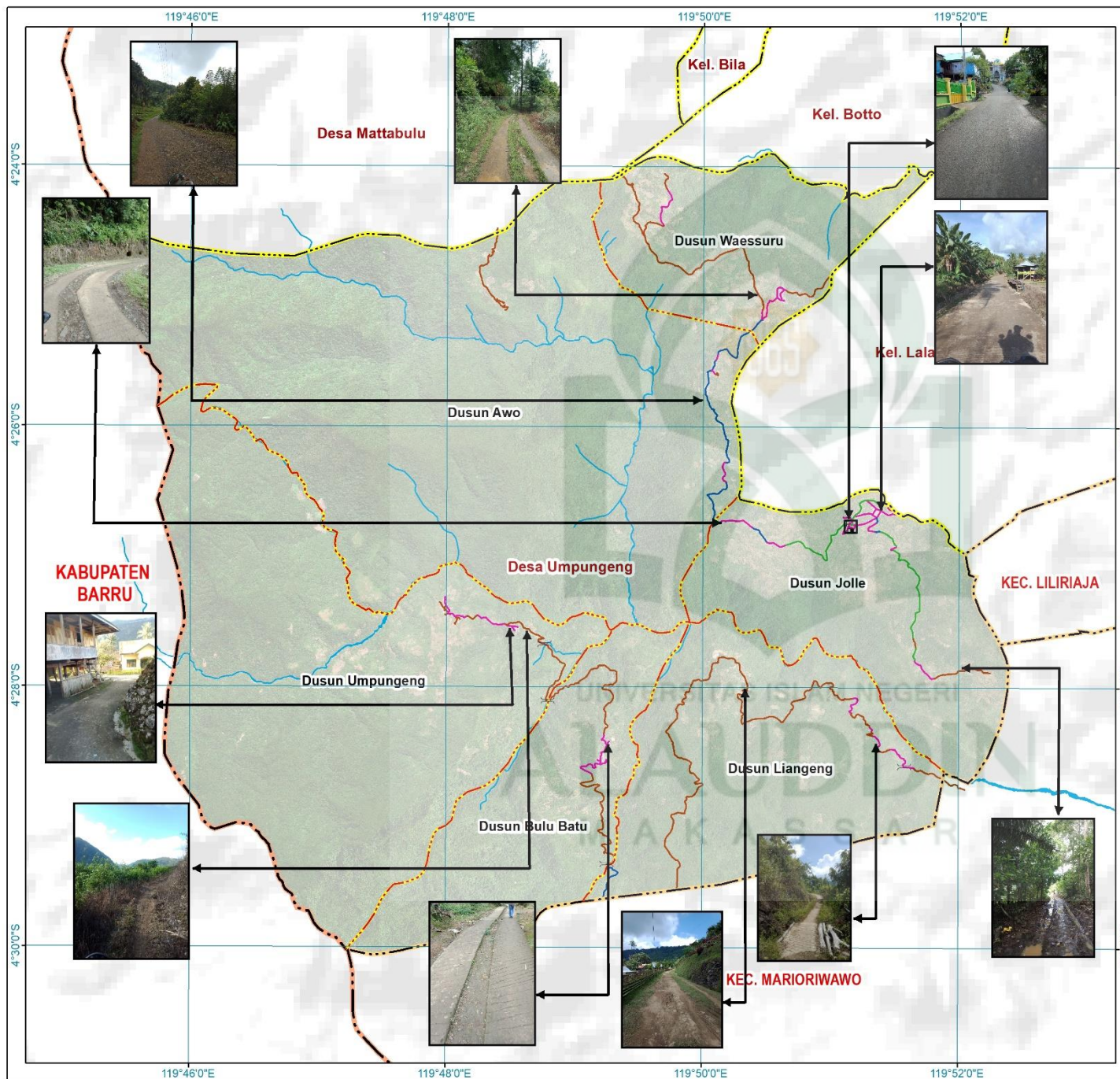
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2018

b. Jaringan Listrik

Jaringan listrik di Desa Umpungeng terdiri atas jaringan listrik PLN, Kincir Air dan Generator Set (genset). Jaringan listrik PLN hanya terjangkau oleh 3 dusun yaitu Dusun Jolle, Dusun Awo dan Dusun Waessuru dengan tegangan listrik sebesar 900 dan 1300 watt. Jaringan listrik yang berasal dari kincir air digunakan oleh masyarakat Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu, Dusun Umpungeng dan sebagian wilayah Dusun Waessuru. Arus Listrik yang berasal dari generator set digunakan oleh beberapa rumah di Dusun Jolle tepatnya di ujung kampung Paonge.

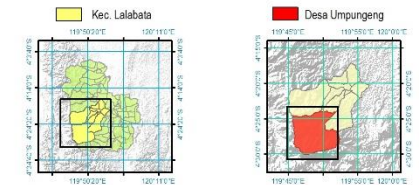


Gambar 37. Jaringan Listrik di Desa Umpungeng



Peta Jenis Jaringan Jalan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984



TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

KETERANGAN

- Aspal
- Beton
- Pengerasan
- Tanah

PERHUBUNGAN

- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

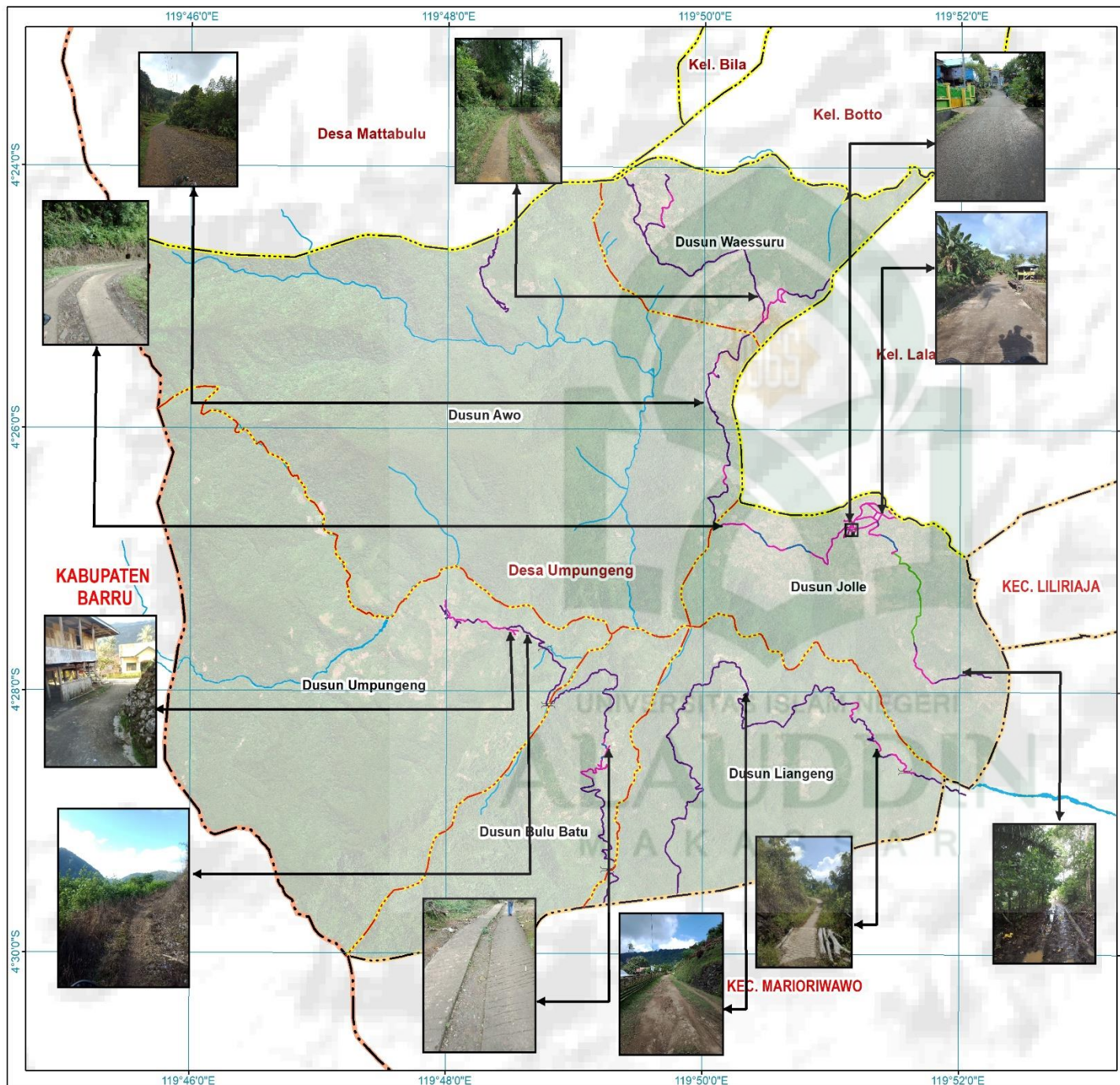
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmullyan, S.T., M.Si.

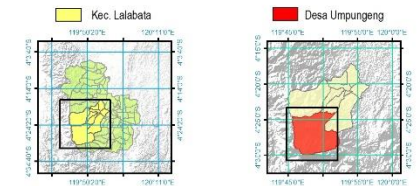
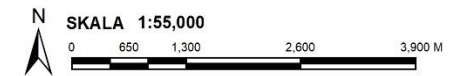
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliah



Peta Kondisi Jaringan Jalan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

 **TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA	KETERANGAN
ADMINISTRASI	
 Kantor Desa	 Baik
 Batas Desa	 Buruk
 Batas Dusun	 Rusak
 Batas Kecamatan	 Rusak Berat
 Batas Kabupaten	 Rusak Ringan
	 Rusak Sedang

PERHUBUNGAN

 Jembatan

PERAIRAN

 Sungai

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

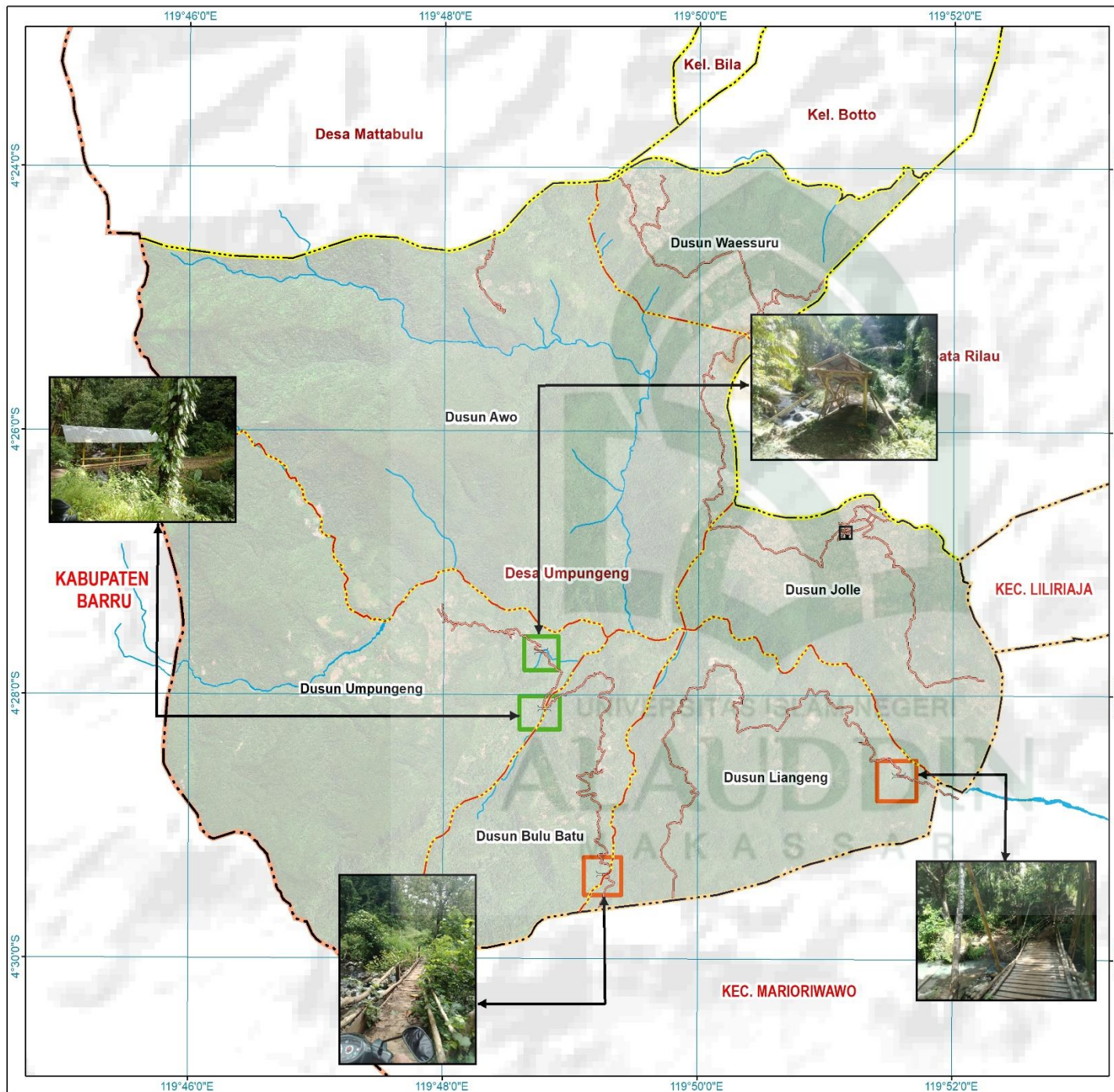
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

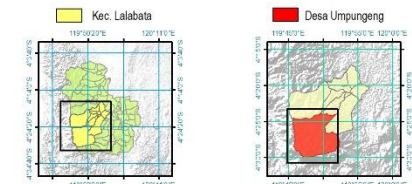
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Kondisi Jembatan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Buruk
- Rusak

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

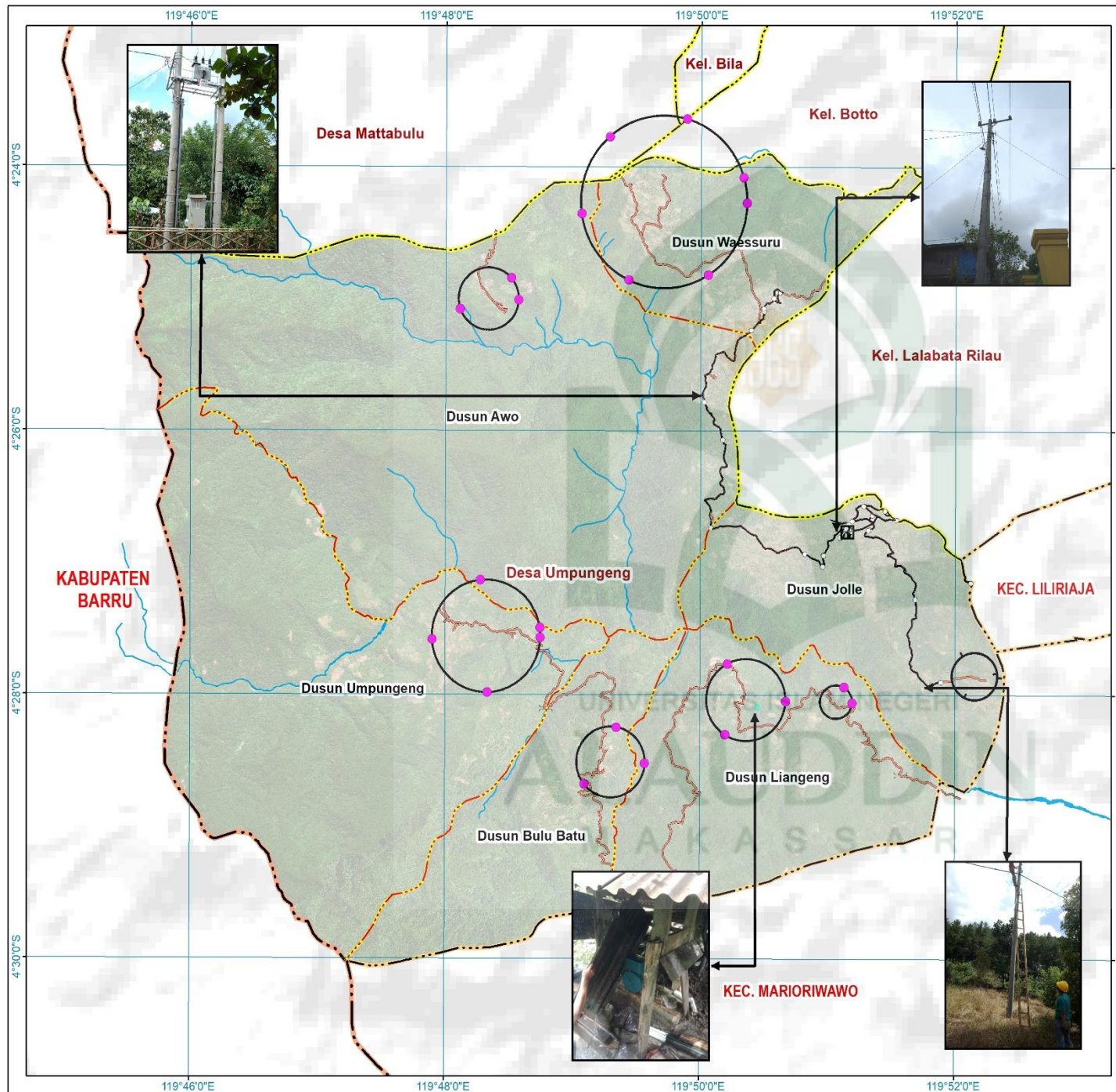
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

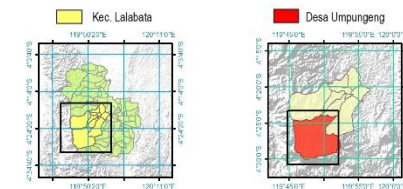
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Jaringan Listrik

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Letak Kincir Air
- Jaringan Listrik PLN
- Kincir Air
- Genset

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah

c. Jaringan Air Bersih

Sumber air bersih masyarakat Desa Umpungeng terdiri atas air ledeng, dan mata air. Di Desa Umpungeng terdapat 11 mata air sehingga air bersih di desa ini dapat terjangkau dengan baik. Air ledeng yang di kelola oleh pemerintah desa diperoleh dengan menyalurkan air melalui mata air kemudian dikumpulkan di bak penampungan selanjutnya dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah warga dan pemakaian air tiap rumah diukur menggunakan incometer sehingga masyarakat membayar iuran pemakaian air tiap bulan. Sedangkan bagi rumah warga yang menggunakan air dari mata air, pipa langsung disambungkan dari mata air ke rumah warga.



Gambar 42. Jaringan Air Bersih di Desa Umpungeng

d. Jaringan Persampahan

Proses pengolahan persampahan di Desa Umpungeng dilakukan dengan cara pembuangan sampah pada bak/tong sampah kemudian masyarakat umumnya mengumpulkan sampah di halaman/lahan kosong di dekat rumah kemudian dilakukan pembakaran sampah. Selain itu masyarakat juga biasa mengumpulkan sampahnya dan dibuang di kebun masing-masing.



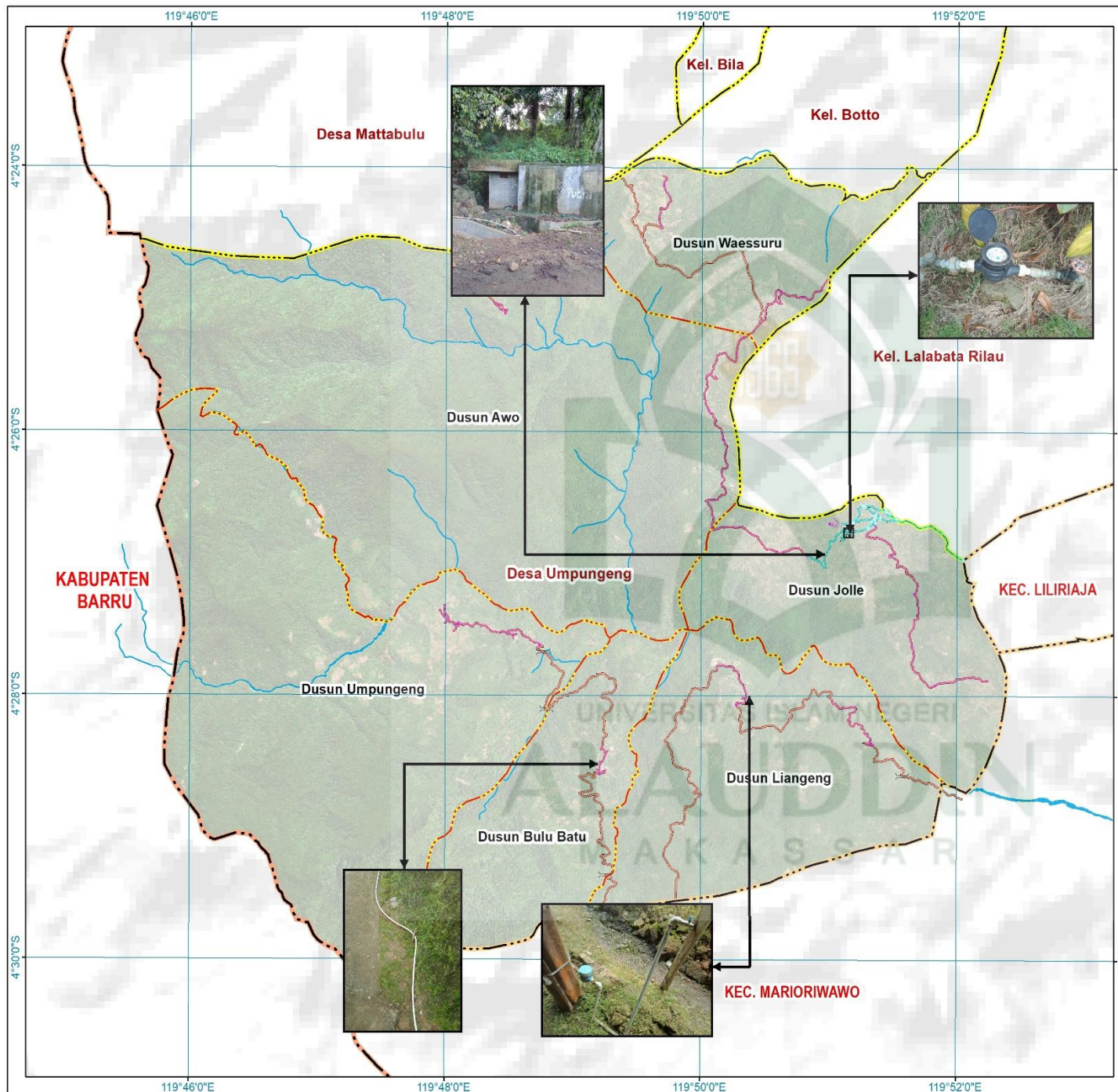
Gambar 43. Persampahan di Desa Umpungeng

e. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi yang terdapat di Desa Umpungeng yaitu tower dengan jaringan seluler telkomsel yang terdapat di Dusun Jolle. Pemancar tersebut menjangkau wilayah dusun lainnya yang ada di Desa Umpungeng sehingga jaringan telekomunikasi di Desa Umpungeng cukup memadai walaupun hanya 1 jenis jaringan.

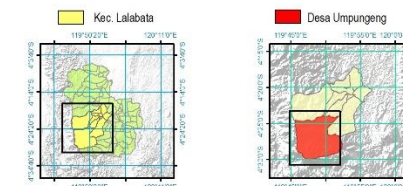


Gambar 44. Jaringan Telekomunikasi di Desa Umpungeng



Peta Jaringan Air Bersih

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

 **TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

-  Kantor Desa
-  Batas Desa
-  Batas Dusun
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kabupaten


PERHUBUNGAN

-  Jalan Lokal
-  Jembatan

PERAIRAN

-  Sungai

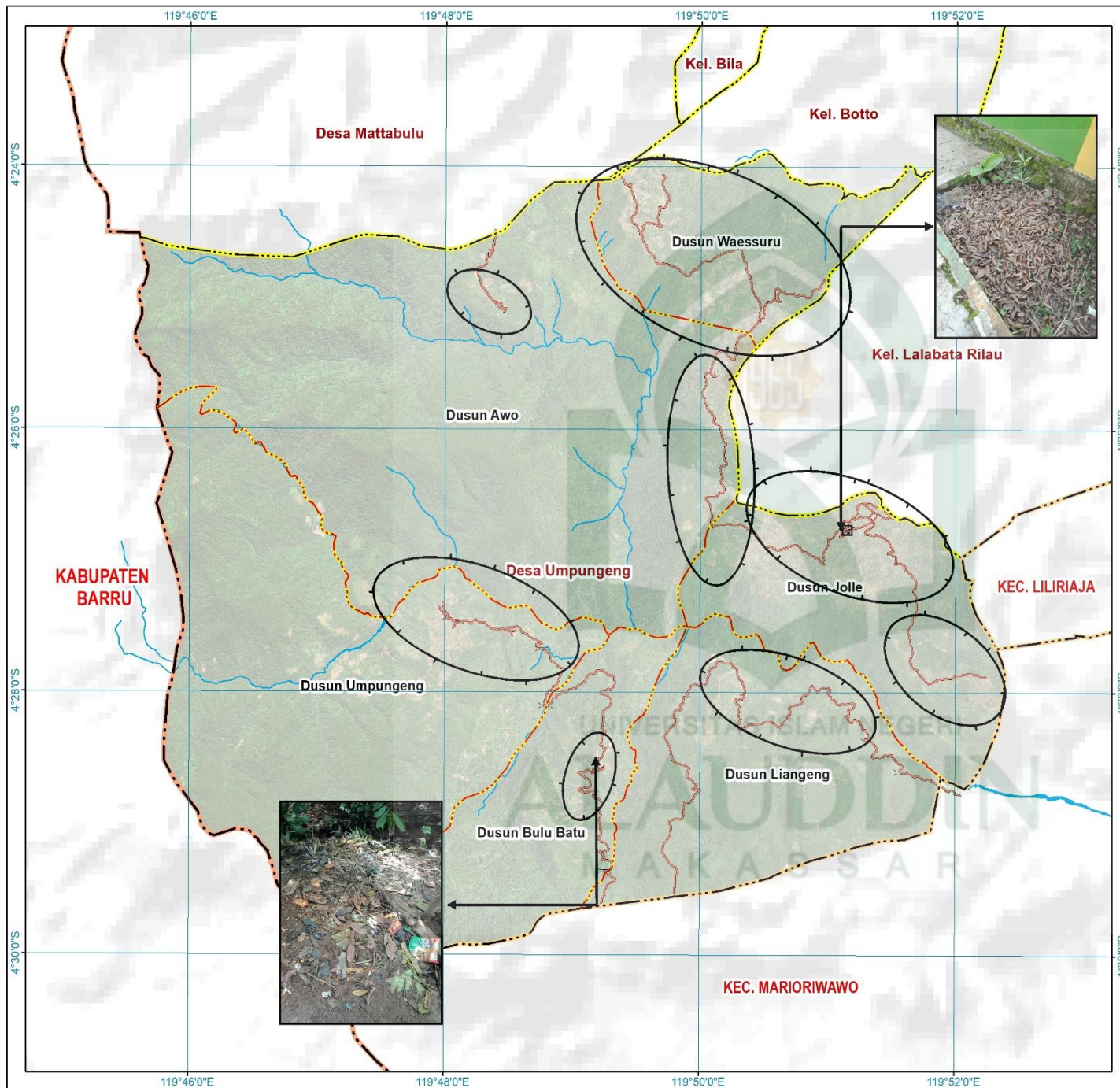
KETERANGAN

-  Air Ledeng
-  Perpipaan dari Mata Air

SUMBER DAN RIWAYAT PETA
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

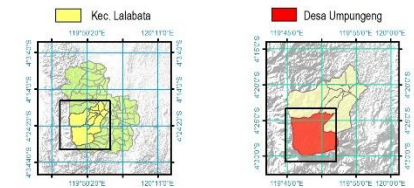
DIPERIKSA OLEH :
Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmuliary, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :
Yayah Awaliyah



Peta Jaringan Persampahan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Komunal

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

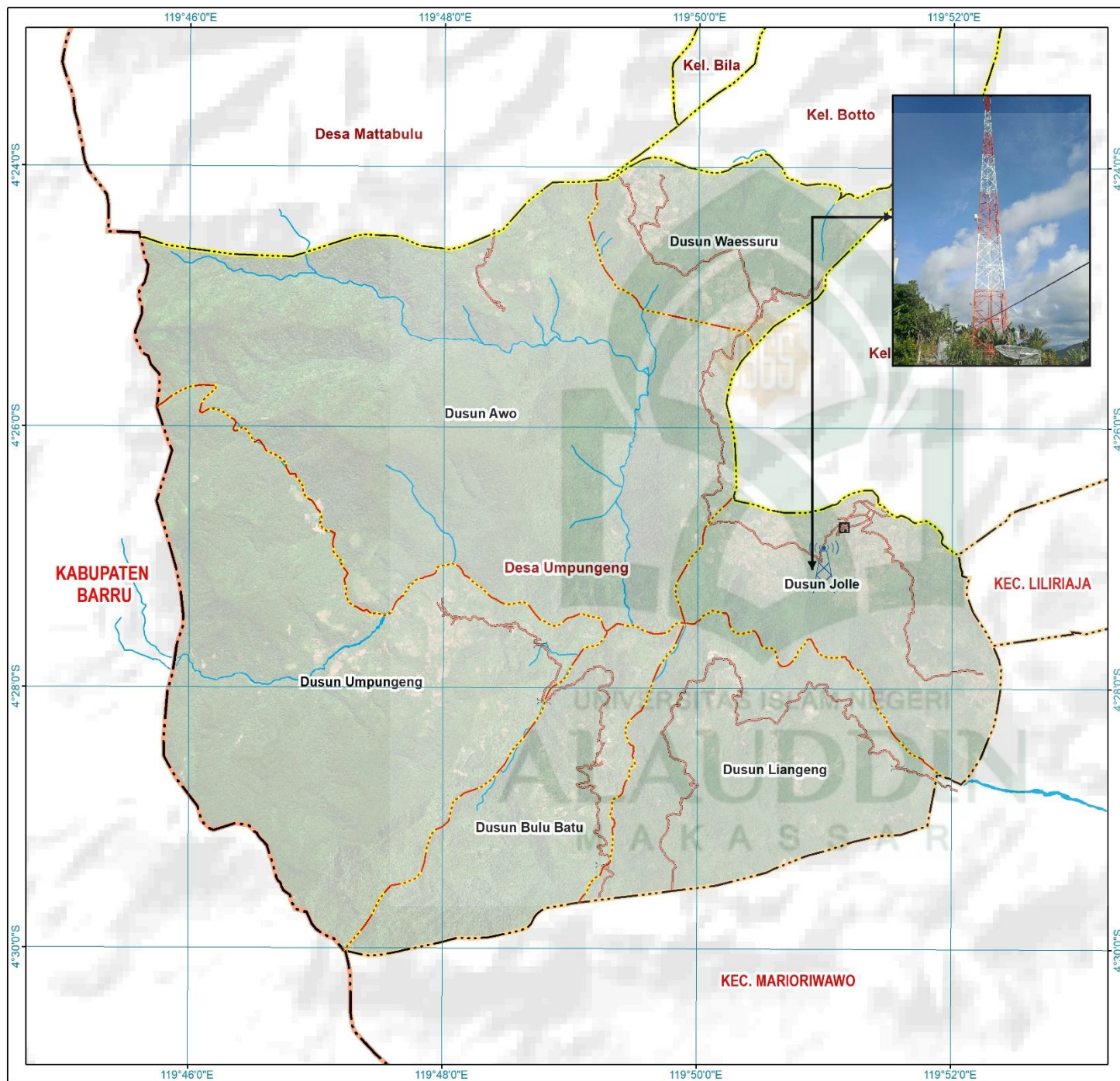
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

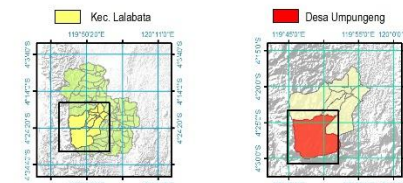
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awalayah



Peta Jaringan Telekomunikasi

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Tower

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :

Yawah Awaliyah

E. Proyeksi Penduduk Desa Umpungeng

Rincian jumlah penduduk Desa Umpungeng pada tahun 2013-2017 digunakan untuk melakukan proyeksi penduduk beberapa tahun ke depan. Jumlah penduduk Desa Umpungeng sebagai berikut.

Tabel 45. Jumlah Penduduk Desa Umpungeng Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan (jiwa)	Pertumbuhan
1	2013	4015	-	-
2	2014	4014	-1	-0.02
3	2015	4050	36	0.89
4	2016	4081	31	0.76
5	2017	4088	7	0.17
Rata-Rata		4050	18	0.45

Sumber: Arsip Desa Umpungeng Tahun 2018

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Umpungeng 5 tahun terakhir dapat diketahui bahwa trend masa lalu mendekati garis lurus sehingga rumus proyeksi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$P_t = P_o + b (t-o)$$

Keterangan :

P_t = penduduk pada tahun t

P_o = penduduk pada tahun dasar

$(t-o)$ = selisih antara tahun dasar dengan tahun yang diramalkan, yang sering disingkat dengan n

b = rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun pada masa lampau sampai sekarang (tahun dasar proyeksi)

Maka proyeksi jumlah penduduk Desa Umpungeng tiap 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Tahun 2022

$$\begin{aligned} P_{2022} &= 4088 + 18 (2022-2017) \\ &= 4088 + 18 (5) \\ &= 4088 + 90 \\ &= 4178 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

2. Jumlah Penduduk Tahun 2027

$$\begin{aligned} P_{2027} &= 4178 + 18 (2027-2022) \\ &= 4178 + 90 \\ &= 4268 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

3. Jumlah Penduduk Tahun 2032

$$\begin{aligned} P_{2032} &= 4268 + 18 (2032-2027) \\ &= 4268 + 90 \\ &= 4358 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

4. Jumlah Penduduk Tahun 2037

$$\begin{aligned} P_{2037} &= 4358 + 18 (2037-2032) \\ &= 4358 + 90 \\ &= 4448 \text{ jiwa} \end{aligned}$$

Tabel 46. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Tahun 2022-2037

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan (jiwa)
1	2022	4178	90
2	2027	4268	90
3	2032	4358	90
4	2037	4448	90

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

F. Analisis Efektivitas Pelayanan Infrastruktur

1. Fasilitas

a. Pelayanan Pendidikan

1) Ketersedian dan Akses ke TK/RA/BA

Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa di Desa Umpungeng terdapat 4 KB, 2 TK dan 1 RA. Letak masing-masing fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berada di tengah-tengah permukiman di tiap dusun yang ada di Desa Umpungeng. Jumlah total fasilitas PAUD yang terdapat di Desa Umpungeng sebanyak 7 unit. Walaupun fasilitas PAUD berada di tengah permukiman warga, akan tetapi terdapat kelompok permukiman yang jauh dari sekolah tersebut, hal ini disebabkan kondisi permukiman yang berpecah dari pusat-pusat permukiman sehingga siswa PAUD yang berada jauh dari lokasi sekolah harus berjalan kaki cukup jauh untuk menempuh perjalanan menuju sekolah. Hal tersebut terjadi pada kampung Tellang di Dusun Liangeng dan Kampung Campui di Dusun Awo. Rasio ketersediaan fasilitas TK/RA/BA di Desa Umpungeng dengan 7 fasilitas untuk penduduk sebanyak 4088 jiwa yaitu 0.0017123288 dan telah melebihi rasio standar 0.00095330764868 sehingga skor indikator ketersediaan TK/RA/BA berada pada nilai 5. Secara umum ketersediaan TK/RA/BA telah efektif menjangkau jumlah penduduk di Desa Umpungeng.

2) Ketersediaan dan Akses ke SD Sederajat

Desa Umpungeng terdapat 4 SD, 1 SD jarak jauh dan 1 MI jarak jauh. Semua fasilitas SD sederajat terdapat di semua wilayah dusun

kecuali Dusun Waessuru sehingga penduduk yang berada di Dusun Waessuru umumnya bersekolah di SD yang terdapat di Dusun Awo karena letak Dusun Waessuru yang berdekatan dengan Dusun Awo. Walaupun fasilitas pendidikan yang tersedia hampir pada seluruh dusun akan tetapi karena permukiman yang jauh dari pusat permukiman, tiap warga dusun harus berjalan kaki cukup jauh untuk menjangkau sekolah SD/MI. Hal tersebut terjadi pada siswa dengan rumah yang berada di kampung Tellang dan Campui. Selain itu pada Dusun Bulu Batu yang terdapat sekolah jarak jauh dari SDN 11 Umpungeng hanya melayani pendidikan SD dari kelas 1 sampai kelas 3 sehingga siswa kelas 4 sampai 6 hanya bisa melanjutkan sekolah di SDN 11 Umpungeng di Dusun Umpungeng dengan jarak sekitar 6 km dengan berjalan kaki selama 2 jam melewati hutan dengan kondisi jalan buruk untuk sampai di Dusun Umpungeng. Selain itu walaupun telah berjalan jauh untuk sampai di sekolah, kadang-kadang guru kelas tidak hadir untuk mengajar. Secara umum jumlah total fasilitas SD/MI sebanyak 6 unit dengan penduduk sebanyak 4088 jiwa maka, rasio ketersediaan SD sederajat di Desa Umpungeng yaitu 0.0014677104. Secara umum ketersediaan SD sederajat di Desa Umpungeng berada pada nilai 5 yang menyatakan bahwa ketersediaan SD sederajat sudah sangat efektif.

3) Indikator Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa di Desa Umpungeng terdapat 1 SMP dan 1 MTs yang terletak di Dusun Jolle. Siswa SMP dapat menjangkau sekolah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan

kendaraan bermotor. Pada Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu dan Dusun Liangeng dan Kampung Campui di Dusun Awo sulit untuk menjangkau fasilitas SMP sederajat. Hal tersebut terjadi karena jalan dari kampung tersebut sangat jauh dan sulit untuk di jangkau. Rasio ketersediaan SMP sederajat dengan jumlah unit SMP sederajat sebanyak 2 unit dan penduduk 4088 yaitu 0.0004892368 . Sehingga skor terhadap indikator ketersediaan SMP sederajat diberi nilai 4 yang artinya tingkat keefektifan cukup tinggi untuk menjangkau jumlah penduduk.

4) Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat.

Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa di Desa Umpungeng tidak terdapat SMA sederajat. Warga Desa Umpungeng yang sudah lulus di SMP maupun MTs yang ada di desa melanjutkan pendidikan SMA sederajat di Kota Watansoppeng yang merupakan Ibukota Kabupaten Soppeng yang jaraknya lebih dari 20 km sehingga skor terhadap ketersediaan SMA sederajat yaitu 0 yang mengindikasikan bahwa di Desa Umpungeng tidak terlayani SMA sederajat.

b. Pelayanan Kesehatan

1) Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Puskesmas

Berdasarkan hasil survey dapat diketahui bahwa di Desa Umpungeng hanya terdapat 1 puskesmas yang berada di Dusun Jolle. Skor terhadap ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas diberi nilai 4 sebab rasio terhadap ketersediaan puskesmas kurang dari 0.000507032962398 yang mengindikasikan bahwa ketersediaan puskesmas di Desa Umpungeng menjangkau jumlah penduduk sebanyak 4088 jiwa.

2) Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes atau Polindes

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa di Desa Umpungeng terdapat 3 unit poskesdes yang terdapat di Dusun Awo, Dusun Liangeng dan Dusun Bulu Batu, di Dusun Waessuru tidak terdapat Poskesdes atau Polindes tetapi masih dapat menjangkau poskesdes yang terdapat di Dusun Awo karena dusun tersebut berdekatan dan masih dalam rumpun lingkungan yang sama. Sedangkan di Dusun Umpungeng tidak terdapat poskesdes atau polindes dan jarak menuju polindes terdekat yang terdapat di Dusun Umpungeng yaitu sekitar 6 km dengan kondisi aksesibilitas yang buruk akan tetapi di Dusun Umpungeng masih terdapat bidan. Rasio ketersediaan poskesdes atau polindes 0.0007338552 sehingga skor terhadap indikator ini diberi nilai 5 karena telah melebihi rasio 0.00070719038224. Secara umum ketersediaan poskesdes di Desa Umpungeng dapat menjangkau jumlah penduduk sebanyak 4088 jiwa.

c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa

1) Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko/Warung Kelontong

Desa Umpungeng terdapat 46 unit toko/warung kelontong dengan jumlah unit toko/warung kelontong terbanyak terdapat di Dusun Jolle sedangkan di Dusun lainnya tersedia warung kelontong yang lebih sedikit. Rasio terhadap ketersediaan toko/warung kelontong yaitu 0.0112524462 sehingga skor terhadap indikator ini diberi nilai 2 yang mengindikasikan tingkat pelayanan yang rendah terhadap jumlah penduduk sebanyak 4088 jiwa.

2) Ketersediaan Pasar

Desa Umpungeng terdapat 1 unit pasar yang terdapat di Dusun Jolle yang merupakan pusat Desa Umpungeng. Kondisi bangunan pasar di Desa Umpungeng cukup baik dengan bangunan semi permanen. Rasio ketersediaan pasar dengan bangunan semi permanen yaitu 0.0002446184 yang kurang dari rasio 0.00053925247833 sehingga skor terhadap indikator ini yaitu 2 yang mengindikasikan bahwa tingkat pelayanan pasar di Desa Umpungeng cukup rendah.

d. Fasilitas Olahraga

Desa Umpungeng terdapat 4 unit fasilitas olahraga yang terdiri atas 2 lapangan sepak bola dan 2 lapangan volly. Skor terhadap ketersediaan fasilitas olahraga di Desa Umpungeng dengan nilai 2 sebab merupakan desa yang hanya tersedia 4 unit fasilitas olahraga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pelayanan fasilitas olahraga di Desa Umpungeng cukup rendah.

2. Utilitas

a. Transportasi

1) Lalu Lintas dan Kualitas Jalan

Desa Umpungeng mempunyai wilayah yang cukup luas dengan kondisi permukiman yang berpecah membentuk kelompok-kelompok permukiman bahkan terdapat beberapa kampung yang sulit diakses karena harus melewati hutan pegunungan untuk sampai pada kampung tersebut seperti, Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu, Dusun Liangeng dan Kampung Campui di Dusun Awo. Jalan yang ditempuh untuk sampai

pada kampung tersebut dominan jalan tanah sehingga secara umum luas jalan terluas di Desa Umpungeng adalah jalan tanah. Adapun rincian jenis jalan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 47. Panjang Jalan berdasarkan Jenis Jalan di Desa Umpungeng

No	Jenis Jalan	Panjang Total (m)	Persentase (%)
1	Aspal	6,341.60	13.21
2	Beton	10,273.15	21.40
3	Pengerasan	4,780.40	9.96
4	Tanah	26,619.02	55.44
Total		48,014.18	100.00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis jalan yang paling panjang di Desa Umpungeng yaitu jalan tanah dengan total panjang 26,619.02 meter dengan persentase sebesar 55.44% sehingga skor terhadap indikator jaringan jalan di Desa Umpungeng berada pada nilai 3 yang mengindikasikan tingkat pelayanan jalan berada pada kategori sedang.

2) Aksesibilitas Jalan

Kondisi aksesibilitas di Desa Umpungeng dari desa menuju desa lain cukup baik di Dusun Jolle karena kondisi jalan yang baik dengan jenis permukaan aspal dan beton sehingga mudah dilalui oleh kendaraan roda 4. Dusun Awo dan Dusun Waessuru dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 walaupun kondisi jalan pada kedua dusun tersebut dengan jenis permukaan pengerasan, beton dan tanah sehingga masih dapat dilalui walaupun dalam kondisi musim penghujan, akan tetapi pada kampung Coppoliang dan Campui sulit dijangkau pada musim hujan karena dominan jalan tanah. Dusun Bulu Batu dan Dusun Liangeng dapat

dijangkau menggunakan kendaraan roda 4 jika melalui Jalan Uwe Pute dari Desa Gattareng, akan tetapi pada musim hujan akan sulit dilalui karena jalan tanah dengan tanjakan dan penurunan dengan jalan yang licin dan becek. Sedangkan pada Dusun Umpungeng tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 karena jalan yang sempit dan berjurang sehingga hanya motor yang dapat menjangkau Dusun tersebut, akan tetapi pada musim hujan akan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Skor untuk aksesibilitas jalan di Desa Umpungeng diberi nilai 3 karena dominan sulit dijangkau jika musim penghujan.

b. Infrastruktur Jaringan Listrik

Desa Umpungeng yang sudah teraliri listrik dari PLN yaitu Dusun Jolle, Dusun Awo (kecuali Kampung Campui), Dusun Waessuru (kecuali Kampung Coppoliang). Sedangkan ke 3 dusun lainnya seperti Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu dan Dusun Umpungeng belum dialiri listrik dari PLN. Wilayah yang tidak teraliri listrik PLN mendapat aliran listrik dari kincir air yang dipasang di sungai. Setiap kincir air di Dusun Liangeng biasanya digunakan oleh 4-5 rumah. Persentase pengguna listrik PLN di Desa Umpungeng sekitar 64% sehingga skor indikator jaringan listrik diberi nilai 3 sebab persentase pengguna listrik kurang dari 67%. Sehingga pelayanan listrik di Desa Umpungeng masuk kategori sedang.

c. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

1) Sumber Air Minum

Sumber air di Desa Umpungeng sebagian besar berasal dari mata air dengan perpipaan dan sebagian kecil menggunakan ledeng dengan

meteran. Kondisi ketersediaan air bersih untuk minum di Desa Umpungeng cukup baik karena banyaknya mata air yang terdapat di Desa Umpungeng sebanyak 11 titik. Skor indikator sumber air minum di Desa Umpungeng diberi nilai 3 sebab air yang digunakan berasal dari mata air.

2) Sumber Air untuk Mandi/Cuci

Sumber air yang digunakan untuk mandi dan mencuci di Desa Umpungeng sama halnya dengan sumber air untuk minum yaitu menggunakan air yang bersumber dari mata air. Air yang digunakan dialirkan melalui pipa dan dialirkan ke rumah warga. Selain itu di Dusun Jolle terdapat bak penampungan air yang berasal dari mata air kemudian dialirkan melalui sistem perpipaan yang dilengkapi dengan meteran air. Oleh karena itu skor untuk indikator air untuk mandi/cuci berada pada nilai 3 yang mengindikasikan pelayanan air bersih untuk mandi/cuci dalam kategori sedang.

d. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

Desa Umpungeng terdapat 1 unit BTS yang berada di Dusun Jolle. Di Desa Umpungeng sinyal jaringannya mencakup jaringan telkomsel dengan jaringan 3G sehingga skor terhadap ketersediaan dan kualitas komunikasi seluler diberi nilai 3 yang mengindikasikan tingkat pelayanan fasilitas komunikasi seluler dalam kategori sedang.

Berdasarkan analisis efektivitas pelayanan infrastruktur yang dikemukakan di atas sebagaimana dirangkum pada tabel. Adapun keseluruhan penilaian terhadap tingkat efektifitas pelayanan infrastruktur di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 48. Tingkat Efektivitas Pelayanan Infrastruktur di Desa Umpungeng

No	Jenis Pelayanan	Skor Efektivitas	Keterangan
1	Pelayanan Pendidikan		
a	TK/RA/BA	5	tingkat pelayanan sangat tinggi
b	SD sederajat	5	tingkat pelayanan sangat tinggi
c	SMP sederajat	4	tingkat pelayanan tinggi
d	SMA sederajat	0	tidak terlayani
2	Pelayanan Kesehatan		
a	Puskesmas/Pustu	4	tingkat pelayanan tinggi
b	Poskesdes/Polindes	5	tingkat pelayanan sangat tinggi
3	Pelayanan Perdagangan dan Jasa		
a	Pertokoan, minimarket, toko/warung kelontong	2	tingkat pelayanan rendah
b	Pasar	2	tingkat pelayanan rendah
4	Fasilitas Olahraga	2	tingkat pelayanan rendah
5	Sarana Transportasi		
a	Lalu lintas dan kualitas jalan	3	tingkat pelayanan sedang
b	Aksesibilitas Jalan	3	tingkat pelayanan sedang
6	Pelayanan Listrik	3	tingkat pelayanan sedang
7	Pelayanan Air bersih dan Sanitasi		
a	Sumber Air Minum	3	tingkat pelayanan sedang
b	Sumber Air mandi/cuci	3	tingkat pelayanan sedang
8	Pelayanan komunikasi dan informasi	3	tingkat pelayanan sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

G. Analisis Kebutuhan Infrastruktur

1. Fasilitas

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Umpungeng adalah 7 unit KB/TK/RA, 6 unit SD/MI dan 2 unit SMP/MTs. Sehingga kebutuhan

fasilitas pendidikan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 49. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi

No	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Penambahan (unit)
	Tahun 2022					
1	TK	7	1250	4178	3	-
2	SD	6	1600		2	-
3	SMP	2	4800		-	-
4	SMA	-	4800		-	-
	Tahun 2027					
1	TK	7	1250	4268	3	-
2	SD	6	1600		2	-
3	SMP	2	4800		-	-
4	SMA	-	4800		-	-
	Tahun 2032					
1	TK	7	1250	4358	3	-
2	SD	6	1600		2	-
3	SMP	2	4800		-	-
4	SMA	-	4800		-	-
	Tahun 2037					
1	TK	7	1250	4448	3	-
2	SD	6	1600		2	-
3	SMP	2	4800		-	-
4	SMA	-	4800		-	-

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas pendidikan di Desa Umpungeng tiap 5 tahun selama kurun waktu 20 tahun maka diperoleh bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Umpungeng telah surplus terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sehingga tidak perlu mengalami penambahan fasilitas. Adapun kebutuhan terhadap fasilitas SMA tidak mencukupi standar penduduk sehingga penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan SMA diarahkan ke Kota Watansoppeng.

b. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Umpungeng terdiri atas 1 unit pustu, 3 unit poskesdes dan 3 unit posyandu. Sehingga kebutuhan fasilitas kesehatan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 50. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi

No	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Penambahan (unit)
	Tahun 2022					
1	Posyandu	3	1250	4178	3	-
2	Balai Pengobatan	-	2500		1	1
3	Puskesmas Pembantu	1	30000		-	-
	Tahun 2027					
1	Posyandu	3	1250	4268	3	-
2	Balai Pengobatan	-	2500		1	1
3	Puskesmas Pembantu	1	30000		-	-
	Tahun 2032					
1	Posyandu	3	1250	4358	3	-
2	Balai Pengobatan	-	2500		1	1
3	Puskesmas Pembantu	1	30000		-	-
	Tahun 2032					
1	Posyandu	3	1250	4448	3	-
2	Balai Pengobatan	-	2500		1	1
3	Puskesmas Pembantu	1	30000		-	-

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di Desa Umpungeng dari tahun 2022 sampai tahun 2037 membutuhkan 3 unit posyandu dan telah terdapat 3 unit posyandu sehingga tidak memerlukan

penambahan. Balai pengobatan pada tahun 2022 sampai 2037 dibutuhkan sebanyak 1 unit sehingga memerlukan penambahan 1 unit balai pengobatan. Adapun puskesmas pembantu dari tahun 2022 sampai tahun 2037 tidak memenuhi standar kebutuhan 30000 penduduk untuk 1 unit puskesmas pembantu dan di Desa Umpungeng telah terdapat 1 unit puskesmas pembantu sehingga tidak perlu penambahan lagi.

c. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa yang terdapat di Desa Umpungeng terdiri atas 1 unit pasar, 43 unit kios/warung, 3 unit toko/ruko, 1 unit warung kopi, 4 unit bengkel, 2 unit penjahit dan 1 unit pertamini. Adapun kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 51. Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi

No	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Penambahan (unit)
	Tahun 2022					
1	Toko/Warung	43	250	4178	16	-
2	Pertokoan	3	6000		-	-
3	Pusat pertokoan/pasar kecil lingkungan	1	30000		-	-
	Tahun 2027					
1	Toko/Warung	43	250	4268	17	-
2	Pertokoan	3	6000		-	-
3	Pusat pertokoan/pasar kecil lingkungan	1	30000		-	-

No	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Penambahan (unit)
	Tahun 2032					
1	Toko/Warung	43	250	4358	17	-
2	Pertokoan	3	6000		-	-
3	Pusat pertokoan/pasar kecil lingkungan	1	30000		-	-
	Tahun 2037					
1	Toko/Warung	43	250	4448	17	-
2	Pertokoan	3	6000		-	-
3	Pusat pertokoan/pasar kecil lingkungan	1	30000		-	-

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di Desa Umpungeng dari tahun 2022 sampai tahun 2037 dapat diketahui bahwa ketersediaan fasilitas seperti toko/warung, pertokoan dan pasar telah melebihi kebutuhan untuk 20 tahun ke depan sehingga tidak perlu dilakukan penambahan lagi.

d. Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga yang terdapat di Desa Umpungeng terdiri atas 2 unit lapangan sepakbola yang terdapat di Dusun Jolle dan Dusun Waessuru, 2 unit lapangan volly yang terdapat di Dusun Bulu Batu dan Dusun Umpungeng. Adapun kebutuhan fasilitas olahraga di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 52. Kebutuhan Fasilitas Olahraga di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi

N o	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Penambahan (unit)
Tahun 2022						
1	Taman dan Lapangan Olahraga	4	30000	4178	-	-
Tahun 2027						
1	Taman dan Lapangan Olahraga	4	30000	4268	-	-
Tahun 2032						
1	Taman dan Lapangan Olahraga	4	30000	4358	-	-
Tahun 2037						
1	Taman dan Lapangan Olahraga	4	30000	4448	-	-

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas olahraga di Desa Umpungeng 2022 sampai 2037 maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Umpungeng tidak membutuhkan penambahan fasilitas olahraga karena ketersediaan melebihi kebutuhan fasilitas. Selain itu jumlah penduduk hasil proyeksi tidak mencapai standar kebutuhan lapangan olahraga sehingga yang tersedia tidak perlu penambahan fasilitas.

e. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Desa Umpungeng yaitu 11 unit mesjid yang tersebar di seluruh wilayah dusun. Fasilitas peribadatan yang terdapat di Desa Umpungeng hanya terdapat mesjid sebab penduduk Desa Umpungeng beragama islam. Adapun kebutuhan fasilitas peribadatan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 53. Kebutuhan Fasilitas Peribadatan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi

No	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Penambahan (unit)
Tahun 2022						
1	Mesjid	11	2500	4178	1	-
Tahun 2027						
1	Mesjid	11	2500	4268	1	-
Tahun 2032						
1	Mesjid	11	2500	4358	1	-
Tahun 2037						
1	Mesjid	11	2500	4448	1	-

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan fasilitas peribadatan di Desa Umpungeng dari tahun 2022 sampai tahun 2037 dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk 20 tahun ke depan hanya membutuhkan 1 unit mesjid akan tetapi karena kondisi permukiman di Desa Umpungeng berpecah membentuk kelompok kecil sehingga jumlah mesjid yang tersedia di Desa Umpungeng sebanyak 11 unit sehingga tidak perlu mengalami penambahan.

2. Utilitas

a. Jaringan Jalan dan Jembatan

Permasalahan jaringan jalan di Desa Umpungeng yaitu tidak terdapat jalan yang menghubungkan beberapa dusun ke pusat desa yang terletak di Dusun Jolle sehingga dibutuhkan jaringan jalan penghubung selain itu dibutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan pada ruas jalan dengan kondisi buruk dan jenis permukaan tanah serta pelengkap pengamanan jalan pada jalan yang berjurang. Selain itu diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas jembatan.

b. Jaringan Listrik

Jaringan listrik di Desa Umpungeng yang dilayani oleh listrik yang berasal dari PLN melayani 3 dusun yaitu Dusun Jolle, sebagian Dusun Awo, dan sebagian Dusun Waessuru. Sedangkan listrik yang berasal dari kincir air melayani sebagian Dusun Awo (7 KK), sebagian Dusun Waessuru (39 KK), Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu dan Dusun Umpungeng. Jumlah KK yang membutuhkan jaringan listrik PLN dari ke tiga dusun tersebut sebanyak 349 KK.

c. Jaringan Air Bersih

Sumber mata air di Desa Umpungeng berupa air ledeng dengan meteran dan air pipa dari mata air. Jumlah mata air di Desa Umpungeng sebanyak 11 titik sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terlayani. Sehingga yang dibutuhkan dalam pengolahan air bersih yaitu peningkatan kualitas dan sistem pengolahan air bersih.

d. Jaringan Persampahan

Pengolahan sampah di Desa Umpungeng dilakukan melalui pengumpulan sampah pada tong sampah kemudian dikumpulkan di lahan kosong yang berada di dekat rumah warga ataupun dikumpulkan dan di bawa ke kebun yang dikumpulkan bersama oleh beberapa rumah tangga. selanjutnya sampah yang berasal dari plastik yang tidak dapat terurai secara alami akan dibakar. Berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi tahun 2022 sampai tahun 2037 sehingga prasarana persampahan di Desa Umpungeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 54. Kebutuhan Prasarana Persampahan di Desa Umpungeng Hasil Proyeksi

No	Jenis Fasilitas	Fasilitas Eksisting (unit)	Penduduk Pendukung	Penduduk Hasil Proyeksi	Kebutuhan (unit)	Keterangan
Tahun 2022						
1	Tong Sampah	Setiap rumah/bangunan	5 (pribadi)	4178	835	Disesuaikan dengan jumlah rumah/bangunan yang ada
2	Bak sampah kecil	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
3	Gerobak Sampah	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
Tahun 2027						
1	Tong Sampah	Setiap rumah/bangunan	5 (pribadi)	4268	853	Disesuaikan dengan jumlah rumah/bangunan yang ada
2	Bak sampah kecil	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
3	Gerobak Sampah	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
Tahun 2032						
1	Tong Sampah	Setiap rumah/bangunan	5 (pribadi)	4358	871	Disesuaikan dengan jumlah rumah/bangunan yang ada
2	Bak sampah kecil	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
3	Gerobak Sampah	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
Tahun 2032						
1	Tong Sampah	Setiap rumah/bangunan	5 (pribadi)	4448	889	Disesuaikan dengan jumlah rumah/bangunan yang ada
2	Bak sampah kecil	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan
3	Gerobak Sampah	-	2500 (RW)		1	Perlu disediakan

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel kebutuhan prasarana persampahan di Desa Umpungeng dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 membutuhkan 835 unit tong sampah yang diletakkan pada setiap rumah dan fasilitas umum, 1 unit

bak sampah dan 1 unit gerobak sampah. Pada tahun 2027 membutuhkan 853 unit tong sampah, 1 unit bak sampah dan 1 unit gerobak sampah. Pada tahun 2032 membutuhkan 871 unit tong sampah, 1 unit bak sampah dan 1 unit gerobak sampah. Pada tahun 2037 membutuhkan 889 unit tong sampah, 1 unit bak sampah dan 1 unit gerobak sampah. Adapun terhadap penyediaan tong sampah disesuaikan dengan kebutuhan tiap rumah dan bangunan fasilitas umum yang ada di Desa Umpungeng. Selanjutnya untuk penyediaan bak sampah dan gerobak sampah minimal 1 unit dengan asumsi untuk melayani 1 RW/dusun sehingga penyediaannya dapat melebihi kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk, jarak maupun cakupan pelayanan tiap RW/dusun yang ada di Desa Umpungeng.

H. Arahan Pengembangan Infrastruktur

Arahan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di Desa Umpungeng untuk 5 tahun sampai 20 tahun kedepan yaitu dengan menyusun arahan atau rencana pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Adapun rencana pengembangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di Desa Umpungeng diuraikan sebagai berikut.

1. Rencana Pengembangan Pelayanan Pendidikan

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Desa Umpungeng telah memenuhi kebutuhan sehingga yang perlu ditingkatkan yaitu pelayanan pendidikan dengan cara menambah tenaga pendidik/guru sehingga anak usia sekolah dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga pendidik terutama pada daerah dusun yang sulit dijangkau

seperti di Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu dan Dusun Liangeng. Selanjutnya meningkatkan kualitas tenaga pendidik secara teknis dan fungsional dengan program pengembangan profesi.

2. Rencana Pengembangan Pelayanan Kesehatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa di Desa Umpungeng memerlukan 1 unit balai pengobatan. Fasilitas kesehatan di Desa Umpungeng melayani semua dusun berupa poskesdes dan posyandu akan tetapi di Dusun Umpungeng yang mempunyai jarak yang paling jauh dan sulit untuk ditempuh tidak terdapat fasilitas kesehatan oleh sebab itu balai pengobatan sebaiknya dibangun (diletakkan) di Dusun Umpungeng.

3. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan merupakan kebutuhan vital terhadap berlangsungnya proses kehidupan sosial ekonomi di suatu wilayah sehingga pengadaannya serta peningkatan kualitasnya sangat perlu diperhatikan demi kelancaran perhubungan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi jaringan jalan di Desa Umpungeng didominasi oleh jalan dengan jenis permukaan tanah. Kondisi jembatan di Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu dan Dusun Umpungeng mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Arahan pengembangan jaringan jalan dan jembatan di Desa Umpungeng meliputi :

- a. Rencana pengembangan jalan untuk menghubungkan dusun-dusun yang tidak terhubung secara langsung dengan pusat desa seperti Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu, Dusun Liangeng dan Kampung Campui di Dusun Awo.

- b. Perbaikan dan peningkatan kualitas pada jalan rusak dan jalan tanah menjadi jalan beton
- c. Membuat pegaman pada pinggir jalan yang terjal dan sempit demi keamanan dan keselamatan pengendara/pengguna jalan.
- d. Melakukan pelebaran/perluasan jalan pada jalan utama desa dari 3 meter menjadi 4.5 meter yang dilengkapi dengan drainase permanen
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap jalan dengan jenis permukaan aspal dan beton serta melakukan pemeliharaan terhadap drainase yang telah tersedia secara berkala/rutin
- f. Rencana pembuatan jembatan penghubung sebanyak 3 unit pada jalan yang telah direncanakan dengan lebar 4 meter ataupun disesuaikan dengan lebar jalan
- g. Perbaikan dan peningkatan kualitas jembatan yang mengalami kerusakan.

4. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

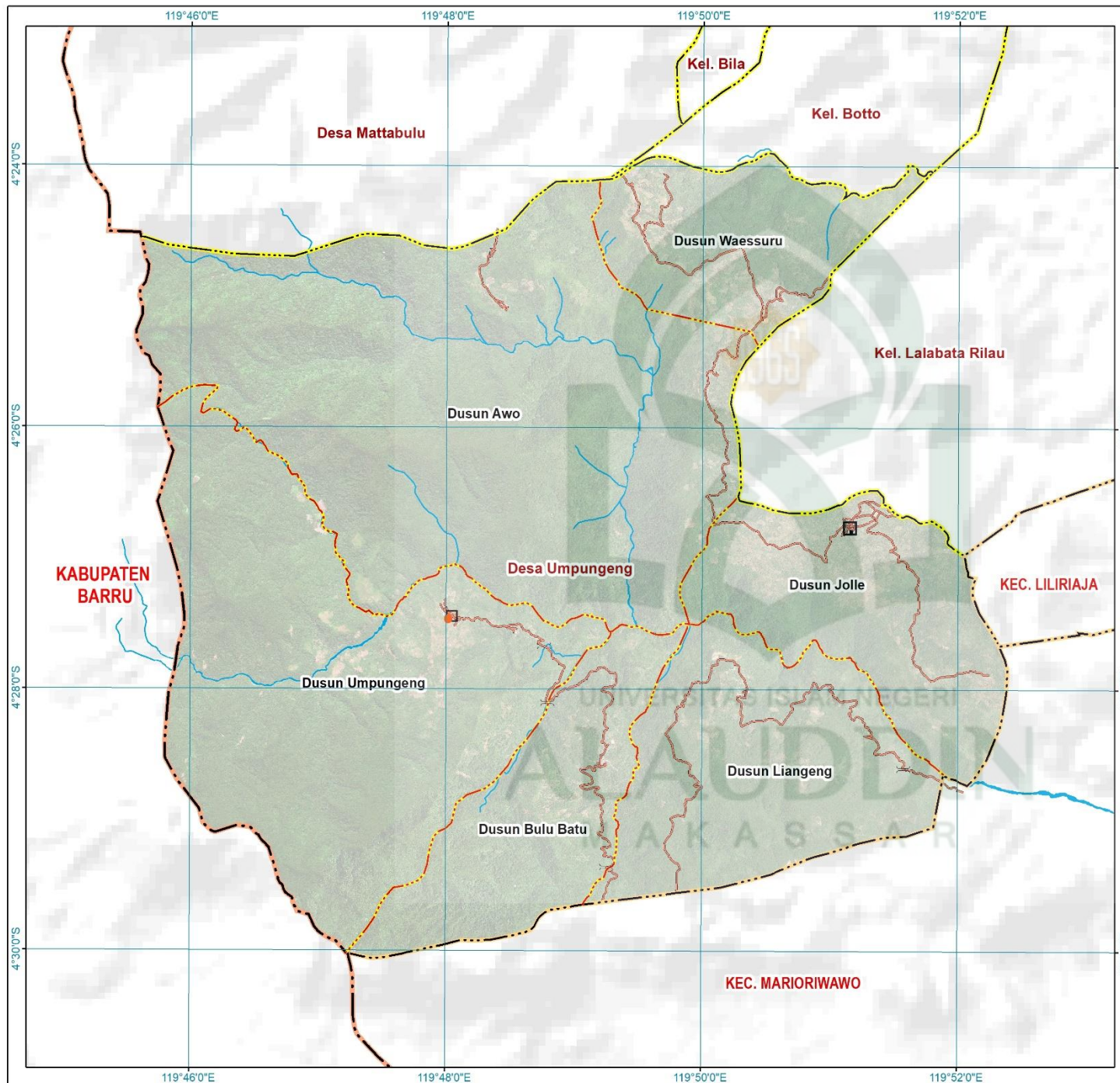
Berdasarkan kondisi eksisting di Desa Umpungeng diketahui bahwa terdapat sekitar 36% rumah dan bangunan yang belum mendapat aliran listrik dari PLN meliputi Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu, Dusun Liangeng, sebagian Dusun Awo, dan sebagian Dusun Waessuru sehingga perlu pengadaan jaringan listrik dengan “Program Listrik Masuk Desa (Lisdes)” yang diadakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program ini dapat menjangkau pelosok-pelosok desa yang terpencil.

5. Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Desa Umpungeng menggunakan sistem komunal. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa di Desa Umpungeng

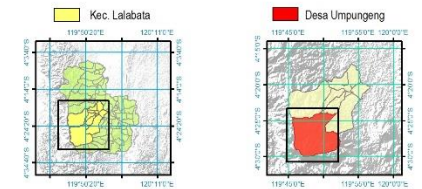
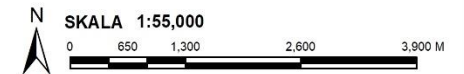
membutuhkan 1 unit bak sampah kecil dan 1 unit gerobak sampah dengan asumsi setiap 1 bak sampah (dimensi 2 m²) dan 1 unit gerobak sampah (dimensi 6 m²) untuk 1 RW. Kondisi permukiman di Desa Umpungeng yang tersebar menyebabkan banyaknya jumlah dusun yang ada di Desa Umpungeng. Oleh sebab itu diperlukan pengadaan bak sampah dan gerobak sampah minimal 1 unit di setiap dusun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kawasan permukiman warga. Selain itu diperlukan lahan untuk menampung sampah yang dikumpulkan pada bak sampah di setiap dusun sehingga sampah tidak lagi dibuang di areal perkebunan warga.

Pengelolaan persampahan di Desa Umpungeng dapat dilakukan dengan sistem 3R atau *reuse*, *reduce* dan *recycle*. *Reuse* yaitu menggunakan kembali sampah untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya, misalnya menggunakan kantong plastik berulang kali saat berbelanja, menggunakan kembali wadah bekas untuk menyimpan keperluan lainnya, menggunakan sisa kertas pada buku tulis yang sudah tidak terpakai. *Reduce* yaitu mengurangi sesuatu yang dapat menimbulkan sampah seperti hindari membeli barang yang hanya dapat digunakan sekali pakai, hindari membeli barang yang kurang diperlukan, menggunakan produk yang dapat diisi ulang. *Recycle* yaitu mendaur ulang sampah untuk menjadi barang/produk baru yang bermanfaat seperti mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, mendaur ulang sampah non organik (plastik) menjadi kerajinan tangan dan barang bermanfaat lainnya.



Peta Rencana Fasilitas Kesehatan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

 **TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

-  Kantor Desa
-  Batas Desa
-  Batas Dusun
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

-  Jalan Lokal
-  Jembatan

PERAIRAN

-  Sungai

KETERANGAN

-  Rencana Balai Pengobatan

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

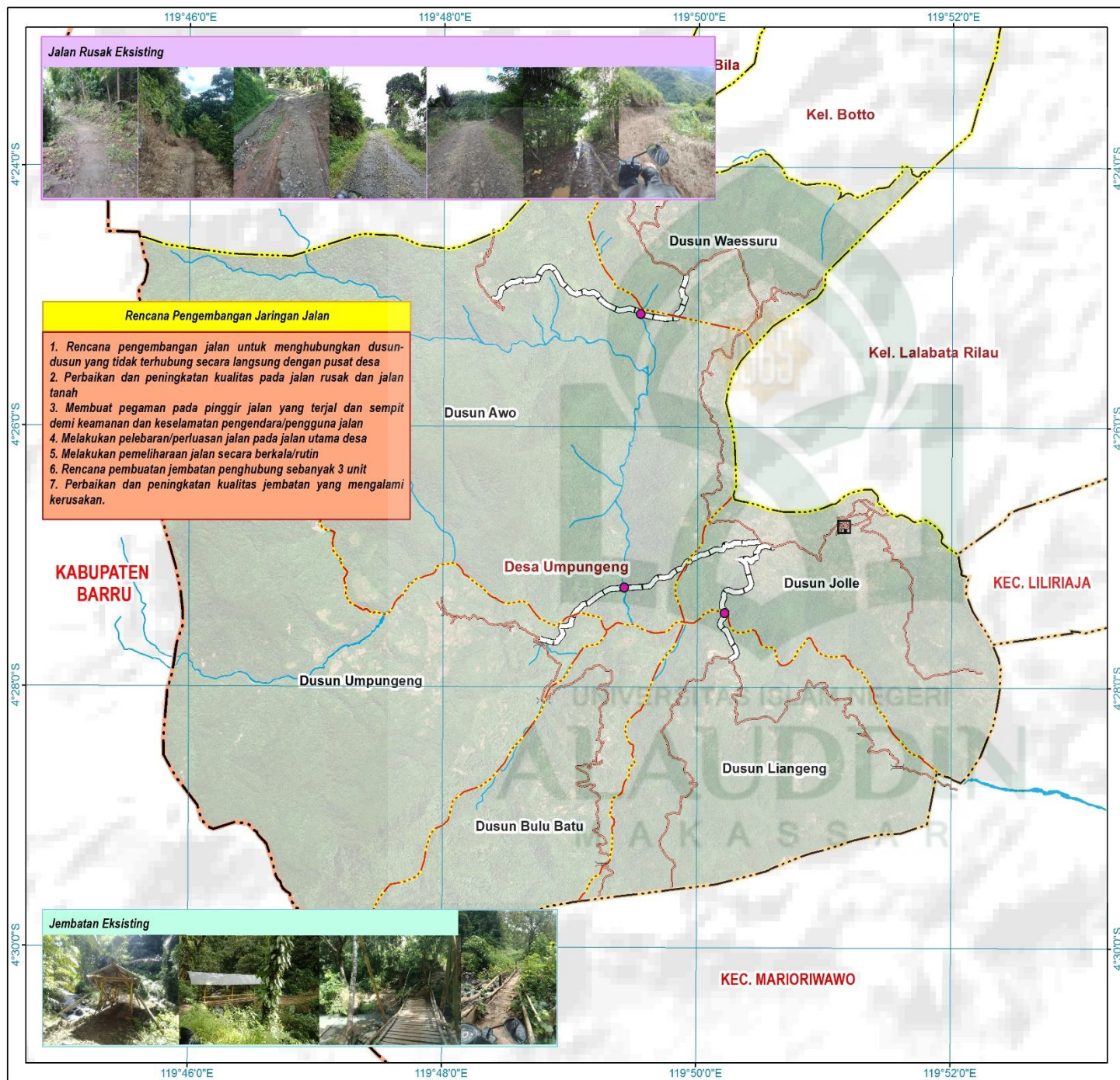
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

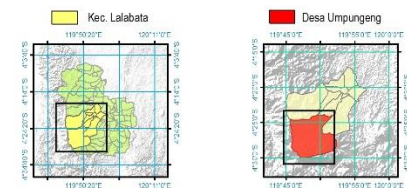
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Rencana Jaringan Jalan dan Jembatan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Jalan Rencana
- Jalan Eksisting
- Rencana Jembatan
- Jembatan

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

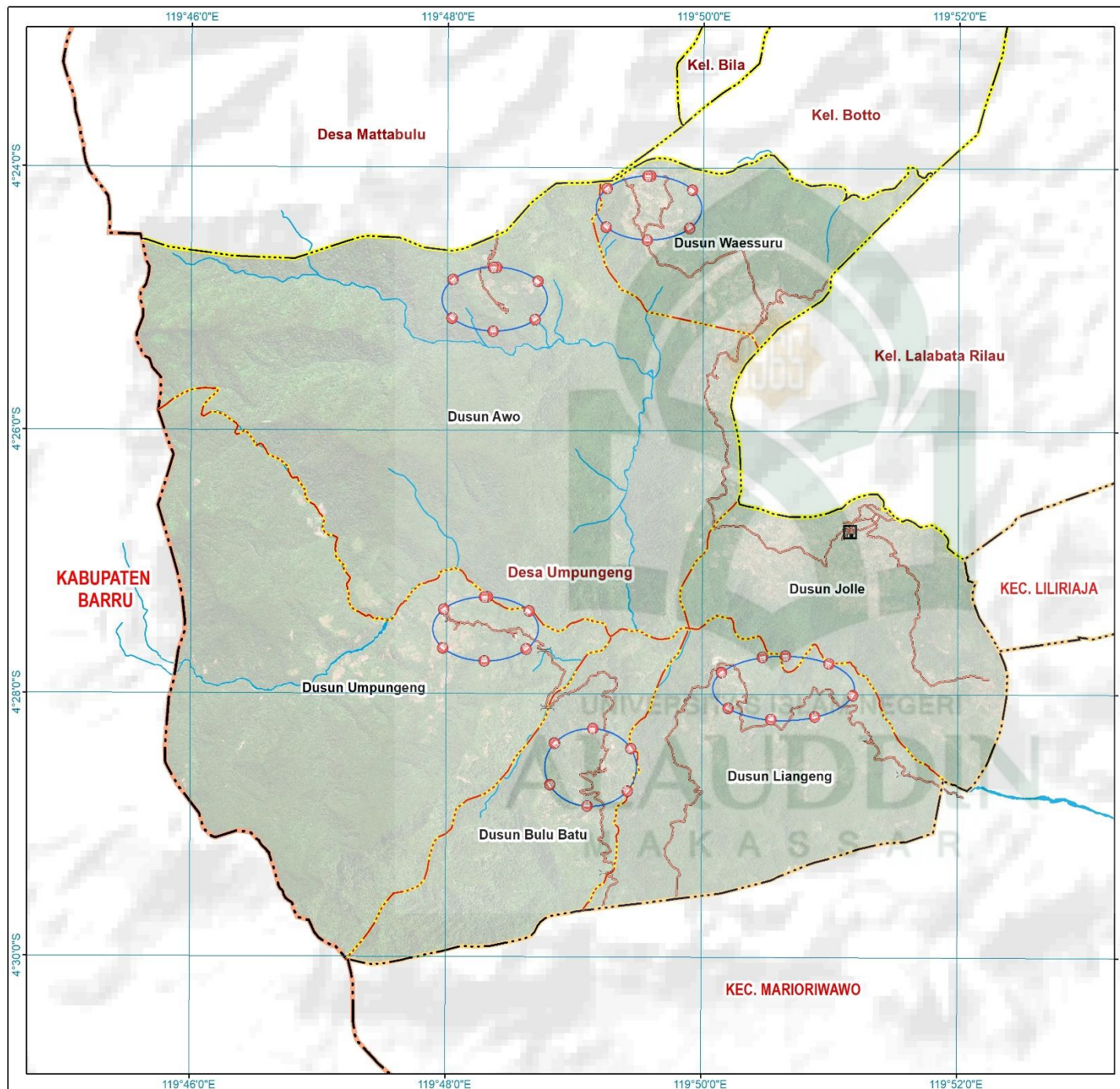
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

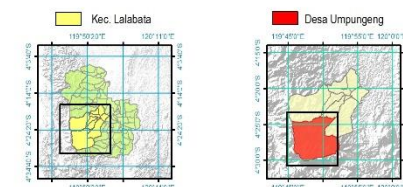
DIGAMBAR OLEH :

Yawah Awaliyah



Peta Rencana Jaringan Listrik

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

KETERANGAN

- Program Listrik Desa

SUMBER DAN RIWAYAT PETA

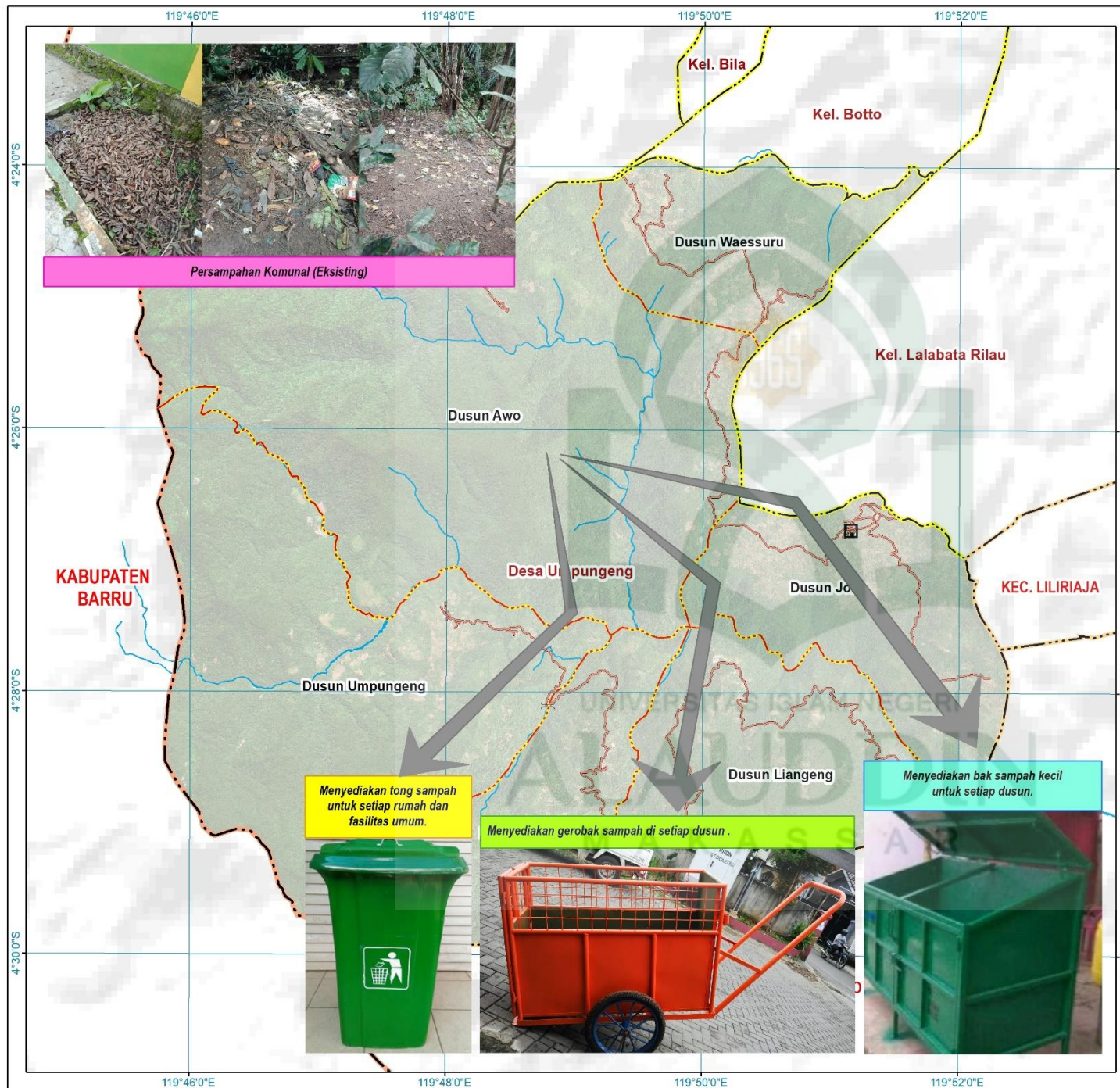
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si, M.H.
Andi Asmulyani, S.T., M.Si.

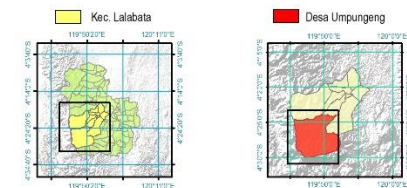
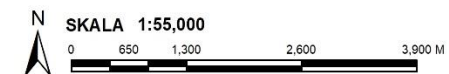
DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah



Peta Rencana Jaringan Persampahan

DESA UMPUNGENG



Proyeksi : Transverse Marcator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

LEGENDA KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Kantor Desa
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

PERHUBUNGAN

- Jalan Lokal
- Jembatan

PERAIRAN

- Sungai

SUMBER DAN RIWAYAT PETA
Survey Lapangan Tahun 2018
Citra Satelit Tahun 2018
Peta Administrasi Kecamatan Lalabata

DIPERIKSA OLEH :

Ir. Mahmuddin, M.Si., M.H.
Andi Asmullany, S.T., M.Si.

DIGAMBAR OLEH :

Yayah Awaliyah

I. Kajian Islam Terkait Kebutuhan Infrastruktur

Allah Swt. memberikan petunjuk kepada manusia agar menempuh jalan menuju kebaikan dan memberi kemudahan bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang disebutkan dalam firmanNya dalam QS Al A'la/87:8 yang berbunyi :

وَنُيِّسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝

Terjemahnya :

“Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kemudahan dunia dan akhirat)”. (Departemen Agama RI, 2012 : 592)

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. akan memberikan kemudahan kepada umat manusia untuk berbagai perbuatan dan ucapan yang baik, serta membuatkan untuk umat manusia jalan yang penuh kemudahan dan toleransi lagi lurus dan seimbang, tanpa adanya kebengkokan, rintangan dan kesulitan padanya. (Al-Sheikh, 2004)

Sedangkan menurut tafsir Al Mishbah pada ayat ini terdapat kata *nuyassiruka* demikian pula *al-yusrā* keduanya berakar pada kata *yusr* yang antara lain berarti mudah, ringan, berat kadarnya atau banyak jumlahnya. Alhasil kata tersebut menggambarkan segala sesuatu yang sifatnya positif dan menyenangkan. Ia merupakan antonim dari kata ‘*usur* yang menunjuk aneka makna dan kesemuanya mengandung arti memberatkan dan menyulitkan. Dengan demikian Allah swt. melalui ayat di atas menjanjikan aneka hal positif dan menyenangkan bagi Nabi Muhammad saw. Hal itu bukan saja berkaitan dengan kemudahan menghafal Al-Quran sebagaimana dipahami oleh sementara ulama, tetapi dapat mencakup selainnya yakni yang berkaitan dengan tugas menyampaikan dakwah bahkan lebih

jauh dari itu yakni menyangkut segala sesuatu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw. baik sebagai Nabi dan Rasul maupun sebagai pribadi. (Shihab, 2002 : 212)

Allah swt. memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk berbuat baik dan mengarahkan manusia menuju jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah swt. Dalam proses kehidupan manusia di Bumi, manusia mempunyai beragam kebutuhan yang harus terpenuhi demi keberlangsungan kehidupannya. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup, membutuhkan air untuk minum dan membersihkan diri, membutuhkan tempat untuk beribadah, membutuhkan jalan untuk dapat melakukan pergerakan, membutuhkan sekolah/madrasah untuk belajar dan mencari ilmu serta mengajarkan kebaikan, membutuhkan listrik untuk penerangan, serta kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu Allah swt. memberikan kemudahan kepada manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.

Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan manusia terhadap infrastruktur, maka Nabi saw. bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (متفق عليه)

Terjemahnya :

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seorang Muslim itu adalah saudaranya orang Muslim lainnya, janganlah ia menganiaya saudaranya itu, jangan pula menyerahkannya - kepada musuh. Barangsiapa memberikan pertolongan pada hajat saudaranya, maka Allah selalu

memberikan pertolongan pada hajat orang itu. Dan barang siapa melapangkan kepada seseorang Muslim akan satu kesusahannya, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi cela seseorang Muslim maka Allah akan menutupi celanya pada hari kiamat." (Muttafaq 'alaih)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". (رواه مسلم، 2699)

Terjemahnya :

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seseorang Mu'min di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang yang kesukaran, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi cela seseorang Muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat. Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, selama hamba itu suka memberikan pertolongan kepada saudaranya. Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari suatu ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Tiadalah sesuatu kaum itu berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, untuk membacakan kitab Allah - Al-Quran - juga mentadurusnya antara mereka itu – membaca secara bergantian, melainkan turunlah kepada mereka ketenangan hati, ditutupi oleh kerahmatan Tuhan, juga diliputi oleh para malaikat dan Allah menyebutkan mereka itu di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalannya sendiri, maka ia tidak akan dipercepatkan oleh keturunan darahnya – yakni bahwa kebahagiaan itu tergantung pada amal seseorang dan bukan karena darah ningrat atau keturunan." (Riwayat Muslim, 2699)

Keterangan:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Hadis ini ialah:

1. Memudahkan artinya memberi pertolongan. Maka dengan jelas dalam Hadis ini betapa utamanya memberikan pertolongan untuk menyampaikan hajat kebutuhan kaum Muslimin, baik yang berupa ilmu pengetahuan, harta, derajat, nasihat atau menunjukkannya ke arah kebaikan. Juga pertolongan yang berupa tenaga atau doa yang ditujukan agar saudaranya seagama itu tercapai maksudnya.
2. Menempuh jalan artinya, baikpun berjalan betul-betul untuk mencari ilmu itu misalnya pergi ke sekolah, pondok, pesantren dan lain-lain atau mencari jalan semacam kiasan, misalnya belajar sendiri menelaah kitab-kitab agama dan lain-lain sebagainya.
3. Rumah Allah misalnya masjid, madrasah dan sebagainya.
4. Orang yang suka melakukan ini (yakni berkumpul lalu belajar yang tak dimengerti atau mengajarkan yang sudah diketahui), orang tersebut akan mendapat ketenangan hati, dilimpahi rahmat Allah, dikerumuni malaikat karena gembira melihat orang yang sedemikian itu dan oleh Allah disebut-sebut akan dimasukkan dalam golongan hamba-Nya yang sangat *taqarrub* (mendekat) dan sangat taat pada-Nya, seperti para malaikat dan sekalian Nabi, sebab bangga melihat perbuatan hamba-Nya yang baik itu dan mengagumkan sebutannya. Inilah Hadis yang menunjukkan keutamaan membaca al-Quran secara bersama-sama atau tadarus.
5. Orang yang sedikit amal kebbaikannya, tentu tidak dapat mencapai tingkat kesempurnaan taqwa hanya dengan menonjol-nonjolkan keturunannya saja.

Allah berfirman: "Sesungguhnya orang yang termulia di antara engkau sekalian itu adalah orang yang paling taqwa." (Al-Hilali, 2005 : 578)

Rasulullah Saw. dalam sabdanya menganjurkan untuk memenuhi hajat/kebutuhan umat manusia. Kebutuhan manusia sangatlah beragam dan bermacam-macam. Terkait dengan hal itu kebutuhan manusia terhadap infrastruktur seperti manusia membutuhkan jalan dan jembatan sebagai sarana perhubungan untuk menuju ke arah yang baik yang diridai Allah swt.; menyediakan sekolah/madrasah untuk menuntut ilmu, menyediakan sarana kesehatan demi kemashlahatan umat; membangun mesjid sebagai tempat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. dan sebagai tempat berkumpulnya umat muslim tanpa memandang suku, jabatan, kekayaan karena yang paling mulia di sisi Allah swt. ialah yang paling bertaqwa; penyediaan jaringan air bersih karena air merupakan sumber kehidupan umat manusia; jaringan listrik untuk penerangan sehingga umat dapat mendapat penerangan dalam beribadah, belajar, memasak dll.; jaringan persampahan karena Allah swt. mencintai hamba-Nya yang bersih dan menjaga kesehatan, serta semua jenis infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelayanan di Desa Umpungeng terdiri atas :
 - Tingkat efektivitas pelayanan sangat tinggi dengan nilai 5 yaitu pelayanan pendidikan TK/RA/BA, pelayanan pendidikan SD sederajat dan ketersediaan poskesdes/polindes.
 - Tingkat efektivitas pelayanan tinggi dengan nilai 4 yaitu pelayanan pendidikan SMP sederajat dan ketersediaan puskesmas/pustu.
 - Tingkat efektivitas pelayanan sedang dengan nilai 3 yaitu pelayanan lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, pelayanan listrik, pelayanan air bersih dan sanitasi serta pelayanan komunikasi dan informasi.
 - Tingkat efektivitas pelayanan rendah dengan nilai 2 yaitu pelayanan perdagangan dan jasa dan fasilitas olahraga.
 - Tidak terlayani dengan nilai 0 yaitu pelayanan pendidikan SMA sederajat.
2. Arahkan pengembangan infrastruktur di Desa Umpungeng meliputi rencana pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, rencana penyediaan balai kesehatan, rencana pengembangan jalan penghubung dan jembatan penghubung desa, peningkatan kualitas jalan dan jembatan rusak, pemeliharaan terhadap jalan dan drainase, pengadaan jaringan listrik bagi wilayah dusun yang belum teraliri listrik, penyediaan tong sampah, bak sampah kecil dan gerobak

sampah, serta pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reuse*, *Reduce* dan *Recycle*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Soppeng diharapkan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan infrastruktur desa sehingga meminimalisir terjadinya disparitas antar wilayah serta peningkatan kualitas dan pemeliharaan semua infrastruktur dasar.
2. Perlu melibatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan terhadap penyediaan dan perbaikan infrastruktur.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. dalam melakukan penelitian terkait pelayanan infrastruktur suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Hilal, Syaikh Salim bin 'Ied (2005). *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Al-Sheikh, A. B. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- AS, Nursyam (2013). *Struktur Tata Ruang Wilayah dan Kota*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Ambarani, H. (2015). *Daya Layan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Efektivitas Jaminanan Kesehatan masyarakat untuk Peningkatan Derajat Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo*. Yogyakarta: Skripsi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM.
- Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi*, 250-265.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, (2018). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan*
- BPS Kabupaten Soppeng, (2017). *Kabupaten Soppeng dalam Angka 2017*
- BPS Kabupaten Soppeng, (2017). *Kecamatan Lalabata dalam Angka 2017*
- Barokah, H., Utami, D. R., karmaji, Sugiarto, C. S., Suchaini, U., Widyaningsih, D., . . . Abduh, M. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Kementrian PPN; Badan Pusat Statistik.
- Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B., & Nuroji. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 137-156.
- Dharmasanti, R. (2016). *Sarana Prasarana Permukiman berdasarkan Sistem Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara*. Yogyakarta: Skripsi. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.
- Farida, U. (2013). Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal . *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 49-66.

- Haris, A. (2009). *Pengaruh Penatagunaan Tanah terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur*. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas, 1-9.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumastuti, A. (2015). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi*, 81-97.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Muta'Ali, L. (2016). *Pengembangan Wilayah perdesaan (Perspektif Keruangan)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Pedoman Umum Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja Tahun 2014, Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Ditjen Binapenta Kemenkertrans RI
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Pollo, J. Y., Tondobala, L., & Sela, R. L. (2011). Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Pesisir Studi Kasus: Desa Likupang Dua dan Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 44-58.
- Putri, H. T., & Maryati, S. (2018). Prioritas Penyediaan Infrastruktur Dasar oleh Pengembangan Perumahan di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. *Jurna Plano Madani*, 1-23.

- Sasmita, S. A. (2012). *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syahza, A., & Suarman. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 126-139.
- Tarigan, R. (2015). *Perencanaan Pembangunan wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waworuntu, C. (t.thn.). Efektivitas Pemekaran dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Kolongan Atas Kecamatan sonder). 1-11.
- Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yayah Awaliyah lahir di Watansoppeng pada hari Ahad tanggal 17 Desember 1995, ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan **Hasanuddin** dan **Hj. Rahminah** yang merupakan suku Bugis yang tinggal dan menetap di Soppeng. Ia menghabiskan masa pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Jolle pada tahun 2001-2002. Setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 15 Jolle pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar tahun 2008-2011 dan pendidikan menengah atas di SMA Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar tahun 2011-2014. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar melalui penerimaan jalur UM-PTAIN dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliah selama 3 tahun 10 bulan yaitu pada tanggal 30 Juli 2018.